



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016

TENTANG

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, serta Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga Tahunan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 4

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 ini menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 ini merupakan penyesuaian Sasaran dan Indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2017, dan dijadikan sebagai Tolak Ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pada Tahun 2017.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1313

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd.

KRISNA RYA



RENCANA KERJA 2017





Masyarakat Peduli Api di Desa Sepahat dan Desa Tanung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, melakukan pencegahan kebakaran hutan. Aktivitas pengendalian kebakaran hutan berbasis desa ini telah membantu Provinsi Riau menurunkan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Foto oleh Dwi Prasetyo Budi Santoso.

RENCANA KERJA 2017. KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN.

Diterbitkan oleh Biro Perencanaan, Kementerian LH dan Kehutanan. Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta.

Dokumen ini merupakan Rencana Pembangunan LH dan Kehutanan Tahun 2017, yang memuat indikasi kinerja dan anggaran untuk memenuhi sasaran pembangunan nasional 2017.

Rencana Kerja 2017 ini memuat hasil-hasil diskusi dalam berbagai forum yang secara resmi diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan internal Kementerian LH dan Kehutanan.

Naskah dan tata letak disiapkan oleh Thomas Nifinluri, Sandi Kusuma, Yanti Novianti, Edi Sulisty dan Mira Sofia.

Editor : Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan dan Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian LH dan Kehutanan.

Seluruh foto adalah aktifitas pembangunan LH dan Kehutanan yang disumbangkan oleh (diurutkan sesuai abjad) : Abdullah Sajad (Tim *Milestone Succes Story* Pembangunan LH dan Kehutanan 2015), Asri (Balai TN. Taka Bonerate), Crist Lamba Awang (Balai TN. Wakatobi), Dwi Prasetyo Budi Santosa (Tim *Milestone Succes Story* Pembangunan LH dan Kehutanan 2016), Ganda Diarsa Utara (Balai TN. Bali Barat), Haryadi (Balai TN. Kutai), Imas Fardilah (Biro Perencanaan), Iskandar (Balai TN. Gunung Merapi), Lidia Lilly (Balai Besar TN. Betung Kerihun-Danau Sentarum), Muhammad Nurdin Asfandi (B2P2BPTH Yogyakarta), Sandi Kusuma (Biro Perencanaan), dan Simon Onggo Eko Hastomo (Balai TN. Laiwangi Wanggameti-Manupeu Tanadaru).

Foto sampul adalah Jalak Bali yang dilepasliarkan hasil pengembangbiakan di dalam habitat alamnya (*in situ*) di TN. Bali Barat. Foto oleh Dwi Prasetyo Budi Santosa. Foto di samping adalah lanskap TN. Komodo, salah satu dari 10 destinasi wisata Indonesia. Foto oleh Imas Fardilah

S E N A R A I

iv	Pengantar Menteri
v	Ikhtisar
1	Pendahuluan : Pembangunan Nasional 2017, apa yang hendak dicapai?
4	Strategi LH dan Kehutanan 2017 : Bagaimana LH dan Kehutanan membangun peran untuk pembangunan nasional 2017
24	Indikasi anggaran, evaluasi keberhasilan dan indikasi lokasi
27	Penutup

L A M P I R A N





Pengantar Menteri

Money follow programs meruak ke seluruh sendi LH dan Kehutanan. Wanginya menguar aroma perubahan. Seturut dengan itu, LH dan Kehutanan berbenah dan mensegerakan seluruh entitas (KPH, TN, DAS, Kab/Kota dan akses masyarakat) dapat diberikan intervensi secara langsung agar keberhasilannya mampu diartikulasikan ke tingkat nasional. Dan jika mengikuti Rencana Strategis 2015-2019, langkah ini seperti menggeser *milestones* pembangunan Tahun 2018 ke tahun 2017. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa.

Langkah ini justru menjadi semacam penajaman kembali atas peran LH dan Kehutanan. Bahkan di dalam benak kami, penajaman ini terlihat lebih nyata untuk mengantarkan tujuan pembangunan LH dan Kehutanan ke hadapan publik.

Selanjutnya, nukilan tujuan pembangunan LH dan Kehutanan adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang pada populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Dokumen ini, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja 2017, berusaha untuk meruangi gerak langkah pembangunan LH dan Kehutanan tahun 2017. Proses perumusan dari penajaman kinerja LH dan Kehutanan telah dilakukan di berbagai forum dan mekanisme, mulai dari Multilateral Meeting I dan II, Bilateral Meeting I dan II, serta Trilateral Meeting I dan II.

Secara ringkas, pada tahun 2017, LH dan Kehutanan hendak memastikan sistem alami lingkungan mampu menyediakan kelimpahan air dengan kualitasnya yang semakin meningkat di wilayah pemukiman dan perumahan dan mendukung pasokan pangan. Dari kelimpahan air ini, LH dan Kehutanan juga hendak membantu meningkatkan rasio elektrifikasi dengan menerangi desa-desa di sekitar kawasan hutan dalam penggunaan energi baru dan terbarukan : mikro dan mini hidro.

Kekayaan dan kelimpahan sumberdaya hutan juga akan dikelola sebagai sumber produksi. Erat bertalian dengannya, kapasitas desa dalam pengelolaan sumberdaya akan ditingkatkan. Sehingga saat keduanya bertaut, semoga desa-desa sebagai sumber produksi hasil hutan dapat tumbuh dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dari sinilah, LH dan Kehutanan memahami diantaranya apa yang disebutkan dalam nawa cita sebagai membangun Indonesia dari pinggiran.

Secara keseluruhan, LH dan Kehutanan menyumbang 14 dari 23 prioritas nasional, terserak pada 21 program prioritas dan 47 kegiatan prioritas. Upaya pemenuhan kinerja didukung oleh 13 Program, yang setiap kinerjanya merupakan bagian penting dalam pencapaian *milestones* pembangunan LH dan Kehutanan 2017.

Akhirnya, kita semua berharap bahwa apa yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan. Dan yang terpenting, hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi pelaksanaan program prioritas yang telah digariskan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia NYA bagi kita untuk menjaga tapak lingkungan dan hutan Indonesia dan membawanya menjadi tempat hidup yang lebih bermanfaat bagi manusia.

Jakarta,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

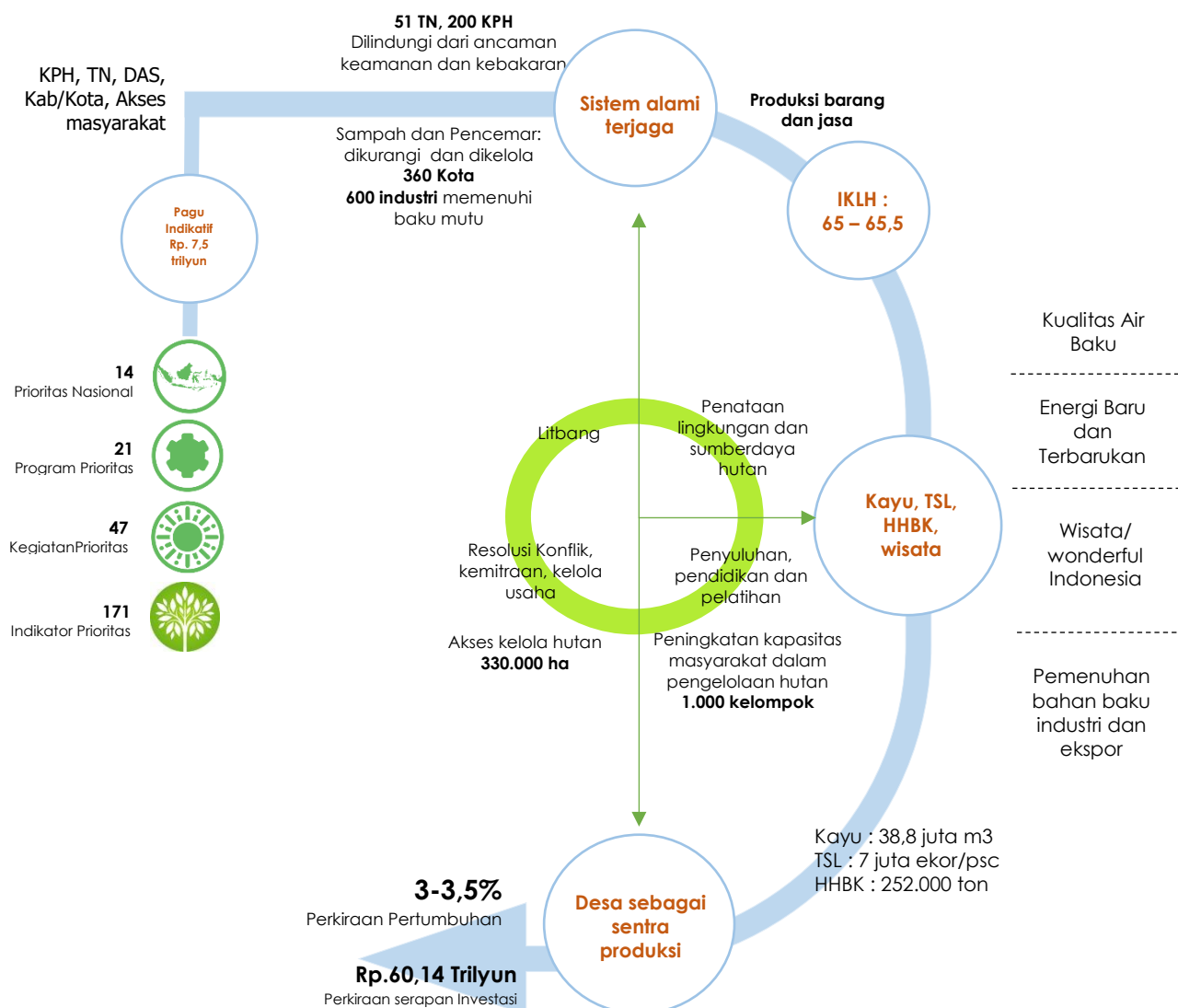


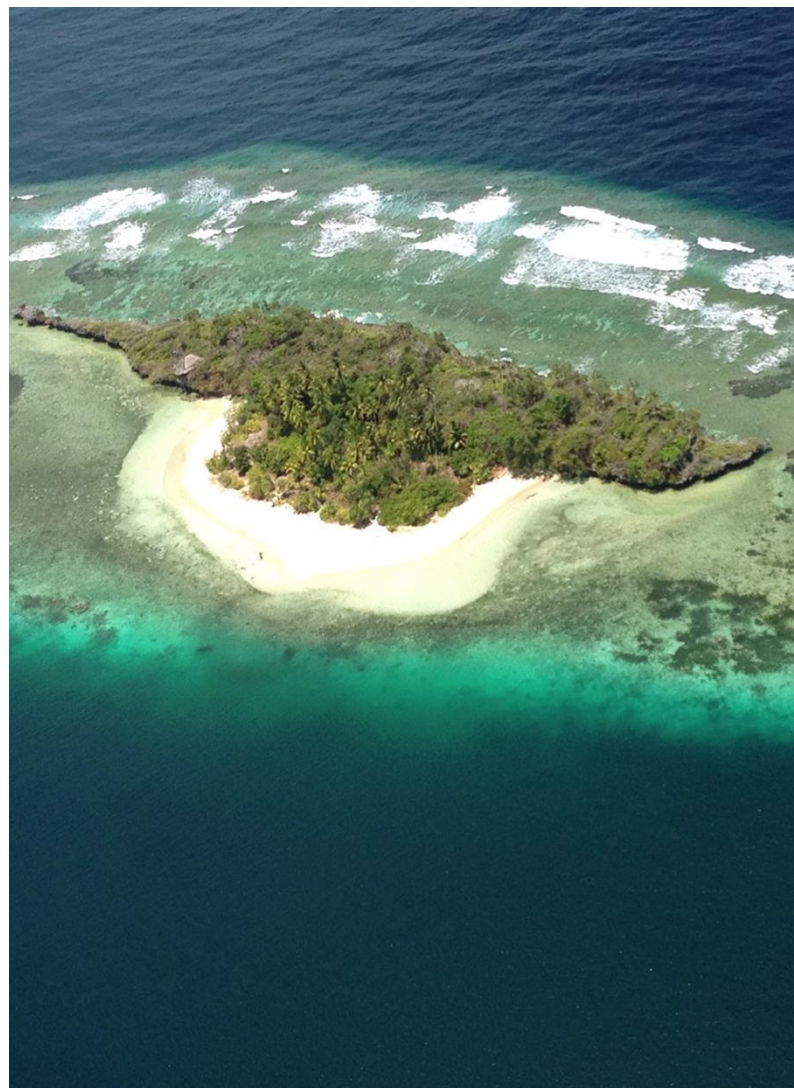
Pulau Hoga, salah satu lokasi selam yang banyak diminati oleh pengunjung TN. Wakatobi. TN. Wakatobi tahun 2017 dipersiapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata nasional. Foto oleh Sandi Kusuma. Foto Menteri LH dan Kehutanan di halaman samping oleh Muhammad Nurdin Asfandi.

I k h t i s a r

Dua strategi bertemu dalam satu tapak. Strategi pertama bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi tapak. Strategi kedua, hendak mendorong produksi barang dan jasa. Tapak ini bernama LH dan Kehutanan, terserak dari Aceh hingga Papua dengan berbagai karakteristik dan isu yang melingkupinya. Selanjutnya, tapak-tapak itu di kelompokkan sebagai entitas pengukuran keberhasilan dari implementasi kebijakan LH dan Kehutanan 2015-2019. Tapak-tapak itu : KPH, TN, DAS, Kab/Kota dan Akses Masyarakat.

Hasil dari pelaksanaan kedua strategi antara lain adalah peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, peningkatan sumbangan PNPB dan devisa dari tapak, dan peningkatan keberfungsian ekosistem. Dampak yang diharapkan adalah pertumbuhan sub sektor LH dan Kehutanan dan serapan investasi di tapak dan desa. Dari sini, pemerataan dapat semakin disebar dan di dekatkan antar wilayah.





Pemantauan ragam hayati dan pemanfaatan sumberdaya di TN. Wakatobi yang dilakukan melalui udara dan pemantauan langsung, termasuk penyelaman. Kegiatan ini menjadi kunci dalam pembangunan berkelanjutan di desa-desa sekitar TN. Wakatobi, bahkan mendukung penyediaan sumberdaya perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Foto oleh Crist Lamba Awang dan Balai TN. Wakatobi.

I

Pendahuluan : Pembangunan Nasional 2017, apa yang hendak dicapai?

Pemerintah Indonesia pada Tahun 2017 hendak memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Keberhasilannya dirumuskan ke dalam sasaran pembangunan yang penanda makronya : pertumbuhan ekonomi, pengurangan proporsi angka pengangguran, pengurangan proporsi angka kemiskinan, nilai indeks rasio gini dan nilai indeks pembangunan manusia.

Strategi untuk memenuhinya ditautkan dengan prioritas nasional yang telah digariskan, yaitu : (1) pembangunan manusia dan masyarakat; (2) pembangunan sektor unggulan; dan (3) pemerataan dan kewilayahan. Kondisi perlu yang dibutuhkan di tahun 2017 diurai ke dalam : (i) pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta (ii) pembangunan ekonomi



Pertumbuhan Ekonomi : 5,5 – 5,9%

Pengangguran : 5,1 – 5,4%

Kemiskinan : 9,5 – 10,5%

Rasio Gini : 0,38

Indeks Pembangunan Manusia : 75,7



Aktifitas pengunjung mancanegara mengamati ragam hayati TN. Kutai, Kalimantan Timur. Foto oleh Haryadi.

LH dan Kehutanan, Tahun 2017 kemana hendak menuju?

Makro Ekonomi LH dan Kehutanan 2017

3-3,5%

Perkiraan Pertumbuhan

Rp.60,14 Trilyun

Serapan Investasi

43.612 orang

Serapan Tenaga Kerja

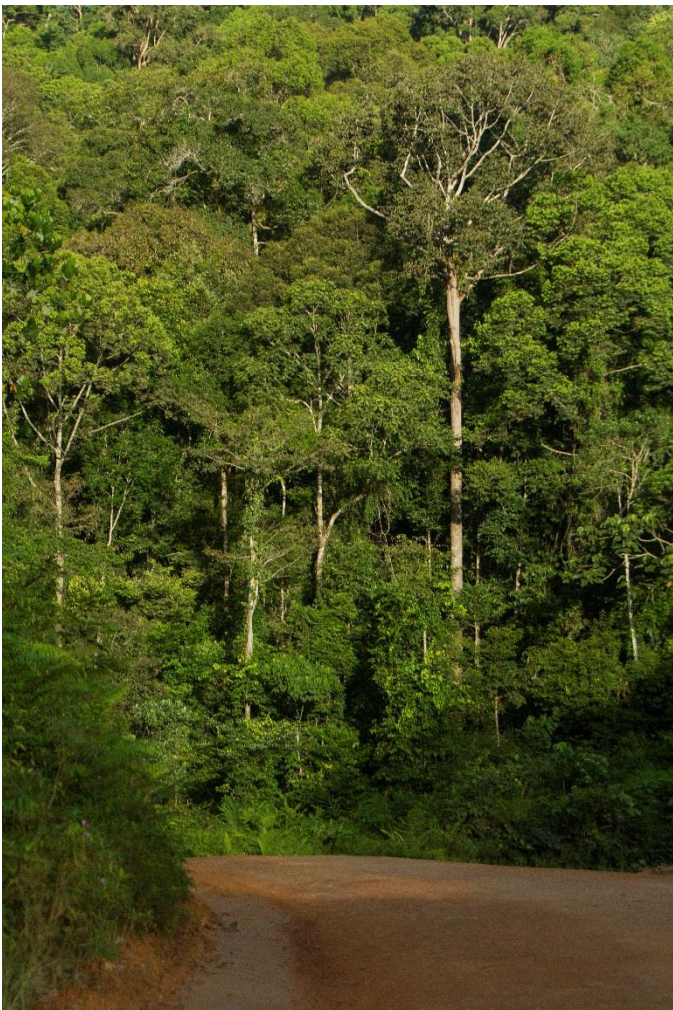
Strategi utama :

Menjaga dan mendorong sumber-sumber pertumbuhan baru di desa dari hasil hutan (kayu, non kayu, tumbuhan dan satwa liar, jasa lingkungan), sesuai karakteristik daerah

LH dan Kehutanan meyakini bahwa ekspresi penting dari geliat pertumbuhan dan perbaikan tata kelola LH dan Kehutanan adalah peningkatan produksi barang dan jasa dari tapak-tapak lingkungan dan hutan.

Berbagai produksi hasil hutan diharapkan meningkat untuk memenuhi bahan baku industri, yang secara langsung meningkatkan PNBPN, ekspor dan devisa, serapan investasi, dan serapan tenaga kerja.

Produksi hasil hutan ini akan bertaut dengan keberadaan masyarakat desa, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sentra-sentra produksi baru sekitar hutan. Hal ini menjadi upaya LH dan Kehutanan untuk menurunkan kesenjangan antar daerah (indeks gini). Berkelindan dengan itu, LH dan Kehutanan 2017 juga hendak membantu menerangi desa-desa di sekitar kawasan hutan dengan memanfaatkan tata air dalam sistem alami kawasan konservasi sebagai penggerak listrik tenaga mini dan mikrohidro, dan pemanfaatan hutan untuk bioenergi (dari jenis Nyamplung, Bintangur, Kemiri dan lain-lain).



Lanskap hutan hujan yang konsesinya dimiliki oleh PT. Sarmiento Parakantja Timber, Kalimantan Tengah. Pelajar SD di sekolah sekitar konsesi sedang memperhatikan *drone* yang sedang dioperasikan. Di sekolah ini, seluruh pelajar dari desa setempat diberikan biaya pendidikan gratis oleh pemegang IUPHHK-HA ini. Foto oleh Dwi Prasetyo Budi Santosa.

II

Strategi LH dan Kehutanan 2017 : Bagaimana Kementerian LH dan Kehutanan Membangun Peran Untuk Pembangunan Nasional 2017?

Prioritas Nasional yang telah digariskan menurunkan program prioritas dan kegiatan prioritas. Upaya pemenuhan sasaran prioritas nasional diinternalisasi ke dalam Rencana Kerja dalam balutan semangat *money follow programs*.

LH dan Kehutanan menyumbang 14 dari 23 prioritas nasional, terserak pada 21 program prioritas dan 47 kegiatan prioritas. Sasaran dan indikator kinerja dipertajam dan diperbaharui seturut kegiatan prioritas nasionalnya.

Strategi LH dan Kehutanan dibangun dengan merumuskan sasaran dan kinerja yang bertaut dengan substansi kegiatan prioritas. Perumusan kinerja ini merupakan upaya penajaman yang dianggap lebih gayut, nyata dan sesegara mungkin dapat dirasakan manfaat langsungnya oleh masyarakat. Diurai di setiap prioritas nasional, dalam lembar-lembar berikut ini.

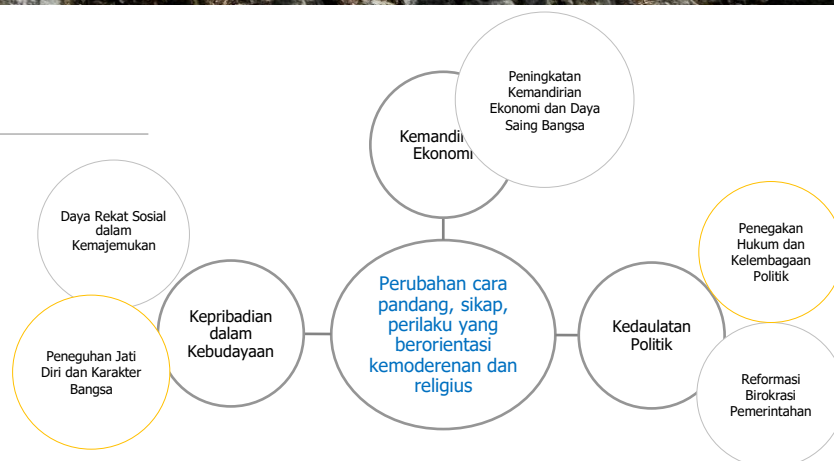


Panorama air terjun Laputi (kiri) dan Kanabui (kanan), sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sumbas, Nusa Tenggara Timur. Keduanya di TN. Laiwangi Wanggameti. Foto oleh Simon Onggo Eko Hastomo.



Membangun kembali kecintaan generasi muda terhadap Lingkungan. Seperti pelajar SMP yang mendaki Gunung Merapi, menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Foto oleh Iskandar.

REVOLUSI MENTAL

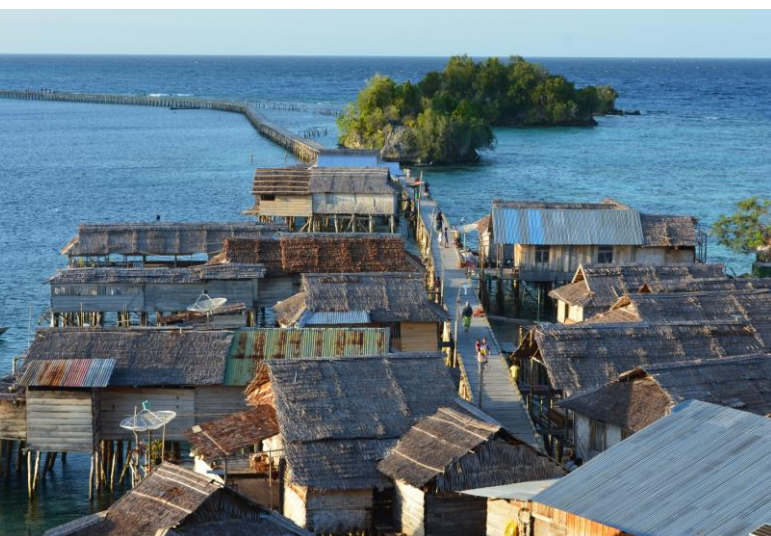


Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Strategi LH dan Kehutanan 2017	Kinerja 2017 LH dan Kehutanan 2017	Program LH dan Kehutanan
Penegakan hukum dan kelembagaan politik	Penegakan hukum yang berkualitas	Menurunkan gangguan keamanan hutan di seluruh fungsi hutan	551 kawasan konservasi, 60 KPHL dan 120 KPHP dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan	KSDAE, PHPL, PDASHL
Penguatan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	Membangun pribadi yang peduli terhadap lingkungan hidup	500 sekolah/ kampus peduli dan berbudaya lingkungan, 100 orang tenaga bakti rimbawan	P2SDM
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur	Jumlah SDM Aparatur dan Non Aparatur meningkat kapasitasnya dalam bidang administrasi, teknis dan fungsional sebanyak 3.000 orang	
			Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya sebanyak 100 orang	
	Lingkungan satuan pendidikan yang bersih, sehat, ramah dan bebas kekerasan	Menyiapkan lingkungan sekolah yang nyaman dan berorientasi pada kebutuhan pekerjaan di kehutanan	Jumlah tenaga bakti rimbawan sebanyak 700 orang (100 orang rekrutmen baru)	
			420 orang tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	P2SDM

KESEHATAN

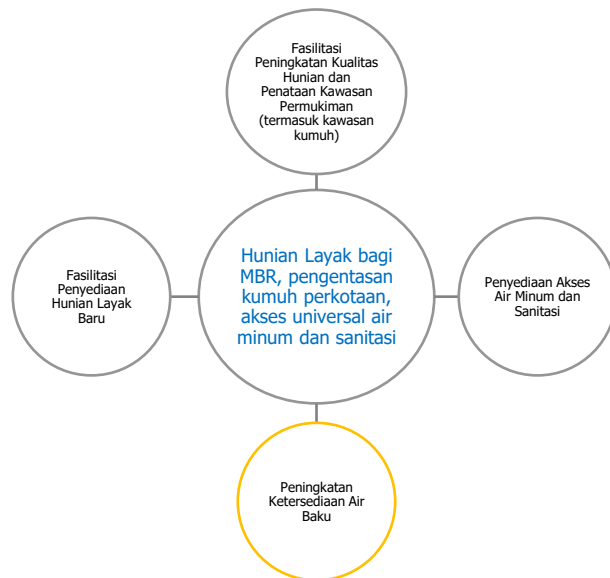


Kegiatan Prioritas	Strategi LH dan Kehutanan 2017	Kinerja 2017 LH dan Kehutanan 2017	Program LH dan Kehutanan
Lingkungan Sehat	Menurunkan kandungan BOD, COD dan E-Coli di DAS Prioritas	1 IPAL Komunal dan sarana sanitasi dasar umum di Sungai Ciliwung	PPKL
	Mengurangi resiko ISPA akibat gangguan asap kebakaran lahan	Jumlah hari status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan berkurang 30% dari tahun sebelumnya	PPI
	Mengurangi resiko ISPA akibat gangguan asap kebakaran hutan	551 Kawasan Konservasi, 17 KPHL dan 52 KPHP dapat dilindungi dari kebakaran	KSDAE, PDASHL, PHPL
	Mengurangi potensi gangguan otak di wilayah tambang emas skala kecil akibat merkuri, dan mengelola limbah medis di Region Sulawesi	Penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non merkuri di 3 lokasi PESK,	PSLB3
	Mengelola limbah medis di region Sulawesi dan sampah di destinasi wisata	1 unit rumah sakit yang memiliki kapasitas untuk mengelola limbah medis di region Sulawesi, dan 9.125 ton sampah di destinasi wisata berkurang melalui 5 pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 5 ton/hari	PSLB3
	Meningkatkan kepedulian lingkungan	382 Komunitas komunitas penyelamat SDA & Lingkungan pada kawasan DAS, Danau/Mata Air, Karst, Rawa, Gambut, Pesisir, Laut, & Pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri & pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan	PSKL

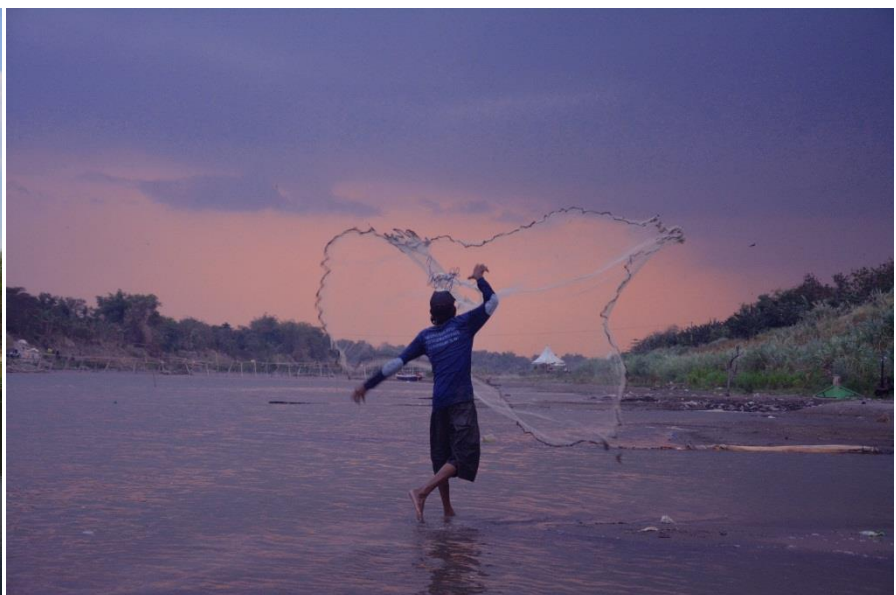


Menjaga lingkungan sehat di wilayah pemukiman nelayan Pulau Papan, TN. Kepulauan Togean. Dimulai dengan menjaga ekosistem agar senantiasa bersih sebagai obyek wisata. Foto oleh Sandi Kusuma.

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN



Strategi LH dan Kehutanan 2017	Kinerja 2017 LH dan Kehutanan 2017	Program LH dan Kehutanan
Kegiatan Prioritas : Jaga Air		
Meningkatkan baku mutu air di 15 DAS Prioritas nasional	6 Titik kontinyu monitoring di 3 sungai (Citarum, Kapuas, Sekampung, masing-masing 2 titik)	PPKL
	2 sungai (Siak, Sekampung) ditetapkan alokasi beban pencemaran	PPKL
	6 IPAL Domestik dan 6 IPAL USK di 6 sungai	PPKL
Mengurangi sampah yang dibuang ke sungai di 15 DAS prioritas nasional	9.125 ton sampah berkurang di 3 DAS Prioritas melalui bank sampah	PSLB3
Meningkatkan fungsi regulasi air dan mengurangi muatan erosi ke tubuh sungai di daerah hulu 15 DAS prioritas nasional	2.000 ha areal rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air, sempadan danau di 15 Danau Prioritas, dan sempadan sungai di 15 DAS Prioritas	PDASHL
Kegiatan Prioritas : Simpan Air		
Meningkatkan jumlah resapan air disekitar 15 DAS prioritas nasional	7.500 unit sumur resapan air di 15 DAS Prioritas	PDASHL
	1.000 Ha areal rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah pada 15 DAS Prioritas	PDASHL



Bengawan Solo yang melintas di Tangen Jenar, Sragen (foto atas) dan di Bojonegoro (bawah). Salah satu DAS Prioritas Nasional. Foto oleh Sandi Kusuma.

KEDAULATAN PANGAN



Strategi
LH dan Kehutanan 2017

Kinerja 2017 LH dan Kehutanan
2017

Program
LH dan
Kehutanan

Kegiatan Prioritas : Pencetakan Sawah Baru dan Perluasan Areal Pangan Lain

Menyediakan kawasan hutan sebagai areal sawah baru dan pangan lainnya	1 juta ha kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	PKTL
---	---	------

Kegiatan Prioritas : Optimasi dan Pemulihan Kesuburan Lahan

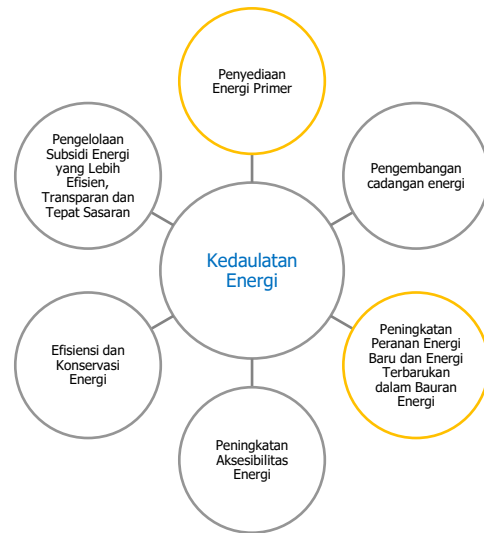
Memanfaatkan ruang di bawah tegakan hutan sebagai lahan pangan	10.000 Ha (setara 30 ribu ton padi dan pangan lainnya) pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry pada kegiatan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat	PSKL
--	--	------

Kegiatan Prioritas : Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk dan Embung

Meningkatkan kapasitas hulu DAS (non struktural) untuk meningkatkan kemampuan dukungan struktural (bendungan, waduk)	25 Dam Pengendali, 4.000 Dam Penahan, 8.000 Gullyplug	PDASHL
	15.000 Ha areal rehabilitasi di hulu DAS Prioritas dan KPH	PDASHL

Hutan rakyat di Jatipurno, Wonogiri, selain dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun iklim mikro, juga dimanfaatkan untuk menanam padi dan tanaman palawija lainnya di bawah tegakan. Dua foto dibawahnya adalah DAM Penahan di Jatipurno, Wanogiri dan Parang, Magetan. Foto oleh Sandi Kusuma.

KEDAULATAN ENERGI



Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Strategi LH dan Kehutanan 2017	Kinerja 2017 LH dan Kehutanan 2017	Program LH dan Kehutanan
Penyediaan Energi Primer	Pengendalian Produksi Batubara	Meningkatkan pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk produksi batubara	Permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	PKTL
Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi	Pengembangan Bioenergi	Menyediakan kawasan hutan produksi sebagai areal hutan tanaman dengan jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan energi biomassa	Pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi (jenis tanaman Eucalyptus pellita, Sengon, Gamal, Lamtoro, Nyamplung, Bintangur, Akasia, Rumput Gajah, Kaliandra, Kemiri), 20 ribu Ha setara dengan 20 MW	PHPL
		Meningkatkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi	50 ton limbah B3 dan limbah Non B3 yang dimanfaatkan menjadi bahan bakar	PSLB3
	Pengembangan PLT Matahari, Hidro, Tenaga Angin, Arus Laut dan Nuklir	Memanfaatkan fungsi air di hutan konservasi sebagai pembangkit listrik tenaga mikro/mini hydro	Pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit setara 1.500 Kwatt	KSDAE
	Pembangunan PLTP	Menyediakan kawasan hutan konservasi sebagai lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi	5 Unit kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi	KSDAE



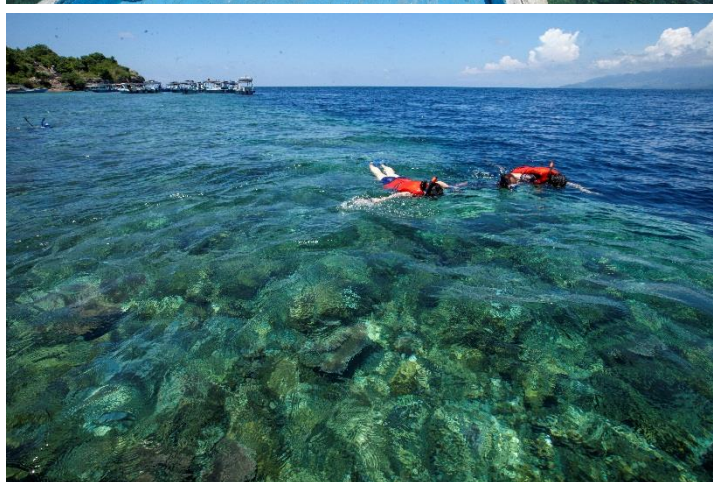
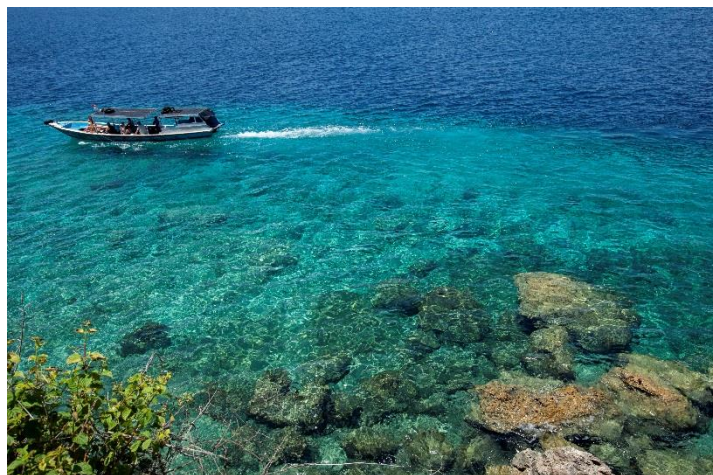
Hutan Desa Lubuk Beringin, Jambi. Aliran airnya mnghidupkan listrik dengan tenaga Mikrohidro, sawah dan perikehidupan masyarakat. Foto oleh Abdullah Sajad

KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

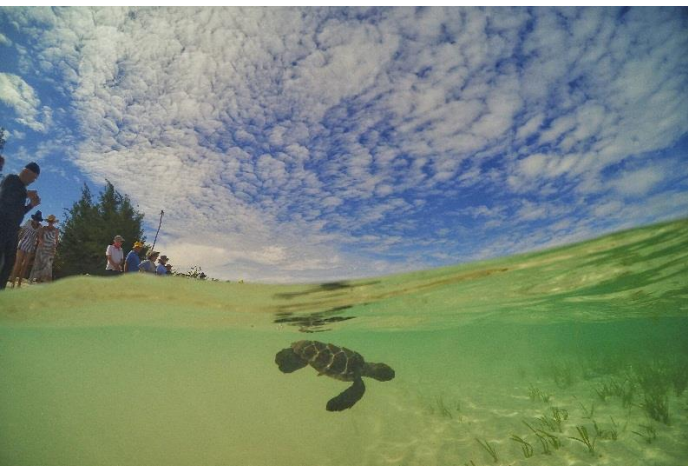
Strategi LH dan Kehutanan 2017	Kinerja 2017 LH dan Kehutanan 2017	Program LH dan Kehutanan
Kegiatan Prioritas : Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir		
Memastikan 6 wilayah pesisir dapat dicegah dampak lingkungan akibat adanya pembangunan dari berbagai sektor	KLHS tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	PKTL
Kegiatan Prioritas : Konservasi Pesisir dan Laut		
Meningkatkan kualitas pengelolaan nilai-nilai yang di konservasikan baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi	Peningkatan populasi penyu, dan keanekaragaman jenis ikan di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut	KSDAE
	30 unit kawasan konservasi laut dan pesisir yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	KSDAE
	6 kawasan mangrove di 2 Ekoregion (Sumatera dan Jawa) dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	KSDAE
Kegiatan Prioritas : Rehabilitasi Kawasan Pesisir dan Laut		
Meningkatkan kapasitas hutan mangrove dalam menyangga kehidupan pesisir dan laut	500 Ha areal rehabilitasi hutan mangrove pada kawasan hutan	PDASHL
Meningkatkan kemampuan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan pantai dalam menyangga kehidupan pesisir dan laut	2 kawasan prioritas kawasan yang dipulihkan ekosistemnya (pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai)	PPKL
Kegiatan Prioritas : Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut		
Meningkatkan kualitas air di wilayah pesisir	2 unit Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan	PPKL
	2 lokasi lokasi pesisir dan laut yang dilakukan clean up akibat tumpahan minyak	PPKL
Kegiatan Prioritas : Pengelolaan Wisata Bahari		
Menyiapkan kawasan konservasi di daerah pesisir sebagai destinasi wisata	33 Unit Kawasan Konservasi siap dikunjungi dengan sarana prasarana yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	KSDAE

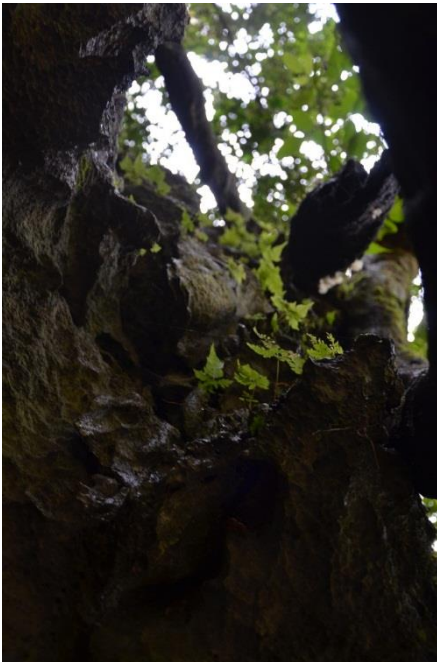


Pemantauan keragaman jenis karang di TN. Taka Bonerate, Sulawesi Selatan, sebagai salah satu upaya konservasi pesisir dan laut. Foto oleh Asri.

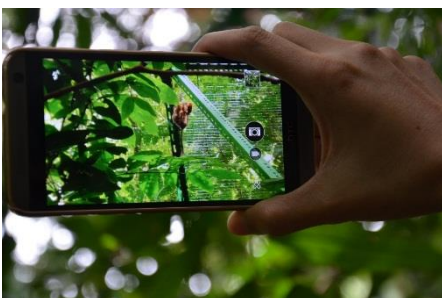


Selain taman-taman nasional yang menjadi destinasi wisata nasional, LH dan Kehutanan juga menyiapkan taman nasional lainnya sebagai daerah rembesan yang mendukung kebutuhan pengunjung. Diantaranya adalah TN. Bali Barat, yang secara geografi sering dijadikan lintasan pengunjung yang hendak ke TN. Komodo (destinasi wisata nasional). Foto oleh Ganda Diarsa Utara dan Dwi Prasetyo Budi Santosa. Di Halaman samping adalah foto-foto TN. Taka Bonerate, yang cenderung menjadi daerah perluasan kunjungan wisatawan ke TN. Wakatobi dan Bali. Secara periodik ditemui kapal pesiar dari Bali ke perairan Taka Bonerate ini. Foto oleh Asri.





PARIWISATA



Lanskap dan potensi TN. Bantimurung sebagai obyek wisata. Mulai dari batuan Karst yang mengendapkan air (atas), jalur wisata di pinggir air terjun (kiri bawah) dan Tarsius yang difoto oleh pengunjung menggunakan telepon genggam. Foto oleh Sandi Kusuma.

Strategi LH dan Kehutanan 2017	Kinerja 2017 LH dan Kehutanan 2017	Program LH dan Kehutanan
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Kegiatan Prioritas : Penyiapan Daya Tarik Wisata

Menyiapkan kondisi obyek daya tarik wisata alam di hutan konservasi agar siap untuk dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara	12 unit sanctuary yang terbangun dan beroperasi di kawasan untuk menjadi objek wisata	KSDAE
Menyiapkan kondisi obyek daya tarik wisata alam di hutan produksi untuk dapat diberikan ijin pemanfaatan wisata alam/jasa lingkungan	2.500.000 orang kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	KSDAE
	3 unit usaha jasa lingkungan/ pemanfaatan air/ jasa wisata di hutan produksi	PHPL

Kegiatan Prioritas : Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

Meningkatkan prasarana jalan/jalur pandu wisatawan dalam pengelolaan obyek daya tarik wisata alam di hutan konservasi	Pembangunan jalan akses wisata dalam kawasan konservasi sepanjang 290,8 km	KSDAE
---	--	-------

Kegiatan Prioritas : Pembangunan Fasilitas Umum Pemeliharaan Dalam Kawasan

Meningkatkan sarana wisata alam di hutan konservasi	Sarana prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge, MCK, tempat pengolahan sampah, pondok pemandu dll) di 14 kawasan konservasi termasuk kawasan konservasi dalam objek wisata prioritas nasional	KSDAE
Meningkatkan sarana wisata alam di hutan lindung	Sarana prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge dll) dan desain tapak pengelolaan pariwisata alam di 6 KPHL	PDASHL

PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI, KAWASAN INDUSTRI DAN KEK

Strategi
LH dan Kehutanan
2017

Kinerja 2017 LH dan
Kehutanan 2017

Program LH
dan
Kehutanan

Program Prioritas : Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Bagi Industri

Kegiatan Prioritas : Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku dan Pengembangan Industri Hasil Hutan

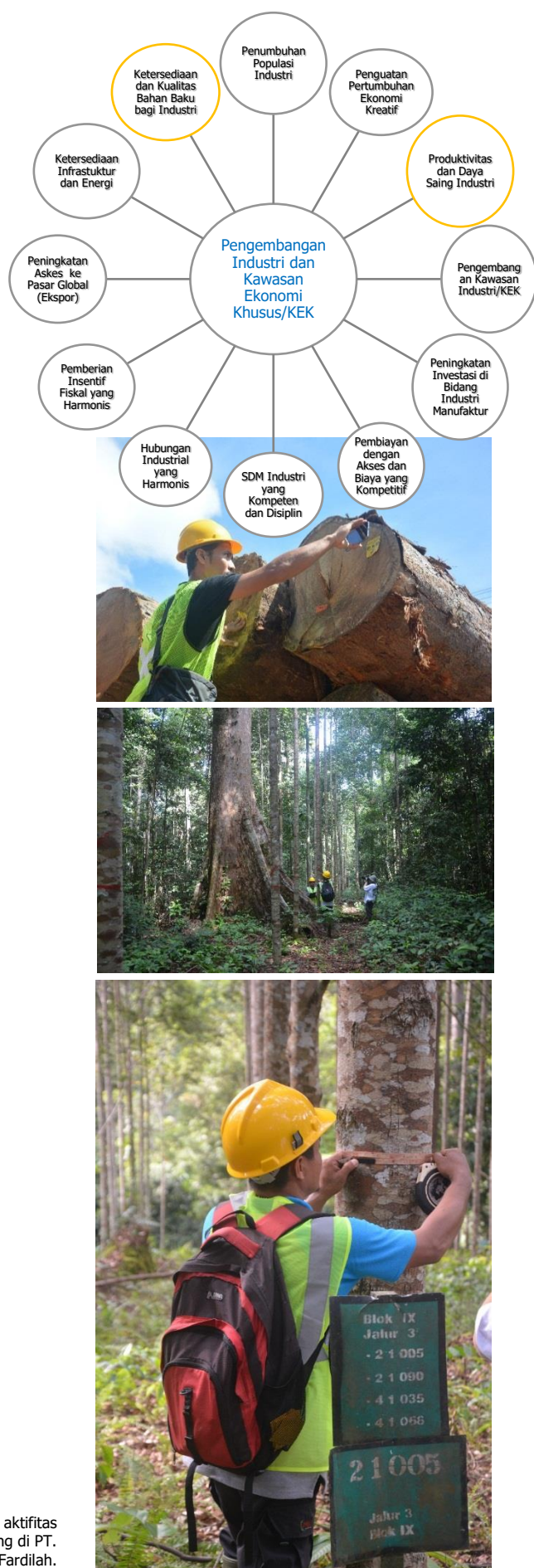
Meningkatkan produksi kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu dari hutan produksi di hutan alam dan hutan tanaman, untuk memenuhi bahan baku industri	Produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman sebesar 38,8 juta m ³	PHPL
	252.000 ton produksi komoditas HHBK dari hutan produksi (rotan, Sagu, damar, Getah Pinus, Kayu Putih, Bambu, Getah Karet, Aren, gaharu)	PHPL
Meningkatkan produksi tumbuhan dan satwa liar untuk memenuhi bahan baku industri berbasis tumbuhan dan satwa liar	Produksi hasil penangkaran TSL dari kelas: a) Anthozoa 2.500.000 pcs; b) Mamalia 4500 ekor; c) Herpetofauna 3.500.000 ekor	KSDAE
	Produksi hasil pemanfaatan TSL dari alam, kelas: a) Mamalia 5.030 ekor; b) Reptil 1.848.916 ekor; c) Amphibia 83.839.375 ekor; d) Burung 7.695 ekor; e) Arthropoda 70.435 ekor; f) Anthozoa 1.979.750 pcs; g) Pisces 10.000 ekor; h) Tumbuhan 975.103 pcs	KSDAE
Meningkatkan produksi kayu dari hutan rakyat, dan hasil hutan bukan kayu dari hutan lindung, untuk memenuhi bahan baku industri	20 juta m ³ produksi kayu dari hutan rakyat	PDASHL
	1.000 Ha Luas dan produksi HHBK dari Hutan Lindung atau KPHL	PDASHL
Meningkatkan produksi kokon sutera alam dalam menunjang bahan baku industri sutera alam	Produksi kokon sutera alam meningkat dalam rangka menunjang bahan baku industri kain sutera sebesar 0,5%	PSKL

Program Prioritas : Produktivitas dan Daya Saing Industri

Kegiatan Prioritas : Pengembangan Industri Hijau

Meningkatkan ketaatan industri dalam pemenuhan baku mutu air dan limbah	188 Industri industri yang memenuhi baku mutu emisi	PPKL
	600 industri industri yang memenuhi baku mutu air limbah melalui Program PROPER	PPKL

Pengecekan kayu setelah disimpan untuk memastikan asal usul kayu, serta aktifitas pengukuran pertumbuhan kayu untuk menduga volume kayu sebelum ditebang di PT. Sarmiento Parakantja Timber. Foto oleh Imas Fardilah.





Penduduk memanfaatkan sumberdaya alam di Danau Sentarum secara berkelanjutan. Komoditas yang dikelola masyarakat antara lain madu dan ikan. Kawasan ini merupakan bagian dari TN. Betung Kerihun-Danau Sentarum. Foto oleh Lidia Lilly.



DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

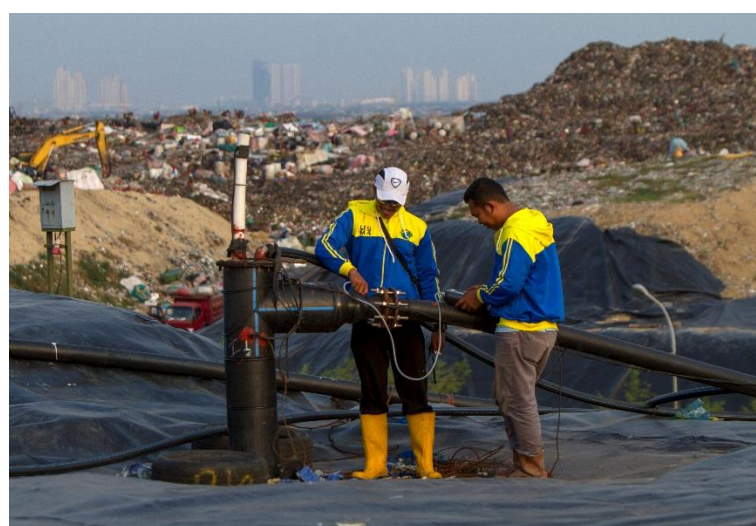


Strategi LH dan Kehutanan 2017	Kinerja 2017 LH dan Kehutanan 2017	Program LH dan Kehutanan
Kegiatan Prioritas : Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim		
Meningkatkan jumlah desa yang memiliki dan melaksanakan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	10 Desa/ Kelurahan yang mengikuti Program Kampung Iklim	PPI
	10 Desa dipantau capaian penurunan emisi GRK dan penambahan stok karbon di bidang kehutanan dan lahan gambut	PPI
	10 Desa/ Kelurahan rentan perubahan iklim yang menerima dukungan pendanaan dan/atau peningkatan kapasitas dan/atau teknologi terkait perubahan iklim	PPI
Meningkatkan upaya pemulihan lokasi yang terkontaminasi limbah B3	500 ton Lahan terkontaminasi yang dipulihkan	PSLB3
Meningkatkan upaya pemulihan di areal bekas tambang rakyat dan gambut	2.100 Ha ekosistem gambut yang terpulihkan	PPKL
Kegiatan Prioritas : Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan kemitraan dengan KPH		
Menumbuhkan sentra-sentra produksi baru hasil hutan sekitar hutan produksi	120 KPHP melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat desa setempat	PHPL
Menumbuhkan sentra-sentra produksi baru hasil hutan sekitar hutan lindung	80 KPHL melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat desa setempat	PDASHL
Meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengelola kawasan Perhutanan Sosial	200 kelompok perhutanan sosial (Hkm,HD,HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) yang meningkat kemampuannya dalam mengelola kawasan perhutanan sosial	PSKL
Mempersiapkan prakondisi pembangunan melalui pemantapan kawasan hutan	40 KPH memiliki rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	PKTL
Kegiatan Prioritas : Penyediaan kelembagaan dan pembiayaan pelaksanaan perhutanan sosial		
Membangun kelembagaan masyarakat dan meningkatkan sarana produksi dalam pengelolaan hutan di wilayah peningkatan akses masyarakat	340 unit usaha kelompok usaha perhutanan sosial (Hkm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) yang mandiri	PSKL
	190 unit alat ekonomi produktif perhutanan sosial (Hkm,HD,HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan)	PSKL

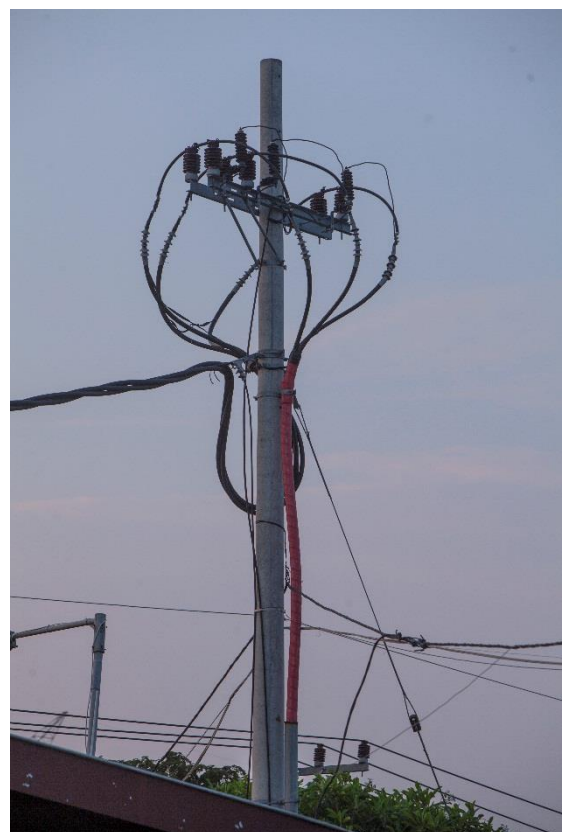
Strategi LH dan Kehutanan 2017	Kinerja 2017 LH dan Kehutanan 2017	Program LH dan Kehutanan
Kegiatan Prioritas : Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, Penetapan dan Pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)		
Meningkatkan kejelasan tata ruang kawasan hutan sehingga secara legal dan aktual kawasan hutan dapat diakui masyarakat	Proporsi kawasan hutan yang telah ditetapkan meningkat menjadi 85%	PKTL
	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH untuk perhutanan sosial	PKTL
	100 KPH baru memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, memiliki kelembagaan dan terintegrasi ke dalam rencana tata ruang wilayah	PKTL
	4 juta ha hutan produksi siap untuk dimanfaatkan dalam skema perhutanan sosial	PHPL
	Tersedianya peta DAS Nasional skala 1:50000 di 24 Provinsi(One Map Policy)	PDASHL
	Data spasial zonasi/ blok pengelolaan kawasan konservasi yang terverifikasi dan terintegrasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy)	KSDAE
Meningkatkan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat	330.000 ha hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKM, HD, HTR dan kemitraan	PSKL
Meningkatkan keberdayaan lahan gambut	400.000 ha restorasi ekosistem gambut	PPKL
Mempersiapkan prakondisi pembangunan melalui pemantapan kawasan hutan	Tersedianya dokumen berita acara tata batas kawasan hutan melalui penataan batas kawasan hutan sepanjang 4.000 km	PKTL
	100 klaster yang telah diinventarisasi sumber daya hutannya	
Kegiatan Prioritas : Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna		
Meningkatkan upaya penyelesaian konflik tenurial pada kawasan hutan dan fasilitasi HA	270.000 ha hutan yang bebas konflik tenurial	PSKL
Meningkatkan akses masyarakat tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya hutan	77 desa di daerah penyangga untuk usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi	KSDAE
	270.000 ha Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	KSDAE
Meningkatkan kapasitas aktor-aktor lingkungan	600 orang kader lingkungan hidup yang dilatih	P2SDM
	300 orang tenaga pendamping handal dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	
	480 orang generasi muda/masyarakat di bidang teknis lingkungan hidup dan kehutanan dilatih	



Berbagai aktifitas turis mancanegara dan domestik di kawasan Tangkahan, salah satu desa penyangga TN. Gunung Leuser, yang memanfaatkan sumberdaya dan menjadi sentra ekowisata di Sumatera Utara. Foto oleh Abdullah Sajad.



Pengelolaan sampah di Kota Surabaya, dari pengumpulan sampah rumah tangga, pengangkutan ke TPA, mengolahnya menjadi energi dan membaurkannya dengan energi primer. Foto oleh Dwi Prasetyo Budi Santosa.

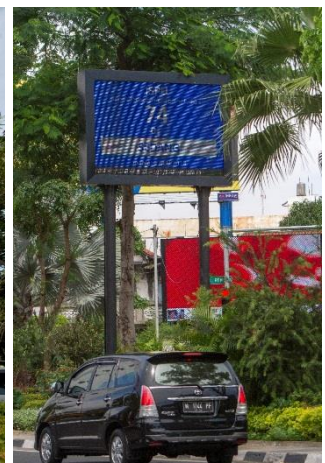


PERKOTAAN



Strategi LH dan Kehutanan 2017	Kinerja 2017 LH dan Kehutanan 2017	Program LH dan Kehutanan
Kegiatan Prioritas : Penataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang dan Kegiatan Perkotaan yang efisien dan Berkeadilan		
Meningkatkan pemanfaatan ruang perkotaan untuk hutan kota	500 Ha Hutan Kota	PDASHL
Membangun <i>urban farming</i> untuk mengurangi jumlah timbulan sampah	1.825 ton sampah berkurang melalui kegiatan terpadu dengan pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>) kapasitas 0,5 ton/hari	PSLB3
Kegiatan Prioritas : <i>Green Transportation</i>		
Memperluas penerapan green transportation untuk mengurangi pencemaran udara	2 Kota kota yang menerapkan green transportation	PPKL
Kegiatan Prioritas : <i>Green Waste</i>		
Memantau pengelolaan sampah di berbagai kota melalui Adipura	14.955.644 ton Jumlah sampah yang ditangani di 360 kota melalui pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat berkelanjutan (Adipura)	PSLB3
Kegiatan Prioritas : Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan		
Membangun sistem pemantauan kualitas udara di berbagai kota	AQMS: 4 kota, Passive Sampler: 400 kab/kota sistem pemantauan kualitas udara ambien: yang beroperasi kontinyu (AQMS), yang beroperasi mudah, sederhana	PPKL
Kegiatan Prioritas : Membangun ketahanan kota (<i>urban resilience</i>)		
Meningkatkan cakupan kota yang memiliki dan menerapkan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2 kota mengembangkan adaptasi perubahan iklim (skenario iklim, downscaling perencanaan, dan adaptasi berbasis ekosistem)	PPI
	15 Kota dipantau pencapaian penurunan emisi GRK di bidang pengelolaan limbah dan penurunan konsumsi bahan perusak ozon	PPI

Alat pantau kualitas udara (AQMS) di Surabaya menunjukkan pada kategori sedang. AQMS akan diperbanyak di 4 kota untuk tahun 2017. Foto oleh Dwi Prasetyo Budi Santosa.



KESEJAHTERAAN RAKYAT (ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN)

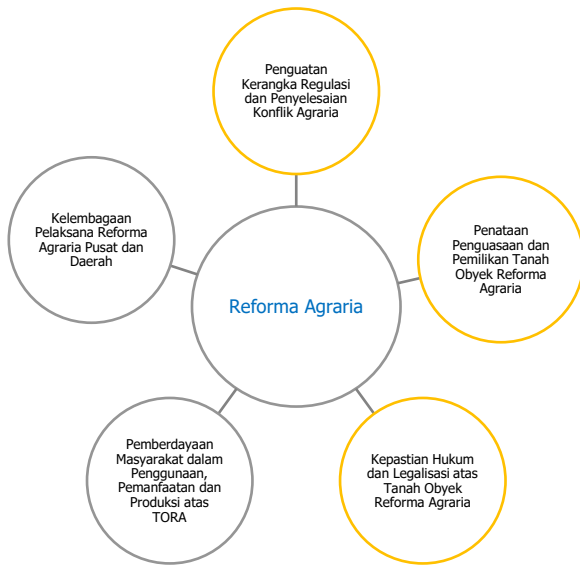


EKSPOR NON MIGAS



Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Strategi LH dan Kehutanan 2017	Kinerja 2017 LH dan Kehutanan 2017	Program LH dan Kehutanan
Kesejahteraan Rakyat (Antar Kelompok Pendapatan)	Perhatian Khusus Kepada Usaha Mikro dan Kecil	Koperasi dan Kemitraan Usaha	Meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dari pemula ke madya dan membangun unit usaha koperasi	450 unit Kelompok Tani Hutan meningkat dari pemula ke madya melalui penilaian kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha 10 Unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk	P2SDM
		Keterampilan Usaha	Meningkatkan jumlah unit pemagangan usaha kehutanan	10 unit Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	
Ekspor Non Migas	Pengembangan Fasilitas Ekspor	Optimalisasi Penerapan Single Window untuk Proses Ekspor-Import	Menurunkan jumlah hari dalam pelayanan ekspor Limbah dan Non Limbah B3	5 hari layanan dan 1 juta ton Ekspor Limbah B3 dan Limbah Non B3 dapat dikendalikan	PSLB3
	Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor	Pengembangan potensi ekspor daerah	Meningkatkan nilai ekspor hasil hutan	29,2 juta m3 produk kayu olahan berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu Rp. 5,3 Trilyun nilai ekspor TSL dan Bioprospecting	PHPL KSDAE
	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Perlindungan Kepentingan Nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil	Meningkatkan perlindungan terhadap ekspor hasil hutan kayu	Nilai Ekspor produk industri kehutanan sebesar USD USD 8,03 Miliar	PHPL

REFORMA AGRARIA



KEPASTIAN, PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI



Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Strategi LH dan Kehutanan 2017	Kinerja 2017 LH dan Kehutanan 2017	Program LH dan Kehutanan
Reforma Agraria	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria	Identifikasi Kawasan Hutan yang Akan Dilepaskan	Identifikasi dan pemetaan kawasan hutan untuk TORA	4,1 jt ha kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk tanah objek reforma agraria (TORA)	PKTL
	Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak Atas Tanah Objek Reforma Agraria	Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan	Komunikasi dan sosialisasi batas kawasan hutan hasil penataan batas	Sosialisasi batas kawasan hutan kepada publik di tingkat nasional dan provinsi	PKTL
		Legalisasi Tanah Transmigrasi	Memverifikasi kesesuaian dan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri	SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk pada lokasi permukiman transmigrasi	PKTL
	Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	Reviu Peraturan Perundangan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria	Mengkonsolidasikan peta tematik ke dalam satu peta yang dapat dijadikan dasar dalam mendukung regulasi reforma agraria	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	PKTL
Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Budaya Hukum	Meningkatkan ketaatan hukum LH dan Kehutanan	500.000 ha hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	PHLHK
				70% dari 400 perusahaan sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	PHLHK
		Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum	Meningkatkan kapasitas Polhut dan PPLH	1000 orang Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	PHLHK
				50 pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	PHLHK
		Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat	Meningkatkan upaya penegakan hukum perdata	10 gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan	PHLHK
		Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidanan Pencucian Uang	Meningkatkan upaya penegakan hukum pidana	20% Kasus Pidana LHK yang diselesaikan (P21)	PHLHK

III

Indikasi Anggaran, Evaluasi Keberhasilan dan Indikasi Lokasi

Penataan pagu indikatif didasarkan pada hasil Pertemuan Tiga Pihak (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan) tanggal 2-4 Mei 2016 dan 23 Mei 2016 dengan total anggaran Rp. 7.528,188 Milyar.

Semangat yang ingin didorong dalam penataan anggaran 2017 : (1) menjaga toleransi sistem alami untuk mendukung pembangunan; (2) mendorong produktivitas tapak lingkungan dan hutan untuk menghasilkan barang dan jasa; dan (3) membangun sentra-sentra produksi hasil hutan sebagai upaya untuk membangun dari pinggiran. Dari sinilah diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.



PT. Sarmiento Parakantja Timber, salah satu pemegang IUPHHK-HA, memfasilitasi transportasi hasil bumi seminggu 2 kali untuk masyarakat sekitar. Foto oleh Dwi Prasetyo Budi Santosa.

Program	Rp. (Milyar)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian (DMPT)	534.751,856
Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur bidang LHK	48.168,131
Pengelolaan hutan produksi lestari	604.980,421
Pengelolaan DAS dan hutan liindung	1.167.653,760
Konservasi SDA dan ekosistem	1.980.940,834
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	328.222,417
Penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	287.553,866
Peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM	309.901,486
Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan	159.972,263
Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	241.840,990
Pengendalian perubahan iklim	424.590,470
Pengelolaan sampah, limbah dan B3	129.509.981
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1.310.101,511





Seluruh pelaksanaan program LH dan Kehutanan akan dievaluasi sumbangannya bagi prioritas nasional yang diturutinya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pengukuran raihan *milestones* pembangunan LH dan Kehutanan 2017, akan digunakan indikator kinerja sasaran strategis.

Pemenuhan sasaran strategis merupakan resultante dari hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan LH dan Kehutanan 2017. Hal ini menunjukkan keterkaitan antar program yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh satu program.

Sasaran Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2017	Komponen Pembangunan
Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 65,0 – 65,5	Potret di seluruh provinsi yang mencerminkan kualitas air, udara dan tutupan hutan
Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Jumlah PNPB sebesar Rp. 5 Trilyun	Besarnya pungutan dan iuran atas produksi barang dan jasa dari sumberdaya hutan di seluruh fungsi hutan
	Nilai ekspor hasil hutan sebesar Rp. 14 trilyun	Besarnya nilai kayu, tumbuhan dan satwa liar, serta hasil hutan bukan kayu dari Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	551 kawasan konservasi mampu mempertahankan sistem alamnya secara lestari	Unit pengelolaan hutan konservasi yang mampu dilindungi dari gangguan keamanan hutan dan mempertahankan populasi spesies utama dari kawasan konservasi
	200 KPH memproduksi barang dan jasa lestari sebagai sentra produksi baru di desa-desa	Unit pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat memproduksi barang dan jasa, serta terhubung dengan desa sebagai sentra produksi desa
	5 juta ha kawasan hutan yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat menjadi sentra produksi hasil hutan	Unit pengelolaan hutan oleh masyarakat yang dikembangkan sebagai sentra produksi masyarakat/desa
	7 provinsi rawan dapat dilindungi dari bahaya kebakaran hutan dan lahan	Provinsi rawan kebakaran hutan dapat dijaga dan dilindungi bahaya kebakaran hingga pada batas zero haze

Kebakaran hutan dengan target *zero haze* akan ditarget di 7 Provinsi, yaitu : Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Provinsi lain akan ditekan seminimal mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Seluruh provinsi yang dianggap rawan akan dilindungi dari bahaya keamanan hutan. Dimulai dengan menjaga setiap jengkal kawasan hutan, mengawasi daerah industri untuk menjaga kualitas udara dan air.





IV

Penutup

Kinerja pembangunan LH dan Kehutanan Tahun 2017 memiliki banyak wajah. Terhimpun dari seluruh dimensi pembangunan dan membawa ruang gerak untuk memberi intervensi secara langsung seluruh entitas LH dan Kehutanan dan membawa keberhasilannya ke tingkat nasional. Hal ini membawa konsekuensi pada ketekunan untuk mengawal setiap konteks yang diberikan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

LH dan Kehutanan berkomitmen untuk memenuhi kinerja yang telah dirumuskan. Seluruh unsur di lingkungan LH dan Kehutanan akan didayagunakan dalam pemenuhannya, termasuk di dalamnya adalah unsur pemerintah daerah yang bertalian dengan urusan LH dan Kehutanan. Selanjutnya, dokumen ini akan digunakan sebagai panduan dalam perumusan instrumen pelaksanaannya (regulasi dan anggaran).



Menyelamatkan populasi Kakatua Jambul Jingga di TN. Laiwangi Wanggameti-Manupeu Tanadaru. Mulai dari patroli pengamanan kawasan (foto di halaman samping), mengajak pelajar masuk ke kawasan, kampanye dalam pawai pembangunan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, dan pembuatan sarang buatan di tempat-tempat yang biasa disinggahi Kakatua Jambul Jingga. Foto oleh Simon Onggo Eko Hastomo.

LAMPIRAN KINERJA PEMBANGUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN LH DAN KEHUTANAN 2017

Di dalam matrik ini, keluaran layanan perkantoran digabung dengan salah satu indikator yang melekat secara langsung.

Foto samping adalah lanskap hutan produksi saat pagi hari di areal ijin pemanfaatan PT. Sarmento Parakantja Timer, Kalteng. Foto oleh Dwi Prasetyo Budi Santosa.



No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK				534.752,00	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusat (Jakarta)
1	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK				9.021,00				
		Tercapainya penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan		40	6.500,00				
			Jumlah media massa yang bekerja sama dengan Kementerian LHK dalam rangka <i>Awareness Campaign</i> sebanyak 20 media massa	10	2.900,00				
			Jumlah publikasi proses perencanaan anggaran Kementerian LHK kepada masyarakat	12	900				
			Jumlah publikasi penggunaan anggaran Kementerian LHK	12	900				
			Jumlah pemberitaan positif bidang LHK di media massa sebanyak 3.000 pemberitaan setiap tahun	3000	900				
			Layanan PPID berdasarkan penilaian KIP (Komisi Informasi Publik) meningkat 200 poin atau 40 poin setiap tahun atau (<i>baseline</i> tahun 2013 untuk eks KLH 650)	50	900				
		Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan		30	2.521,00				
			Jumlah kampanye PPLHK melalui media cetak, elektronik, tradisional dan sosial meningkat setiap tahun	10	900				
			Jumlah wilayah yang terpapar kampanye dan publikasi PPLHK meningkat setiap tahun	5	1621				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
2	Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK				4.960,00				
		Termanfaatkannya Informasi Kualitaas Lingkungan Hidup untuk pengukuran kinerja KLHK dan pengambilan kebijakan		1	2.480,00				
			Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional setiap tahun diperbaharui dan didiseminasikan	100	1.480,00				
			Jumlah daerah yang difasilitasi pembentukan Sistem informasi LHK Daerah (SIL LHKD)	100	1.000,00				
			Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tersedia setiap tahun						
		Tercapainya peningkatan kapasitas layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK		1 sistem 280 satker	2.480,00				
			Jumlah sistem informasi KLHK yang terbangun dan beroperasi	1 sistem 280 satker	1.280,00				
			Jumlah satker yang memiliki struktur jaringan dan teknologi informasi berfungsi memenuhi standar minimal	280 satker	1200				
3	Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi				138.915,00				
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK		90 persen	91.335,00				
			Persentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95%	90 persen	91.335,00				
			Nilai SAKIP KLHK Minimal A (minimal 78 poin)	74	6.171				
			Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Pendanaan Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan	50	41.409,00				
4	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK				225.813,00				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terselenggaranya pengelolaan ketatusahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK	Jumlah manajemen aset (400)	400	225.813,00				
5	Pembiayaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan			0	38.295,00				
		Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir minimal sebesar 2 T untuk mitra pembangunan hutan pada KPH dan non KPH (HKm, HD, HR dan Hutan Tanaman) serta investasi lingkungan		Rp 0,4 T & 100,8 M	38.295,00				
			Jumlah dana yang terdistribusi kepada mitra kerja KPH dan non KPH (HKm, HD, HR, dan hutan tanaman rakyat) serta investasi lingkungan sebesar Rp. 2 T		20.000,00				
			Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Pendapatan BLU Pusat P2H		18.295,00				
6	Pembinaan dan Koordinasi kerjasama luar negeri			0	6.500,00				
		Meningkatnya kerja sama luar negeri bidang lingkungan hidup dan kehutanan			6.500,00				
			Jumlah kerja sama baru Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebanyak 30 kerja sama	6	3.250,00				
			Seluruh kerja sama Luar Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah terlaksana sesuai dengan kepentingan nasional	6	2.000,00				
			Pemanfaatan dana <i>Global Environmental Fund (GEF)</i> meningkat setiap tahun	40	1.250,00				
7	Pengendalian Ekoregion Jawa			0	12.484,00				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Jawa		90%					
			Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Jawa 95%	90	3.000,00				
			Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Jawa	2	9.484				
8	Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra			0	16.031,00				
		Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Bali Nusra		90%					
			Capaian Sasaran Strategis KLHK di ekoregion Bali dan Nusra 95 %	90	3.000,00				
			Jumlah Rencana Pengelolaan Pembangunan LHK berbasis DDDT berdasarkan 8 Isu Strategis di Ekoregion Bali dan Nusra	4	13.031				
9	Pengendalian Ekoregion Kalimantan				10.960,00				
		Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan		90%					
			Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan	90%	1.050,00				
			Jumlah Rencana Pengelolaan Pembangunan LHK berbasis DDDT berdasarkan isu strategis di Ekoregion Kalimantan	4	9.910				
10	Pengendalian Ekoregion Sulawesi Maluku				15.190,00				
		Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Sulawesi Maluku		90%					
			Persentase capaian sasaran strategis KLHK di Ekoregion Sulawesi 95%	90	13.940,00				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sulawesi selama 5 tahun	1	1.250,00				
11	Pengendalian Ekoregion Papua			0	11.318,00				
		Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Papua							
			Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua 95%	90%	2.990,00				
			Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion	4 tematik	8.328				
12	Pengendalian Ekoregion Sumatera			0	16.001,00				
		Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Sumatera							
			Capaian Sasaran Strategis KLHK di Ekoregion Sumatera 95%	90%	2.351,00				
			Jumlah Rencana Pengelolaan Pembangunan LHK Berbasis DDDT Berdasarkan 8 Isu Strategis di Ekoregion Sumatera Selama 5 Tahun	2 tematik	13.650				
13	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK			0	6.814,00				
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Kementerian LHK Secara Efektif		1 layanan	6.814,00				
			Opini WTP Untuk Laporan Keuangan	1	1.050,00				
			Jumlah PNBPN Meningkat Seesar 10% dari Penerimaan PNBPN Tahun 2013	1	4.723,00				
			Jumlah Perusahaan Yg Menyelesaikan Piutang Negara di Bidang LHK	1	1.041,00				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
14	Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian LHK			0	5.500,00				
		Meningkatnya kesesuaian penempatan pegawai dan kompetensi pegawai Kementerian LHK		100%	3.000,00				
			Jumlah pegawai untuk memenuhi kebutuhan KPH sekurang-kurangnya 4000 orang sesuai hasil analisis Kemenpan RB	760	1.500,00				
			Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya pada setiap jabatan	2500	1.000,00				
			Tersedianya regulasi seleksi dan pengangkatan pejabat	100	500				
		Tersusunnya struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, dan efisien		13 unit eselon I	2.500,00				
			Peningkatan RB di KemenLHK di 13 satker pusat menjadi >60 (dari nilai evaluasi 57,71 tahun 2014)	100	3.500				
15	Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				4.290,00				
		Tersedianya RSNI, RSNI Harmonisasi dan standar khusus	Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Nasional Indonesia harmonisasi, standar khusus (lingkup standar: sistem manajemen, produk, proses, metode uji/verifikasi, barang/jasa/teknologi ramah lingkungan)	25 SNI	3.289,00				
		Terjaminnya penerapan SNI Lingkungan Hidup dan Kehutanan		45 SNI	1.001,00				
			Jumlah penerapan SNI meningkat setiap tahun	5	350				
			Jumlah pemanfaatan barang dan jasa/teknologi ramah lingkungan meningkat	2	350				
			Jumlah jenis standar pelayanan masyarakat dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan ditetapkan	12	301				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
16	Pengembangan telaahan kebijakan, perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan				5.244,00				
		Tersedianya regulasi dengan prioritas mendorong hasil produksi dan nilai ekspor hasil hutan (kayu, HHBK, TSL), HKm, HD, HR, HTR, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), perubahan iklim dan kebijakan LHK lainnya							
			Jumlah naskah akademik dan RUU urusan lingkungan hidup dan kehutanan	1	800				
			Jumlah rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU dan revisi PP	14	900				
			Jumlah rancangan Peraturan Menteri turunan PP yang difasilitasi penelaahan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan	50	800				
			Jumlah draf RPERPRES, RKEPPRES, RINPRES, Rkepmen, RPerda urusan lingkungan hidup dan kehutanan	10	100				
		Penanganan bantuan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Terselesaikannya Perkara Perdata, TUN, Uji materi dan pendampingan perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan	80	2.644				
17	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan				3.500,00				
		Tersedianya Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kegiatan	Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis Meningkatkan	11	4.000,00				
18	Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				3.916,00				
		Terselenggaranya pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan teknis kehutanan dan lingkungan efektivitas dan efisien		168 satker	3.916,00				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah satker yang memiliki NSPK baru/hasil evaluasi	168	2.400,00				
			Jumlah satker yang memiliki sarana dan peralatan LHK terdistribusi di 280 satker dan berfungsi baik sesuai NSPK	168	1.516				
II	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan				48.168,00	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusat (Jakarta)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK				36.896,00				
		Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK			36.896,00				
			Jumlah rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti secara tuntas	800					
			Tingkat kematangan implementasi SPIP	2					
			Nilai implementasi SAKIP Itjen	74					
			Tingkat Kapabilitas APIP	2					
2	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I				2.152,00				
		Pengawasan internal yang berkualitas	Jumlah satker yang tidak ada temuan berulangannya	1	1.072				
		Mempertahankan opini WTP	Nilai Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1	245				
		Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I dengan Kategori A	74	835				
3	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II				2.070,00				
		Pengawasan internal yang berkualitas	Jumlah satker yang tidak ada temuan berulangannya	1	1.076,00				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Mempertahankan opini WTP	Nilai Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1	832				
		Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I dengan Kategori A	74	162				
4	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III				2.574,00				
		Pengawasan internal yang berkualitas	Jumlah satker yang tidak ada temuan berulangannya	1	1.327,00				
		Mempertahankan opini WTP	Nilai Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1	996				
		Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I dengan Kategori A	74	251				
5	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV				2.544,00				
		Pengawasan internal yang berkualitas	Jumlah satker yang tidak ada temuan berulangannya	1	1.328				
		Mempertahankan opini WTP	Nilai Maksimum Temuan Kerugian Negara (APBN) Hasil Pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1	1016				
		Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Eselon I dengan Kategori A	74	200				
6	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN				1.931				
		Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK)	Jumlah Rekomendasi Unit Kerja yang WBK	3	413				
		Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif	10	924				
		Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	Jumlah Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	10	594				
III	Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan				287.554,00	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi				24.276,00				
		Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Program dan Kerjasama; Evaluasi dan Diseminasi; Administrasi Umum, Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Perlengkapan; Pengelolaan Kepegawaian, Pengaturan Hukum dan Organisasi Tata Laksana pada Badan Litbang dan Inovasi LHK (Sekretariat Badan, 4 Puslitbang, 15 Satker Daerah)			24.276,00				
			Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78 (A)	86	24.276,00				
2	Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan			1	33.828,00				
		Tersedianya Sintesis Hasil-hasil Penelitian bidang Pengelolaan Hutan yang mendukung Program-program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017			2.600,00				
			Sintesis Hasil Penelitian Bidang Pengelolaan Hutan; (1) Konservasi Keanekaragaman Hayati ; (2) Konservasi Sumber Daya Air; (3) Produktivitas Hutan; (4) Sumber Pangan Alternatif; (5) Sumber Energi Alternatif (6) Obat-Obatan Alternatif Tanaman Hutan yang mendukung Program-Program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017; Persen Kemanfaatan IPTEK; Publikasi Ilmiah di Jurnal Terakreditasi	6 Paket Sintesis Hasil Penelitian; 60% kemanfaatan IPTEK; Publikasi Ilmiah	2.100,00				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah Rancangan Pengelolaan Stasiun Riset Kehati Terintegrasi di Taman Nasional	2 TN	500				
		Terlaksananya Pengembangan Iptek di bidang Pengelolaan Hutan yang mendukung Program-program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017;			31.228,00				
			Pengembangan Iptek LHK di KPH melalui Pilot Iptek: (1) Inokulan gaharu; (2) Sutera Alam; (3) Rotan Jernang; (4) Bambu; (5) Teknologi KOFFCO; (6) Agroforestry; (7) Teknologi INTROF-CC; (8) Jenis Tanaman Hutan Energi;	8 Pilot IPTEK	2.200,00				
			Jumlah Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian	4 KHDTK	29.028,00				
3	Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan			1	23.862,00				
		Tersedianya Sintesis Hasil-hasil Penelitian bidang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan yang mendukung Program-program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017			2.000,00				
			Sintesis Hasil Penelitian Bidang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan (1) Revitalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Pasca Panen untuk Energi, Pangan dan Obat-obatan alternatif dari Hutan; (2) Pengolahan Hasil Hutan; (3) Pemanenan Hutan; yang mendukung program-program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017; Persen Kemanfaatan IPTEK; serta Publikasi Ilmiah di Jurnal Terakreditasi	3 paket Sintesis Hasil Penelitian; 60 % kemanfaatan IPTEK; 4 Publikasi Ilmiah	2.000,00				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terlaksananya Pengembangan Iptek di bidang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan yang mendukung Program-program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017;			21.862,00				
			Pengembangan Iptek LHK di KPH melalui Pilot Iptek: (1) Wood Pellet; (2) Biodiesel Nyamplung; (3) Teknologi Pengolahan Aren; (4) Arang Terpadu	4 IPTEK	21.862,00				
4	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan				19.515,00				
		Tersedianya Sintesis Hasil-hasil Penelitian bidang Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan yang mendukung Program-program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017;			1.800,00				
			Sintesis Hasil Penelitian Bidang Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan: (1) Kualitas Lingkungan untuk Indeks Kualitas Lingkungan dan Indonesia Standard Testing Method; (2) Kualitas Lingkungan untuk Indeks Pembangunan Berkelanjutan; (3) Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan yang mendukung Program-Program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017 ; Persen Kemanfaatan; Publikasi Ilmiah di Jurnal terakreditasi	3 Paket Sintesis Hasil Penelitian;6 0% Kemanfaatan IPTEK;2 Publikasi Ilmiah	1.800,00				
		Terlaksananya Pengembangan Iptek di bidang Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan yang mendukung Program-program LHK sesuai			17.715,00				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Prioritas Nasional Tahun 2017							
			Pengembangan Iptek LHK di KPH atau melalui Pilot Iptek: (1) Kualitas Lingkungan [Air, Tanah, Udara kebisingan]; (2) Teknologi Pengelolaan Sampah	2 Pilot IPTEK	800,00				
			Pengembangan Uji Kualitas Lingkungan melalui Laboratorium Rujukan Nasional	1 Paket	1.500,00				
5	Penelitian dan Pengembangan Sosekjak dan Perubahan Iklim			1	16.277,00				
		Tersedianya Sintesis Hasil-hasil Penelitian bidang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim serta Policy Brief bidang LHK yang mendukung Program-program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017		0	1.500,00				
			Sintesis Hasil Penelitian Bidang Sosekjak dan PI: (1) Sosek, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Resolusi Konflik; (2) Keekonomian dan Daya Saing Industri serta Kebijakan Tata Kelola LHK; (3) Politik dan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Policy Brief Bidang LHK minimal dari 15 RPPI untuk mendukung Program-Program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017; Persen Kemanfaatan IPTEK; serta Publikasi Ilmiah di Jurnal Terakreditasi	3 Paket Sintesis Hasil Penelitian; 15 Policy Brief; ,60% Kemanfaatan IPTEK; 5 Publikasi Ilmiah	1.500,00				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terlaksananya Pengembangan Iptek di bidang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim yang mendukung Program-program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017			14.777,00				
			Pengembangan Iptek LHK di KPH melalui Pilot Iptek:(1) Perhutanan Sosial untuk Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan di KHDTK atau KPH (2) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; (3) Desa Berkemakmuran Hijau; (4) Bank Sampah Berbasis Wisatawan	4 Pilot IPTEK	14.777				
6	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker)				169.796,00				
		Tersedianya Bahan Sintesis Hasil Penelitian Tematik Daerah yang mendukung Program-program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017			11.500,00				
			Jumlah Bahan Sintesis Hasil Penelitian LHK terintegrasi di seluruh Satker, Balai Besar dan Balai Lingkup BLI sebanyak 15 (paket) yang mendukung Program-program LHK sesuai prioritas Nasional Tahun 2017; Persen Kemanfaatan IPTEK; serta Publikasi Ilmiah di Jurnal Terakreditasi	15 Paket Bahan Sintesis; ;60% Kemanfaatan IPTEK ; 34 Publikasi Ilmiah	11.500,00				
		Terlaksananya Pengembangan IPTEK LHK oleh Satker BLI di Daerah yang mendukung Program-program LHK sesuai Prioritas Nasional Tahun 2017			158.296,00				
			Jumlah Pilot Pengembangan IPTEK Satker BLI di Daerah (Sutera: Limbah Sabut Kelapa; Kebun Benih Unggul Ebony; Anoa Breeding	21 Pilot IPTEK	18.500,00				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Center; Pengelolaan Sampah untuk Urban Farming; Mikrohidro; Sumber Daya Air Mandiri Berbasis Desa; Species Kunci Budaya: Pengelolaan Rawa Gambut Beresiko Kecil Kebakaran; Budidaya Gemor Gaharu Nyawai; Sumber Benih Pinus; Penangkaran Rusa dan Trenggiling; Budidaya Madu; Pengembangan Massoi; Kayu Energi; Pengembangan Kayu Putih; Restorasi Hutan Rawa Gambut; Perhutanan Sosial untuk Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan di KHDTK atau KPH; Kultur Jaringan untuk Hutan Rakyat; Sanctuary Orang Utan; Ekowisata Bekantan)						
			Jumlah Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian	30 KHDTK	139.976	139.796			
IV	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan				604.980,0				
1	Peningkatan Usaha Hutan Produksi				7.532,0	7.532,00			
		Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman			3.253,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
			Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 5,8 juta m3	5,8 juta m3	1.613	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	Jakarta
			Jumlah produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 33 juta m3	33 juta m3	1.640	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	Jakarta
		Meningkatnya pemanfaatan hutan produksi untuk mendukung pembangunan energi baru dan energi terbarukan			1.060,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pembangunan Bioenergi	
			Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi (jenis tanaman Eucalyptus pellita, Sengon, Gamal, Lamtoro,	20 ribu Ha setara dengan 20MW	1.060,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pembangunan Bioenergi	Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Nyemplung, Bintangur, Akasia, Rumpun Gajah, Kaliandra, Kemiri)						
		Seluruh UPHHK-HA dan HT aktif beroperasi pada tahun 2019			2.869				
			Jumlah Unit IUPHHK HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 220 unit hingga Tahun 2019	199 Unit	1.769	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
			Jumlah unit UPHHK-HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi "Layak Dilanjutkan(LD)" bertambah sebanyak 17 unit hingga Tahun 2017	17 Unit	1.100	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman			350,00				
			Luas Hutan di Kalimantan yang dibangun Silvikultur Intensif seluas 2.000 Ha	2.000 Ha	350,00	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
2	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				5.548,0	5.548,00			
		Terbangunnya unit usaha jasa lingkungan/ pemanfaatan air/ jasa wisata di hutan produksi			2.100,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	
			Jumlah unit usaha jasa lingkungan/ pemanfaatan air/ jasa wisata di hutan produksi	3 unit	2.100,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	KPHP Gunung Duren, KPHP Batu Lanteh, KPHP Manggarai Barat
		Meningkatnya produksi komoditas HHBK dari hutan produksi (rotan, Sagu, damar, Getah Pinus, Kayu Putih, Bambu, Getah Karet, Aren, gaharu)			2.290,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
			Jumlah produksi komoditas HHBK meningkat sebesar 20%	252.000 ton	2.290,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	KPH Ende, KPHP Gularaya, KPHP Lakompa, KPHP Kendilo, KPHP Batulanteh, KPHP Sejongong, KPHP Limau Sarolangun, KPHP Jogjakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi usaha jasa lingkungan			1.158,00				
			Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem meningkat di Tahun 2017 seluas 100.000 Ha	100000 Ha	1.158,00	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
3	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi				6.736,0				
		Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi			6.736,0	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, Penetapan dan Pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	
			luas hutan produksi yang siap untuk dimanfaatkan dalam skema perhutanan sosial	4 juta ha	2.500,0	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, Penetapan dan Pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	Jakarta
			Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 209 KPHP	209 KPHP	1.300,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
			Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 5 KPHP	3 KPHP	2.140,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
			Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi sebanyak 6 unit	6 unit	796,3	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
4	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan				7.515,0				
		Meningkatnya Investasi dan ekspor produk industri kehutanan			3.480,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
			Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 Juta M3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu	29,2 juta m3	1.040,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah Forest Based Cluster industry yang terbentuk sebanyak 4 unit	4 unit	2.440,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	KPHP Lingga, KPHP Mandailing Natal, KPHP Gularaya, KPHP Kapuas Hulu
		Meningkatnya Investasi dan ekspor produk industri kehutanan			1.535	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor	Pengembangan potensi ekspor daerah	
			Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 Juta M3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu	29,2 juta m3	0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor	Pengembangan potensi ekspor daerah	-
			Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp. 540 M tahun 2017	540 M	1.235	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
			Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku online sebesar 50% dari jumlah tahun 2014 sebesar 784 Unit	1.018 Unit	300	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya kesesuaian produk industri kehutanan dengan permintaan pasar melalui penerapan SVLK			2.500,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Perlindungan Kepentingan Nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil	
			Nilai Ekspor produk industri kehutanan sebesar USD 40,37 Miliar sampai tahun 2019	USD 8,03 Miliar	2.500,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Perlindungan Kepentingan Nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil	Jakarta
5	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan				522.948,0				
		KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran			52.000,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	
			Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	52 KPHP	52.000,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	52 KPHP

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Meningkatnya kerjasama KPHP dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi			254.100,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan kemitraan dengan KPH	
			Jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat desa setempat	120 unit KPHP	254.100,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan kemitraan dengan KPH	KPHP Mandailing Natal (ada RPHJP), KPHP Tasik Besar Serkap (ada RPHJP), KPHP Minas Tahura (ada RPHJP), KPHP Kampar Kiri, KPHP Tebing Tinggi, KPHP Dharmasraya, KPHP Pesisir Selatan, KPHP Bukit Lubuk Pekan Hulu Landai, KPHP Unit VII Hulu, KPHP Unit VIII Hilir, KPHP Kerinci, KPHP Tebo Barat, KPHP Tebo Timur, KPHP Sungai Sembulan, KPHP Rambat Menduyung, KPHP Gunung Duren, KPHP Sigambir Kotawaringin, KPHP Unit II Lalan Mangsang Mendis, KPHP Meranti, KPHP Lakitan Unit VI, KPHP Rawas, KPHP Unit XIV Benakat, KPHP Suban Jeriji, KPHP Lalan Sembilang Banyuasin, KPHP Bubus Panca, KPHP Bambang Antan, KPHP Muko Muko, KPHP Bengkulu Utara, KPHP Register 47 Way Terusan, KPHP Gedong Wani, KPHP Muara Dua, KPHP Bukit Punggur, KPHP Sungai Buaya, KPHP Sejong, KPHP Yogyakarta, KPHP Maria Donggomasa, KPHP Batulante, KPHP Tambora Utara, KPHP Rote Ndao, KPHP Manggarai Barat, KPHP Sungai Merakai, KPHP Kendawangan, KPHP Kapuas Hulu, KPHP Barito Timur, KPHP Barito Utara, KPHP Kota Palangkaraya, KPHP Kotawaringin Timur, KPHP Pulang Pisau, KPHP Seruyan, KPHP Kota Waringin Barat, KPHP Murung Raya, KPHP Gunung Mas, KPHP Lamandau, KPHP Tanah Laut, KPHP Cantung, KPHP Banjar, KPHP Tanah Bumbu, KPHP Tabalong, KPHP Pulau Laut, KPHP Malinau, KPHP Berau Barat, KPHP Meratus, KPHP Kendilo, KPHP Telake, KPHP Bongan, KPHP Delta Mahakam, KPHP DAS Belayan, KPHP Santan, KPHP Jeneberang, KPHP Awota, KPHP Kep. Selayar, KPHP Karama, KPHP Unit IV Karosa, KPHP Mamasa Barat, KPHP Budong Budong, KPHP Unit III

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Lakompa, KPHP Unit XXIV Gularaya, KPHP Mekongga Selatan, KPHP Ladongi, KPHP Bina Mahawana Sejuk, KPHP Tina Orima, KPHP Dampelas Tinombo, KPHP Dolago Tanggunung, KPHP Toili Batu Rube, KPHP Sivia Patuju, KPHP Sintuwu Maroso, KPHP Pogogul, KPHP Balantak, KPHP Banawa Lalundu, KPHP Boalemo, KPHP Bone Bolango, KPHP Gorontalo, KPHP Gorontalo Utara, KPHP Poigar, KPHP Wae Sapa Lewa, KPHP Wae Apu, KPHP Wae Tina, KPHP Wae Bubi, KPHP Gunung Sinopa, KPHP Bacan, KPHP Sorong, KPHP Sorong Selatan, KPHP Tambraw, KPHP Bakau Bintuni, KPHP Fak Fak, KPHP Yapen, KPHP Keerom, KPHP Waropen, KPHP Nduga Nihil, KPHP Memberamo
		Menurunnya gangguan dan konflik kawasan Hutan di KPHP			110.000,0	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	
			Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan	120 KPHP	110.000,0	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	120 KPHP
		Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan			106.848,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
			Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi	0					
			Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi hutan produksi sebanyak 16 wilayah	16 wilayah	3.300				
			Jumlah wilayah yang produksi dan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan meningkat di 16 wilayah	16 wilayah	5.600				
			Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan di 16 wilayah	16 wilayah	6.400				
			Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi industri primer hasil hutan di 16 wilayah	16 wilayah	91.548				
6	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan				6.415,0				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Optimalnya Ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan			6.415,0				
			Jumlah PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp. 2.796 Triliun tahun 2017	Rp. 2.796 T	2.915,0				
			Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 155 unit	155 unit	3.500,0				
7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Produksi Lestari				48.286,00	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78 (A)	74 poin	48.286,00				
V	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung				1.167.653,80				
1	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat				1.063.311,8				
		Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 Danau Prioritas				Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	
			Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 Danau Prioritas	1000 Ha	15.000,0	Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	Danau Maninjau, Singkarak, Rawa Pening, Tondano, Batur, Kerinci, Limboto, Matano, Poso, Sentani, Tempe, Mahakam, Rawa Danau, Sentarum, Toba

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di sempadan sungai di 15 DAS Prioritas				Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	
			Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan di sempadan sungai di 15 DAS Prioritas	1000 Ha	15.000,0	Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	DAS Asahan Toba, Bengawan Solo, Brantas, Ciliwung, Cisadane, Citarum, Jeneberang, Kapuas, Limboto, Moyo, Musi, Saddang, Sekampung, Serayu, Siak
		Meningkatnya resapan air di perumahan/permukiman di 15 DAS Prioritas				Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan)	
			Jumlah sumur resapan air yang terbangun di 15 DAS Prioritas	7.500 unit Sumur resapan air	45.000,0	Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan)	DAS Asahan, Sekampung, Musi, Siak, Limboto, Serayu, Bengawan Solo, Moyo, Brantas, Kapuas, Ciliwung, Cisadane, Citarum, Jeneberang, Saddang
		Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah pada 15 DAS prioritas				Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan)	
			Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah pada 15 DAS Prioritas	1000 Ha	18.500,0	Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan)	DAS Asahan, Solo, Brantas, Ciliwung, Cisadane, Citarum, Jeneberang, Kapuas, Limboto, Moyo, Musi, Saddang, Way Sekampung, Serayu, Siak
		Rehabilitasi hutan dan lahan pada 15 DAS prioritas dan di dalam KPH				Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit	
			Jumlah DAM Pengendali, DAM Penahan, Gullyplug	25 Dam Pengendali, 4.000 Dam Penahan, 8.000 Gullyplug	294.800,0	Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit	Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, NTT, Jawa Barat, Banten, Kep. Riau, Sulawesi Selatan, Aceh, Bali, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Kalimantan Selatan
		Rehabilitasi hutan dan lahan pada 15 DAS prioritas dan di dalam KPH				Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Luasan areal rehabilitasi di hulu DAS Prioritas dan KPH	15000 Ha	436.526	Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit	Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku utara, Papua, Papua Barat
		KPHL yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran				Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	
			Jumlah KPHL yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	17 KPHL	8.500,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	KPHL Kuantan Singingi, KPHL Sungai Beram Hitam Unit XVII, KPHL Banyuasin Unit I, KPHL Dempo Unit XII, KPHL Ogan Ulu Unit XIII, KPHL Bukit Nanti Unit XV, KPHL Parakan Gistang Unit XVI, KPHL Gerbang Barito, KPHL Kapuas, KPHL Hulu Sungai Selatan, KPHL Hulu Sungai Tengah, KPHL Biak Numfor, KPHL Nabire, KPHL Unit VI Mimika, KPHL Intan Jaya, KPHL Jayawijaya, KPHL Pegunungan Bintang
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana pariwisata alam di hutan lindung pada KPHL				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	
			Jumlah sarana prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge dll) dan desain tapak pengelolaan pariwisata alam	6 KPHL	4.500,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	KPHL Unit XII Tobasa, Alor Pantar, Manggarai, Lembata, Rinjani Timur, Tastura
		Rehabilitasi kawasan hutan mangrove				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Luas areal rehabilitasi hutan mangrove pada kawasan hutan	500 Ha	10.000,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut	Sumut, Riau, Sumsel, Bangka Belitung, Lampung, Kalbar, Kaltim, Sulbar, Sultra, Maluku, Malut
		Meningkatnya kapasitas pengelolaan hutan lindung berbasis masyarakat desa setempat				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan kemitraan dengan KPH	
			Jumlah KPHL yang melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat desa setempat	80 unit KPHL	52.036,6	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan kemitraan dengan KPH	KPHL Model: Aceh (Unit III), Unit XXII Sumut, Toba Samosir (Unit XIV), Bukit Barisan Selatan, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Solok, Karimun, Sungai Beram Hitam, Banyuasin (Unit I), Bukit Balai Rejang (Unit VII), Batu Tegi, Kota Agung Utara, Rajabasa, Pesawaran, Bali Barat, Bali Tengah, Bali Timur, Rinjani Barat, Rinjani Timur, Ampang, Tastura, Alor Pantar (Unit X), Mutis Timau (Unit XIX), Flores Timur, Tarakan, Hulu Sungai Selatan, Kapuas, Gerbang Barito, Larona Malili, Mamasa Tengah, Ganda Dewata, Malunda, Mapili, Lariang, Pohuwato (Unit III), Peropa'ea Gantara, Konawe (Unit XXII), Remu, Biak Numfor KPHL Non Model: Aceh (Unit V, Unit VI), Sumut (Unit XVI, Unit XVIII, Unit XXIII, Unit XXIV, Unit XXV, Unit XXVI), Riau (Unit XXXI Kuantan Sengingi), Sumsel (Unit XII Dempo, Unit XIII Ogan Hulu, Unit XV Bukit Nanti, Unit XVI Peraduan Gistang), Babel (Unit X Belitung), Bengkulu (Unit III, Unit IV Seluma, Unit V Bengkulu Selatan, Unit VI Kaur), Lampung (Unit II Liwa, Unit VII, Unit XV Gunung Balak, Unit VIII Tangkit Tebak), NTB (Unit XVI Toffo Pajo), NTT (Unit II Manggarai, Unit III Manggarai Timur, Unit IV Ngada, Unit VII Sikka, Unit IX Lembata, Unit XI Sumba Barat Daya, Unit XXII Belu), Kaltim (Unit XXX Sungai Wain Manggar), Kalsel (Unit IX Hulu Sungai Tengah), Sulut (Unit VI), Maluku (Unit XIV Ambon dan Unit XVI Maluku Tenggara), Papua Barat (Unit I Raja

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Ampat), Papua (Unit II Nabire, Unit VI Mimika, Unit X Intan Jaya, Unit XLII Jayawijaya)
		Menurunnya gangguan dan konflik kawasan hutan di KPHL				Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	
			Jumlah KPHL yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan	60 KPHL	30.000,0	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	KPHL Model: Aceh (Unit III), Sumut (Unit XXII dan Toba Samosir Unit XIV), Sumbbar (Bukit Barisan Selatan, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Solok), Kepri (Karimun), Jambi (Sungai Beram Hitam), Sumsel (Banyuasin Unit I), Bengkulu (Bukit Balai Rejang Unit VII), Lampung (Batu Tegi, Kota Agung Utara, Rajabasa, Pesawaran), Bali (Bali Barat, Bali Tengah, Bali Timur), NTB (Rinjani Barat, Rinjani Timur, Ampang, Tastura), NTT (Alor Pantar Unit X), Mutis Timau Unit XIX), Kaltara (Tarakan), Kalsel (Hulu Sungai Selatan), Kalteng (Kapuas), Sulsel (Larona Malili), Sulbar (Mamasa Tengah, Ganda Dewata, Malunda, Mapili, Lariang), Gorontalo (Pohuwato Unit III), Sultra (Peropa'ea Gantara, Konawe Unit XXII), Papua Barat (Remu), Papua (Biak Numfor) KPHL Non Model: Aceh (Unit V dan Unit VI), Riau (Unit XXXI Kuantan Sengingi, Sumsel (Unit XII Dempo, Unit XIII Ogan Hulu, Unit XV Bukit Nanti, Unit XVI Peraduan Gistang), Bengkulu (Unit IV Seluma), Lampung (Unit II Liwa, Unit VII, Unit XV Gunung Balak), NTB (Unit XVI Toffo Pajo), NTT (Unit II Manggarai, Unit IV Ngada, Unit IX Lembata), Kaltim (Unit XXX Sungai Wain Manggar), Kalsel (Unit IX Hulu Sungai Tengah), Sulut(Unit VI), Papua Barat (Unit I Raja Ampat), Papua (Unit II Nabire, Unit VI Mimika, Unit XLII Jayawijaya)
		Menambah luas hutan kota secara proporsional				Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Luas Hutan Kota dan pemeliharannya	500 Ha	20.000,0	Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan	Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jabar, Jateng, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, NTB, NTT, Gorontalo, Sulut, Sulsel, Sutra, Jatim, Babel
		Tersedianya bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat				Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
			Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat sebanyak 20 jt m3	20 juta m3	20.000,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat
		Meningkatnya luas dan produksi 4 komoditas HHBK dari areal KPHL (rotan, buah, getah, kayu putih)				Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
			Luas dan produksi HHBK	1000 Ha	15.000,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	KPHL Aceh Unit III, Solok, Sijunjung, Bukit Barisan, Banyuasin, Batutegi, Kota Agung Utara, Pesawaran, Rinjani Barat, Rinjani Timur, Ampang, Tastura, Tarakan, Hulu Sungai SELATAN, Ganda Dewata, Malunda, Larona Malili, Peropa'ea Gantara, Biak Numfor
		Tersusunnya peta DAS Nasional skala 1:50000 di 24 Provinsi (One Map Policy)				Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	
			Tersedianya peta DAS Nasional skala 1:50000 di 24 Provinsi(One Map Policy)	24 Provinsi	3.000,0	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulsel, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat
		Penyusunan Rencana Konservasi Tanah dan Air (KTA)							

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Tersusunnya Rencana Konservasi Tanah dan Air (mandat UU KTA No. 37 Tahun 2014)	34 Provinsi	2.550,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku utara, Papua, Papua Barat
		Penyusunan data Qmax/Qmin, sedimentasi dan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas							
			Tersedianya data fluktuasi Qmax/Qmin, sedimentasi dan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas	15 DAS Prioritas	3.750,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Das Asahan Toba, Bengawan Solo, Brantas, Ciliwung, Cisadane, Citarum , Jeneberang, Kapuas, Limboto, Moyo, Musi, Saddang, Way Sekampung, Serayu, Siak
		Pemantauan kualitas air danau							
			Tersedianya data kualitas air di danau di 15 danau prioritas	15 DAS Prioritas	1.500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Menyediakan bibit	Tersedianya bibit berkualitas	33.750.000 batang	67.650,0	Non Prioritas/ Kedaulatan Pangan	Non Prioritas/ Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Non Prioritas/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit	Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
2	Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan				22.900				
		Menyediakan benih berkualitas untuk pembangunan hutan rakyat				Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
			Jumlah dan jenis sumber benih berkualitas	80 ha Kebun Benih Semai/Kebun Benih Klon/Areal Sumberdaya Genetik dan 10.500 ha sumber benih lainnya	5.050,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	"Wilayah Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) I : Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Wilayah Kerja BPTH II: Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku utara, Papua, Papua Barat"
		Menyediakan bibit berkualitas				Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit	
			Tersedianya bibit berkualitas	3.750.000 batang	17.850,0	Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit	"Wilayah Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) I : Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Wilayah Kerja BPTH II: Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku utara, Papua, Papua Barat" BPDASHL Sampara, BPTH Wilayah I Sumsel, BPDASHL Waehapu Batu Merah, BPDASHL Mamberamo

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
3	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air				5.500,0				
		Pulihnya Kesehatan DAS Kritis (Renstra)							
		Rehabilitasi hutan dan lahan pada 15 DAS prioritas dan di dalam KPH							
			Tercapainya luasan areal rehabilitasi di hulu DAS prioritas dan KPH	15.000 Ha	900,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
			Jumlah DAM Pengendali (Dpi), Dam Penahan (DPn) dan Gully Plug (GP)	25 Dpi, 4000 DPn, 8000 GP	675,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Menambah luas hutan kota secara proporsional							
			Tercapainya luas hutan kota dan pemeliharaannya	500	675,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Tersedianya bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat							
			Tercapainya jumlah produksi dari hutan rakyat	20.000	900,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Meningkatnya resapan air di perumahan/permukiman di 15 DAS Prioritas							
			Tercapainya jumlah sumur resapan air yang terbangun di 15 DAS Prioritas	7.500	675,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Rehabilitasi kawasan hutan mangrove							
			Tercapainya luas areal rehabilitasi hutan mangrove pada kawasan hutan	500	1.675,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
4	Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung				4.870,0				
		Meningkatkatnya sarana dan prasarana pariwisata alam di hutan lindung pada KPHL							
			Tercapainya jumlah sarana dan prasarana alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy, bridge, dll) dan desain tapak pengelolaan pariwisata alam pada 6 KPHL		774,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Meningkatnya luas dan produksi 4 komoditas HHBK dari areal KPHL (rotan, buah, getah, kayu putih)							
			Tercapainya luas dan produksi HHBK		774,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		KPHL yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran							
			Jumlah KPHL yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran		696,6	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Meningkatnya kapasitas pengelolaan hutan lindung berbasis masyarakat desa setempat							
			Terkendalnya jumlah KPHL yang melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat desa setempat pada 80 KPHL		928,8	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Menurunnya gangguan dan konflik kawasan hutan di KPHL							
			Terkendalnya jumlah KPHL yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan pada 60 KPHL		1.696,6	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
5	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS				4.871,0				
		Tersusunnya Peta DAS Skala 1:50.000							
			Tercapainya peta DAS Nasional skala 1: 50.000	24 Provinsi	1.161,3	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Penyusunan Rencana KTA Tingkat Nasional							
			Tersusunnya Rencana Konservasi Tanah dan Air Tingkat Nasional	34 Provinsi	1.161,3	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Penyusunan Data Qmax/Qmin, sedimentasi dan tutupan lahan di 15 DAS prioritas							
			Tercapainya kegiatan pengukuran Qmax/Qmin, sedimentasi dan perubahan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas	15 DAS	2.548,4	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
6	Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan				4.928,0				
		Menyediakan benih berkualitas untuk pembangunan hutan rakyat			1.964,0				
			Jumlah sumber benih berkualitas	10.500		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
			Jumlah sumber benih berkualitas berupa KBS/KBK/ASDG	80		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Menyediakan bibit berkualitas			2.964,0				
			Tercapainya ketersediaan bibit berkualitas	37.500.000					
7	Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat				4.773,0				
		Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 danau prioritas							
			Tercapainya luas areal rehabilitasi hutan dan lahan di sempadan sungai di 15 DAS Prioritas	1000 ha	1.207,4	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di sempadan sungai di 15 DAS prioritas			905,5				
			Tercapainya luas areal rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 Danau Prioritas	1000 Ha	905,5	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Meninmgkatnya tutupan hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah pada 15 DAS prioritas			905,5				
			Tercapainya luas areal rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah di 15 DAS Prioritas	1000 Ha	905,5	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Pemantauan Kualitas Air Danau							
			Tersedianya data kualitas air danau prioritas	15 danau	1.754,6				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
8	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASHL				56.500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDAS HL	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDASHL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : "SAKIP" dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019		56.500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
VI	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem				1.980.941,0				
1	Konservasi Spesies dan Genetik				13.500,0				
		Meningkatnya TSL dan Bioprospecting				Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor	Pengembangan potensi ekspor daerah	
			Nilai ekspor TSL dan Bioprospecting	5,3 Trilyun	1.500,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor	Pengembangan potensi ekspor daerah	Pusat (Jakarta)
		Mewujudkan keamanan hayati, keamanan pangan, dan/atau pakan PRG bagi kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip kesehatan serta pengelolaan sumberdaya hayati dan perlindungan konsumen dari perdagangan internasional yang tidak adil				Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Perlindungan Kepentingan Nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil	
			Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 Produk Rekayasa Genetika (PRG)	1.200,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Perlindungan Kepentingan Nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil	Pusat (Jakarta)
		Mengimplementasikan ketentuan dalam Protokol Nagoya dalam rangka memfasilitasi akses dan menjamin pembagian keuntungan yang adil dan seimbang.				Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Perlindungan Kepentingan Nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	4 Prior Informed Consent (PIC)	1.600,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Perlindungan Kepentingan Nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil	Pusat (Jakarta)
		Peningkatan kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati				Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional	
			Jumlah kertas posisi Indonesia di Perundingan Perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati	4 Kerpos	800,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional (Market Access)	Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional	Pusat (Jakarta)
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	
			Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	1.700,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	Pusat (Jakarta)
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati pada lembaga konservasi							
			Jumlah penambahan jenis satwa liar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 spesies	700,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik							
			Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 unit	10 unit	1.600,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya PNBPN dari hasil pemanfaatan TSL							

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Besara PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp. 50 M	Rp. 10 M	500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya data dan informasi sebarab keanekaragaman spesies dan genetik							
			Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 wilayah biogeografi	1.700,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya sistem basis data balai kliring nasional							
			Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik ditingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 unit	600,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tercapai dan beroperasinya Suaka Satwa (Sanctuary) species terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata							
			Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spcies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	6 unit	1.600,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi				9.500,0				
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di Pesisir dan Laut				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	
			Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di pesisir dan laut	30 dokumen RP	1.300,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	Pusat (Jakarta)
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	30 unit	1.700,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	TWA Laut Pulau Moyo (NTB), SM Laut Pulau Rambut (Jakarta), TWA Laut Pulau Weh (Aceh), CA Krakatau (Lampung), TWA Teluk Yotefa (Papua), TWA Laut Tokobae (Sulteng), TWA Laut Pulau Kombo (Maluku), TWA Laut Pulau Marselu (Maluku), TWA Laut Pulau Kasa (Maluku), TWA Laut Satonda (NTB)
		Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi							
			Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	20.000ha	1.600,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	
			Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 desa	1.000,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	Pusat (Jakarta)
		Meningkatnya akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan TN				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	20.000 ha	1.200,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	Pusat (Jakarta)
		Beroperasinya KPHK pada kawasan konservasi				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	
			Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 unit	1.100,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	Pusat (Jakarta)
		Menurunnya gangguan pada kawasan konservasi				Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 provinsi	1.600,0	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Pusat (Jakarta)
3	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam				10.000,0				
		Terintegrasinya zonasi/ blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	
			Jumlah data spasial zonasi/ blok pengelolaan kawasan konservasi yang terverifikasi dan terintegrasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat	551 Kawasan Konservasi di 34 Provinsi	1.900,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	Aceh: CA Pinus Jantho, CA Serbojadi; Sumut: CA Batu Gajah, CA Batu Ginurit, CA Dolok Tinggi Raja, CA Dolok Saut, CA Dolok Sipirok, CA Doal Sibual-buali, CA Liang Balik, CA Martelu Purba, CA Sibolangit; Sumbang: CA Batang Palupuh, CA Batang Pangean II, CA Beringin Sati, CA Lembah Anai, CA Lembah Harau, CA Rimbo Panti; Riau: CA Bukit Bungkok, CA Pulau Berkeh; Jambi: CA Buluh Hitam/Pasir Mayang Danau Bangko,

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									CA Cempaka/Tabir Kesajung, CA Durian Luncuk I, CA Durian Luncuk II, CA Gua Ulu Tiangko, CA Ht. Bakau Pantai Timur, CA Sungai Batar; Bengkulu: CA Pagar Gunung I, CA Pagar Gunung V, CA Pagar Gunung II, CA Pagar Gunung III, CA Pagar Gunung IV, CA Taba Penanjung I, CA Taba Penanjung II, CA Talang Ulu I, CA Talang Ulu II, CA Air Alas Reg. 103, CA Air Seblat Reg.89, CA Danau Dusun Besar Reg. 61, CA Danau Menghijau Reg. 56, CA Kioyo, CA Pasar Ngalam Reg.92, CA Pasar Seluma Reg.93, CA Pasar Talo Reg.94, CA S Bahewo Teluk Klowe, CA Tanjung Laksaha Reg.98; Lampung: CA Pulau Krakatau; Banten: CA Gunung Tukung Gede, CA Pulau Dua, CA Rawa Danau; DKI Jakarta: CA Pulau Bokor; Jawa Barat: CA Bojonglarang Jayanti, CA Cadas Malang, CA Cibanteng, CA Cigenteng Cipanyi, CA Dungus Iwul, CA Gunung Burangrang, CA Gunung Jagat, CA Gunung Papandayan, CA Gunung Simpang, CA Gunung Tangkuban Perahu, CA Gunung Tilu, CA Junghunh, CA Kawah Kamojang, CA Leuweung Sancang, CA Malabar, CA Nusa Gede Panjalu, CA Pananjung Pangandaran, CA Sukawayana, CA Takokak, CA Tangkuban Prah Pelabuhan Ratu, CA Talaga Bodas, CA Telaga Patengan, CA Telaga Warna, CA Yanlapa; Jawa Tengah: CA Bantarbolang, CA Bekutuk, CA Cabak, CA Curug Bengkawah, CA Donoloyo, CA Gebugan, CA Gunung Butak, CA Gunung Celering, CA Karang Bolong, CA Kecubung Ulolanang, CA Keling I, CA Keling II/III, CA Kembang, CA Moga, CA Nusakambangan Barat, CA Nusakambangan Timur, CA Pager Wunung Darupono, CA Pantodomas, CA Peson Subah I, CA Peson Subah II, CA Pringombo I, CA Pringombo II, CA Sepakung, CA Jatinegara, CA Telogo Dringo, CA Telogo Ranjeng, CA Telogo Sumurup, CA Wijaya Kusuma; DI Yogyakarta: CA Gunung Batu Gamping, CA Mangunan/Imogiri; Jawa Timur: CA Besowo Gadungan, CA Ceding, CA

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									<p>Curah Manis Sempolan (I-VIII), CA Gowa Nglirip, CA Gunung Abang, CA Gunung Picis, CA Gunung Sigogor, CA Janggangan Rogojampi I, CA Janggangan Rogojampi II, CA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup, CA Manggis Gadungan, CA Pancur Ijen I, CA Pancur Ijen II, CA Pulau Bawean, CA Pulau Noko, CA Pulau Nusa, CA Pulau Nusa Barung, CA Saobi, CA Pulau Sempu, CA Sungai Kolbu Iyang Plateu, CA Watangan Puger I-VI; Bali: CA Batukahu I, CA Batukahu II, CA Batukahu III; NTB: CA Pedauh, CA Toffo Kota Lambu, CA Pulau Sangiang, CA Pulau Panjang; NTT: CA Gunung Mutis, CA Kemang Boleng I, CA Kemang Boleng II, CA Hutan Bakau Maubesi, CA Ndeti Kelikima, CA Riung, CA Wae Wuul, CA Watu Ata, CA Wolo Tado; Kalbar: CA Nyiut Panrissen, CA Lo Fat Fun Fie, CA Mandor, CA Gunung Raya Pasi, CA Muara Kendawangan; Kalimantan Tengah: CA Bukit Tangkiling, CA Pararawen I/II, CA Bukit Sapat Haung, CA Gunung Kentawan, CA Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku, CA Teluk Pamanukan, CA Sungai Bulan dan Sungai Lulan; Kalimantan Timur: CA Muara Kaman Sedulang, CA Padang Luwai, CA Teluk Apar, CA Teluk Adang; Sulawesi Utara: CA Gunung Dua Saudara, CA Gunung Ambang, CA Gunung Lokon, CA Gunung Tangkoko Batuangus; Gorontalo: CA Mas Popaya Raja, CA Panua, CA Tangale, CA Tanjung Panjang; Sulteng: CA Gunung Dako, CA Gunung Sojol, CA Gunung Tinombala, CA Morowali, CA Pamona, CA Pangi Binangga, CA Tanjung Api; Sulsel: CA Faruhumpenai, CA Kalaena, CA Ponda-ponda; Sultra: Kakenauwe, CA Lamedae, CA Napabalano; Maluku: CA Gunung Sibela, CA Lifamatola, CA Pulau Obi, CA Pulau Seho, CA Tobalai, CA Taliabu; Maluku: Bekau Huhun, CA Gunung Api Kisar, CA Pulau Angwarmase, CA Pulau Nustaram, CA Pulau Nuswotar, CA Pulau Pombo, CA Tanjung Sial; Papua Barat: CA</p>

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Pegunungan Kumawa, CA Pegunungan Arfak, CA Pegunungan Fakfak, CA Pegunungan Wondiboy, CA Pulau Bantata Barat, CA Pulau Kofiau, CA Pulau Misool, CA Pulau Salawati Utara, CA Pegunungan Tamrau Selatan, CA Pegunungan Tamrau Utara, CA Teluk Bintuni, CA Pulau Waigeo, CA Wagura Kote, CA Pantai Sausapor; Papua: CA Biak Utara, CA Bupul, CA Pegunungan Cycloops, CA Enarotali, CA Pegunungan Wayland, CA Pegunungan Yapen Tengah, CA Pulau Supiori, CA Tanjung Wiay; Lampung: CAL Bukit Barisan Selatan, CAL Pulau Anak Krakatau; Jawa Barat: CAL Pananjung Pangandaran, CAL Leuweung Sancang; Kalbar: CAL Karimata; Papua Barat: CAL Pulau Kofiau; Aceh: KSA/KPA Calon Tahura Subulussalam, KSA/KPA Calon Tahura Simeulue, KSA/KPA Calon TWA Kuta Malaka; Sumut: KSA/KPA Lubuk Raya, KSA/KPA Sei Ledong; Sumbar: KSA/KPA Air Putih, KSA/KPA Air Tarusan, KSA/KPA Arau Hilir, KSA/KPA Barisan I, KSA/KPA Batang Pangean I, KSA/KPA Gunung Marapi, KSA/KPA Gunung Sago, KSA/KPA Malampah Alahan Panjang, KSA/KPA Maninjau Utara-Selatan, KSA/KPA Pagai Selatan, KSA/KPA Saibi Sarabua, KSA/KPA Singgalang Tandikat; Riau: KSA/KPA Buluh Cina, KSA/KPA Mahato; Babel: KSA/KPA Gunung Lalang, KSA/KPA Gunung Mankol, KSA/KPA Gunung Maras, KSA/KPA Gunung Menumbing, KSA/KPA Gunung Permisan, KSA/KPA Jering Menduyung; Lampung: KSA/KPA Rawa Kandis; NTB: KSA/KPA Jereweh; Kalteng: KSA/KPA Ex PLG I, KSA/KPA Ex PLG II, KSA/KPA Ex PLG III, KSA/KPA Ex PLG IV, KSA/KPA Ex PLG V, KSA/KPA S. Sebangau; Kalsel: KSA/KPA Asam Asam, KSA/KPA Batu Tunau-Tanjung Pengharapan; Sulut: KSA/KPA Calon Tahura Gunung Tumpa; Sulbar: KSA/KPA Calon TN Ganda Dewata, KSA/KPA Calon Tahura Messawa; Maluku: KSA/KPA Daab, KSA/KPA Gunung Sahuwai, KSA/KPA Masbait, KSA/KPA Tafermaar, KSA/KPA Pulau

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Larat, KSA/KPA Sungai Niff, KSA/KPA Danau Tihu; Papua Barat: KSA/KPA Tuwanwowi; Papua: KSA/KPA Mapia; Aceh: SM Rawa Singkil; Sumut: SM Barumun, SM Dolok Surungan, SM Karang Gading/Langkat Timur Laut, SM Siranggag; Riau: SM Balai Raja, SM Bukit Batu, SM Bukit Rimbang-Bukit Baling, SM Danau Pulau Besar/Danau Bawah, SM Giam Siak Kecil, SM Kerumutan, SM PLG Sibanga, SM Tasik Belat, SM Tasik Besar/Tasik Metas, SM Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung, SM Tasik Tanjung Padang; Sumsel: SM Bentayan, SM Dangku, SM Gumai Pasemah, SM Gunung Raya, SM Isau-Isau Pasemah, SM Padang Sugihan; DKI Jakarta: SM Muara Angke, SM Pulau Rambut dan Perairan dsk.; Jawa Barat: SM Cikepuh, SM Gunung Sawal, SM Sindangkerta; Jateng: SM Gunung Tungganggan; DIY: SM Paliyan, SM Sermo; Jatim: SM Dataran Tinggi Iyang, SM Pulau Bawean; NTT: SM Kateri, SM Harlu, SM Danau Tuadale, SM Perhatu, SM Ale Aisio; Kalteng: SM Lamandau; Kalsel: SM Pulau Kaget, SM Kuala Lupak, SM Pleihari Tanah Laut; Kaltim: SM Pulau Semama; Sulut: SM Gunung Manembo-nembo, SM Karakelang Utara, SM Karakelang Selatan; Gorontalo: SM Nantu; Sulteng: SM Bakiriang, SM Lombuyan, SM Pati pati, SM Pinjan/Tanjung Matop, SM Pulau Dolangan, SM Tanjung Santigi; Sulsel: SM Komara; Sultra: SM Buton Utara, SM Lambusango, SM Tanjung Amolengo, SM Tanjung Batikolo, SM Tanjung Peropa; Maluku: SM Pulau Baun, SM Pulau Kobror, SM Tanimbar, SM Pulau Manuk, SM Pulau Kasa; Papua Barat: SM Mubrani-Kaironi, SM Sidei-Wiban, SM Pulau Venu; Papua: SM Danau Bian, SM Pulau Pombo, SM Mambramo Foja, SM Pegunungan Jayawijaya, SM Pulau Dolok, SM Pulau Komolon, SM Savan; Papua Barat: SML Pulau Sabuda & Pulau Tataruga; Aceh: TB Lingga Isaq; Sumut: TB Pulau Pini; Kep. Riau: TB Pulau Rempang; Bengkulu: TB Gunung Nanu'ua, TB

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									<p>Semidang Bukit Kabu; Jawa Barat: TB Masigit Kareumbi; NTB: TB Pulau Moyo; NTT: TB Dataran Bena, TB Pulau Ndana; Sulteng: TB Landusa Tomata; Sulsel: TB Komara; Aceh: THR Pocut Meurah Intan; Sumut: THR Bukit Barisan; Sumbar: THR Dr. Mohammad Hatta; Riau: THR Minas (Sultan Syarif Kasim); Jambi: THR Sekitar Tanjung/Orang Kayo Hitam, THR Sultan Thaha Syaifuddin; Bengkulu: THR Bukit Rabang-Gluguran, THR Raja Lelo (Pungguk Menakat); Lampung: THR Wan Abdul Rachman; Banten: THR Banten; Jabar: THR Ir. H. Djuanda, THR Pancoran Mas Depok, THR Gunung Palasari-Gunung Kunci; Jawa Tengah: THR KGPAA Mangkunegoro I; DIY: THR Gunung Bunder; Jatim: THR R. Soeryo; Bali: THR Ngurah Rai; NTB: THR Nuraksa; NTT: THR Prof. Ir. Herman Johannes; Kalsel: THR Sultan Adam; Kaltim: THR Bukit Soeharto, THR Lati Petangis; Sulteng: THR Sulteng; Sulsel: THR Sinjai/Abdul Latief, THR Bontobahari; Sultra: THR Murhum/Nipa-Nipa; Aceh, Sumut: TN Gunung Leuser; Sumut: TN Batang Gadis; Sumbar: TN Siberut; TN Riau: TN Tesso Nilo; Riau, Jambi: TN Bukit Tigapuluh; Sumbar, Bengkulu: TN Kerinci Seblat; Jambi: TN Berbak, TN Bukit Duabelas; Sumsel: TN Sembilang; Bengkulu, Lampung: TN Bukit Barisan Selatan; Lampung: TN Way Kambas; Banten: TN Ujung Kulon; Banten, Jawa Barat: TN Gunung Halimun Salak; Jawa Barat: TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Ciremai; Jateng: TN Gunung Merbabu; Jateng&DIY: TN Gunung Merapi; Jawa Timur: TN Baluran, TN Bromo Tengger Semeru, TN Meru Betiri, TN Alas Purwo; Bali: TN Bali Barat; NTB: TN Gunung Rinjani, TN Gunung Tambora; NTT: TN Manupeu Tanah Daru, TN Laiwangi Wanggameti, TN Kelimutu, TN Komodo; Kalbar: TN Danau Sentarum, TN Gunung Palung, TN Betung Kerihun; Kalbar, Kalteng: TN Bukit Baka Bukit Raya; Kalteng: TN Sebangau, TN Tanjung Puting; Kaltim,</p>

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Kaltara: TN Kayan Mentarang; Kaltim: TN Kutai; Sulut&Gorontalo: TN Bogani Nani Wartabone; Sulteng: TN Lore Lindu; Sulsel: TN Bantimurung-Bulusaraung; Sultra: TN Rawa Aopa Watumohai; Maluku: TN Aketajawe Lolobata; Maluku: TN Manusela; Papua: TN Lorentz, TN Wasur; DKI Jakarta: TNL Kepulauan Seribu; Jateng: TNL Kepulauan Karimun Jawa; Sulut: TNL Bunaken; Sulteng: TNL Kepulauan Togean; Sultra: TNL Wakatobi; Papua Barat: TNL Teluk Cendrawasih; Aceh: TWA Pulau Weh, TWA Jantho, TWA Kepulauan Banyak; Sumut: TWA Deleng Lancuk, TWA Holiday Resort, TWA Lau Debuk-debuk, TWA Sibolangit, TWA Sicikeh-cikeh, TWA Sijaba Huta Ginjang; Sumbar: TWA Lembah Harau, TWA Mega Mendung, TWA Rimbo Panti; Riau: TWA Sungai Dumai; Jambi: TWA Bukit Sari; Sumsel: TWA PLG Bukit Serelo, Pundi Kayu; Bengkulu: TWA Air Hitam Reg.102, TWA Air Ketebat Danau Tes Reg.57, TWA Air Rami I/II Reg.87, TWA Bukit Kaba, TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran, TWA Muko-Muko, TWA Pantai Panjang Pulau Baai Reg.91, TWA Seblat, TWA Way Hawang Reg.95; Banten: TWA Pulau Sangiang; DKI Jakarta: TWA Angke Kapuk; Jabar: TWA Cimanggu, TWA Gunung Guntur, TWA Gunung Pancar, TWA Gunung Papandayan, TWA Gunung Tampomas, TWA Jember, TWA Kawah Gunung Tangkuban Perahu, TWA Kawah Kamojang, TWA Linggarjati, TWA Pananjung Pangandaran, TWA Sukawayana, TWA Talaga Bodas, TWA Telaga Patengan, TWA Telaga Warna; Jateng: TWA Grojogan Sewu, TWA Sumber Semen, TWA Gunung Selok, TWA Telogo Warno/Telogo Pengilon, TWA Guci; DIY: TWA Gunung Batu Gamping; Jatim: TWA Tretes, TWA Gunung Baung, TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup; Bali: TWA Panelokan, TWA Sangeh, TWA Danau Buyan-Banau Tamblingan, TWA Gunung batur Bukit Payang; NTB: TWA Suranadi, TWA

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Pekalangan, TWA Kerandangan, TWA Bangko-Bangko, TWA Gunung Tunak, TWA Semongkat, TWA Tanjung Tampa, TWA Danau Rawa Taliwang, TWA Madapangga; NTT: TWA Tuti Adagae, TWA Manipo, TWA Ruteng, TWA Bipolo, TWA Camplong, TWA Egon Limedo, TWA Pulau Lapang, TWA Pulau Batang, TWA Baumata, TWA Pulau Rusa, TWA Sisimeni Sanam, TWA Tujuh Belas Pulau; Kalbar: TWA Baning, TWA Bukit Kelam Komplek, TWA Sungai Liku, TWA Tanjung Belimbing, TWA Asuansang, TWA Dungan, TWA Gunung Melintang; Kalteng: TWA Bukit Tangkiling, TWA Tanjung keluang; Kalsel: TWA Pulau Kembang, TWA Pulau Bakut; Sulut: TWA Batu Angus, TWA Batu Putih; Sulteng: TWA Pulau Pasoso, TWA Pulau Tokobae, TWA Bancea, TWA Wera; Sulsel: TWA Cani Sirenreng, TWA Danau Mahalona, TWA Danau Matano, TWA Danau Towuti, TWA Lejja, TWA Malino, TWA Nanggala III, TWA Sidrap; Sultra: TWA Kepulauan Padamarang, TWA Mangolo, TWA Tirta Rimba/Air Jatuh; Maluku: TWA Gunung Api Banda; Papua Barat: TWA Beriat, TWA Gunung Meja, TWA Kalmono, TWA Sorong; Papua: TWA Nabire, TWA Teluk Youtefa; Aceh: TWAL Pulau Weh; Banten: TWAL Sangiang; NTB: TWAL Pulau Moyo, TWAL Pulau Satonda; NTT: TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere, TWAL Teluk Kupang; Kaltim: TWAL Pulau Sangalaki; Sultra: TWAL Teluk Lasolo; Maluku: TWAL Pulau Lombo, TWAL Pulau Marsegu, TWAL Pulau Kasa
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi							
			Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	110 unit	1.500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable							

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 paket data	2.200,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi							
			Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	800,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan							
			Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	1.400,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Terbentuk dan ditetapkan 100 unit KPHK pada kawasan konservasi							
			Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	80 Unit	2.200,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi				11.500,0				
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional dan taman nasional				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	
			Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	2,500,000 orang	3.200,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	Pusat (Jakarta)
		Meningkatnya kontribusi kawasan konservasi dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)				Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pengembangan PLT Matahari, hidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir	
			Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	1.500 Kwatt	1.500,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pengembangan PLT Matahari, hidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir	Pusat (Jakarta)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Meningkatnya kontribusi Kawasan Konservasi non Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi				Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pembangunan PLTP	
			Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	5 Unit	1.700,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pembangunan PLTP	Pusat (Jakarta)
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK							
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	1.600,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK							
			Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi kawasan konservasi minimal 25 unit	5 unit	900,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+							
			Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit KK	2 KK	2.600,0				
5	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial				6.500,0				
		Terbentuknya dan berfungsinya forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	
			Jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	6 kawasan mangrove di 2 Ekoregion (Sumatera dan Jawa)	4.600	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	Pulau Rupa Riau, Labuan & Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Jaringhalus Sumatera Utara, Tanjung Jabung Timur Jambi, Pemalang Jawa Tengah, Teluk Pangpang Jatim)
			Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE	13 KEE	200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Tersedianya paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial							
			Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 paket data	14 paket data	150	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial							
			Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direview sebanyak 48 dokumen	14 Dokumen	300	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya kawasan ekosistem karst yang ditetapkan pengelolaannya							
			Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 kawasan	2 kawasan	150	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasi							
			Jumlah koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 spesies	60 spesies	100	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem				61.900,0				
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Nasional			61.900,0				
			Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77,5 poin	77,5	61.900,0				
7	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati				839.849,0				
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		kawasan konservasi non taman nasional							
			Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	1.000.000 orang	18.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	TWA Guntur (Jawa Barat), TWA Papandayan (Jawa Barat), TWA Gunung Tunak (NTB), TWA Kawah Ijen (Jawa Timur), TWA Pulau Weh (NAD), TWA Air Putih (Bengkulu), TWA Muka Kuning (Riau), TWA Gunung Baung (Jawa Timur), TWA Tretes (Jawa Timur)
		Terbangun dan beroperasinya Suaka satwa (Sanctuary) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata di KK non TN				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	
			Jumlah sanctuary yang terbangun dan beroperasi di kawasan konservasi non taman nasional untuk menjadi objek wisata	6 unit	30.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	Ciwidey (Owa Jawa) Jawa Barat, Samboja (Orangutan) Kalimantan Timur, Tarjun (Bekantan) Kalimantan Selatan, Jambi (Harimau Sumatera), Aceh (Gajah) NAD, Kamojang (Elang Jawa) Jawa Barat,
		Tersusunnya desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di kawasan konservasi non taman nasional				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	
			Jumlah desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di kawasan konservasi non taman nasional	10 Kawasan Konservasi	5.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	Regional Sumatera: KSPN Weh dsk. (TWA Pulau Weh), KSPN Danau Toba (TWA Sijaba Hutaginjang), KSPN Batam (TWA Muka Kuning) Regional Jawa Bali Nusra: KSPN Bromo Tengger Semeru (TWA Gunung Baung, TWA Kawah Ijen, TWA Tretes), KSPN Labuan Bajo (TWA Ruteng, TWA 17 Pulau Riung), KSPN Kep. Seribu (TWA Angke Kapuk), TWA Guntur, TWA Papandayan, TWA Gunung Tunak Regional Sulawesi Maluku: TWA Batu Putih
		Keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi non taman nasional dapat dilindungi dari gangguan kebakaran hutan				Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	
			Luas hutan di kawasan konservasi non taman nasional yang terbakar maksimal 10.908 Ha (menurun sebesar 10% dari batas toleransi	Maksimum 10.908 Ha	30.000,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	27 Unit KSDA di Seluruh Indonesia

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			maksimum tahun 2015 seluas 12.120 Ha)						
		Pembangunan jalan akses wisata dalam kawasan TWA				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	
			Panjang jalan akses wisata dalam kawasan TWA	125 km	12.500,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	TWA Guntur (Jawa Barat), Papandayan (Jawa Barat), Gunung Tunak (NTB), Kawah Ijen (Jawa Timur), Pulau Weh (NAD), Air Putih (Bengkulu), Muka Kuning (Riau), Gunung Baung (Jawa Timur), Tretes (Jawa Timur)
		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TWA				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	
			Jumlah sarana prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge, MCK, tempat pengolahan sampah, pondok pemandu dll) di kawasan konservasi yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional	10 paket (dibreakdown per paket)	46.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	TWA Guntur (Jawa Barat), Papandayan (Jawa Barat), Gunung Tunak (NTB), Kawah Ijen (Jawa Timur), Pulau Weh (NAD), Air Putih (Bengkulu), Muka Kuning (Riau), Gunung Baung (Jawa Timur), Tretes (Jawa Timur)
		Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan konservasi laut non taman nasional				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengelolaan Wisata Bahari	
			Jumlah unit kawasan konservasi non taman nasional yang siap dikunjungi dengan sarana prasarana yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	18 Unit Kawasan Konservasi	18.480,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengelolaan Wisata Bahari	CAL Bukit Barisan Selatan – Lampung, CAL Pulau Anak Krakatau – Lampung, CAL Pananjung Pangandaran - Jawa Barat, CAL Leuweung Sancang - Jawa Barat, CAL Karimata - Kalimantan Barat, CAL Pulau Kofiau - Papua Barat, SML Pulau Sabuda & Pulau Tataruga - Papua Barat, TWAL Pulau Weh – Aceh, TWAL Sangiang – Banten, TWAL Pulau Moyo – NTB, TWAL Pulau Satonda – NTB, TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere – NTT, TWAL Teluk Kupang – NTT, TWAL Pulau Sangalaki - Kalimantan Timur, TWAL Teluk Lasolo - Sulawesi Tenggara, TWAL Pulau Pombo – Maluku, TWAL Pulau Marsegu – Maluku, TWAL Pulau Kasa - Maluku

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	
			Jumlah kawasan konservasi laut dan pesisir (CA Laut, SM Laut dan TWA Laut) yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	10 unit	5.000,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	KPHK Moyo (NTB), KPHK Jakarta (DKI Jakarta), KPHK Kep. Krakatau (Lampung), KPHK Pangandaran Sancang (Jawa Barat), KPHK Riung & Maumere (NTT), KPHK Kep. Karimata (Kalimantan Barat), KPHK Gunung Api Banda (Maluku), KPHK Pulau Weh (NAD), KPHK Seram Barat (Maluku), KPHK Kep. Banyak (Aceh)
		Meningkatnya kontribusi TWA dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)				Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pengembangan PLT Matahari, hidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir	
			Energi yang dihasilkan dari mini/mikro hidro dari TWA	500 Kwatt	25.000,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pengembangan PLT Matahari, hidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir	TWA Gunung Baung (Jawa Timur), TWA Lejja (Sulawesi Selatan), TWA Cani Sirenreng (Sulawesi Selatan)
		Terbentuk dan beroperasinya KPHK non taman nasional di pesisir dan laut				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	
			Jumlah KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	35 unit	225,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	Regional Sumatera: KPHK Sungai Dumai (Riau), KPHK Pantai Panjang (Bengkulu) Regional Jawa Bali Nusra: KPHK Pangandaran Sancang (Jabar), KPHK Pulau Sempu (Jatim), KPHK Bawean-Noko Nusa (Jatim), KPHK Pulau Saobi (Jatim) Regional Kalimantan: KPHK Tanjung Keluang (Kalteng), KPHK Selat Sebuku (Kalsel), KPHK Teluk Kelumpang (Kalsel), KPHK Kep. Karimata (Kalbar)
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Peningkatan populasi penyu, dan keanekaragaman jenis ikan di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut	2%	915,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	P. Sangalaki dan P. Derawan Kab. Berau (Kaltim), SM Cikepuh (Jawa Barat), Kab. Sambas (Kalbar), Raja Ampat (Papua Barat)
		Meningkatnya kontribusi Kawasan Konservasi non Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi				Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pembangunan PLTP	
			Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di Kawasan Konservasi non Taman Nasional	5 Unit	5.444,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pembangunan PLTP	Regional Sumatera: CA Malampah Alahan; Regional Jawa Bali Nusra: CA Kawah Kamojang (Jawa Barat), CA Gunung Simpang, CA Talaga Bodas (Jabar), TWA Danau Buyan (Bali)
		Tersedianya arahan pengelolaan/ pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi non TN (blok pengelolaan) sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	
			Jumlah penataan blok pengelolaan kawasan konservasi non TN sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	413 Kawasan Konservasi Non- Taman Nasional	8.776,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	413 Kawasan Konservasi Non TN di 31 Provinsi
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi non TN				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi non TN yang memiliki usaha ekonomi produktif	27 desa	29.600,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	Kawasan Konservasi-Nama Desa SM Dolok Surungan-Lobu Rappa (Sumut) CA Papandayan-Sukalila (Jawa Barat) TWA Kawah Ijen-Taman Sari (Jawa Timur) CA Mutis-Fatumnasi (NTT) TWA Lejja-Bulue (Sulsel) CA Cyclop-Kampung Maribu (Papua) TWA Sorong-Kampung Klasaman (Papua Barat) TWA/CA Jantho-Jalin (NAD) KSA Marapi-Nagari Batu Palano (Sumbar) CA. Durian Luncuk I-Guruh Baru (Jambi) SM Padang Sugihan-Sebokor (Sumsel) CA dan CAL Kep Krakatau-Tejang Pulau Sebesi (Lampung) TWA Seblat-Suka Baru (Bengkulu) SM Pulau Rambut-Kelurahan P Untung Jawa (DKI Jakarta) CA Bantarbolang-Kebongede (Jateng) SM Paliyan-Karang Asem (DI.Yogya) CA Batukahu dan TWA D.Buyan-D.Tamblingan-Candikuning (Bali) TWA Gunung Tunak-Mertak (NTB) CA Gunung Nyiut-Pisak (Kalbar) TWA Bukit Tangkiling-Kel. Banturung (Kalteng) CA Teluk Pamukan-Sakadoyan (Kalsel) CA Teluk Adang-Muara Paser (Kaltim) TWA Wera-Balumpewa (Sulteng) SM Tanjung Amolengo-Ulunese (Sultra) CA Dwasudara-Kelurahan Danowudu (Sulut) SA Gunung Sahuwai-Desa Ariate (Maluku) SM Karang Gading Langkat Timur Laut-Jaring halus (Sumut)
		Menurunnya gangguan pada kawasan konservasi non taman nasional				Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	
			Prosentase gangguan pada kawasan konservasi non taman nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 149 kejadian	Maksimum 125 kejadian	37.500,0	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	27 Unit KSDA di Seluruh Indonesia

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya				Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	
			Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	26 unit	2.000	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	26 Unit KSDA di Seluruh Indonesia
		Meningkatnya TSL dan Bioprospecting				Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor	Pengembangan potensi ekspor daerah	
			Jumlah unit penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan ke Luar Negeri bersertifikat	30 unit	3.000,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor	Pengembangan potensi ekspor daerah	Jawa Barat (5 unit), Jawa Timur (5 unit), Jawa Tengah (5 unit), Papua (1 unit), Bali (5 unit), DKI (5 unit), DIY (2 unit), Kalbar (2 unit)
		Tersedianya bahan baku untuk industri berbasis tumbuhan dan satwa liar (TSL)/ <i>bioresources</i>				Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
			Produksi hasil penangkaran TSL dari kelas: a) Anthozoa 2.500.000 pcs; b) Mamalia 4500 ekor; c) Herpetofauna 3.500.000 ekor	6004500 ekor/pcs	11.000,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	24 Provinsi: Jabar, Jatim, Jateng, DIY, DKI Jakarta, Bali, Sumut Lampung, Jambi, Bengkulu, Riau, NAD, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, Maluku, NTB, NTT, Papua, Papua Barat
			Produksi hasil pemanfaatan TSL dari alam, kelas: a) Mamalia 5.030 ekor; b) Reptil 1.848.916 ekor ; c) Amphibia 83.839.375 ekor; d) Burung 7.695 ekor ; e) Arthropoda 70.435 ekor; f) Anthozoa 1.979.750 pcs; g) Pisces 10.000 ekor; h) Tumbuhan 975.103 pcs	6004500 ekor/pcs	13.200,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	Seluruh Indonesia
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi							
			Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013		5.000	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati pada lembaga konservasi							
			Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang		1.500	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013						
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan							
			Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	300	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi							
			Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	240	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable							
			Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	160	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi							
			Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	80 Unit	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi							
			Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	150	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi							
			Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	1.000 Ha	10.200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen RP							
			Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	1.500	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya PNBPN dari hasil pemanfaatan TSL							
			Besaran PNBPN dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	1.000	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik							
			Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	500	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK							
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit	1.200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK							
			Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 unit	1.000	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif							

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	600	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuk dan beroperasinya KPHK non taman nasional di pesisir dan laut (Renja Aplikasi)							
			Jumlah KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	35	105.000	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya dan berfungsinya forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial							
			Jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	6 unit	400	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional							
			Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77.5 poin	77,5	409.459	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
8	Pengelolaan Taman Nasional				1.028.192,0				
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan taman nasional				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	
			Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	1.500.000 orang	147.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	TN Wakatobi (Sulawesi Tenggara), TN Komodo (NTT), TN Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), TN Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), TN Tanjung Putting (Kalimantan Tengah), TN Rinjani (NTB), TN Bali Barat (Bali), Tn Alas Purwo (Jawa Timur), TN Ciremai (Jawa Barat), TN BBS (Lampung), TN Way Kambas (Lampung), TN Ujung Kulon (Jawa Barat), TNKS (Jambi), TN Siberut (Sumatera Barat)
		Terbangun dan beroperasinya Suaka satwa (Sanctuary) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata di TN				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah sanctuary yang terbangun dan beroperasi di taman nasional untuk menjadi objek wisata	6 unit	30.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	TN. Bantimurung Bulusaraung (Tarsius) Sulawesi Selatan, TN Bukit Barisan Selatan (Harimau Sumatera) Lampung, TN LoreLindu (Maleo) Sulawesi Tengah, TN. Manusela (Kakatua Besar Jambul Kuning) Maluku, TN. Kep. Seribu (Penyu) DKI Jakarta, TN Komodo (Komodo) NTT
		Tersusunnya desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di taman nasional				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	
			Jumlah desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di taman nasional	14 TN	7.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	Regional Kalimantan: KSPN Tanjung Puting dsk. (TN Tanjung Puting) Regional Jawa Bali Nusra: KSPN Rinjani dsk. (TN Rinjani), KSPN Bali Barat dsk. (TN Bali Barat), KSPN Ijen dsk. (TN Alas Purwo), KSPN Tanjung Lesung dsk. (TN Ujung Kulon), KSPN Bromo dsk. (TN Bromo Tengger Semeru), KSPN Kepulauan Seribu (TN Kepulauan Seribu), TN Ciremai, KSPN Merapi-Merbabu (TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu), KSPN Komodo dsk. (TN Komodo), KSPN Ende Kelimutu (TN Kelimutu) Regional Sumatera: KSPN Kerinci Seblat dsk. (TNKS), KSPN Siberut dsk. (TN Siberut), TN BBS, TN Way Kambas Regional Sulawesi Maluku: KSPN Wakatobi (TN Wakatobi)
		Keanekaragaman hayati di dalam taman nasional dapat dilindungi dari gangguan kebakaran hutan				Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	
			Luas hutan di taman nasional yang terbakar maksimal 39.524 Ha (menurun sebesar 10% dari batas toleransi maksimum tahun 2015 seluas 43.915 Ha)	Maksimum 39.524 Ha	48.000,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	51 Unit TN di Seluruh Indonesia
		Pembangunan jalan akses wisata dalam kawasan Taman Nasional				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Panjang jalan akses wisata dalam kawasan TN	165.8 km	16.580,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	TN Alas Purwo 40,8 Km (Jawa Timur); TN BTS 21,5 Km (Jawa Timur); TNGHS 38,5 Km (Jawa Barat); TN Baluran 27 Km (Jawa Timur); TN GGP 20 Km (Jawa Barat); TN Bali Barat 18 Km (Bali)
		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TN Prioritas Nasional destinasi wisata				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	
			Jumlah sarana prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge dll) di taman nasional yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional destinasi wisata	4 paket (TN Komodo, TN Wakatobi, TN Kep. Seribu, TN. Bromo Tengger Semeru)	47.600,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan	TN Komodo (NTT), TN Wakatobi (Sulawesi Tenggara), TN Kep. Seribu (DKI Jakarta), TN. Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur)
		Meningkatnya kontribusi Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)				Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pengembangan PLT Matahari, hidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir	
			Energi yang dihasilkan dari mini/mikro hidro dari Taman Nasional	1000 Kwatt	12.500,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pengembangan PLT Matahari, hidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir	TN Gunung Leuser (Aceh-Sumut), TN Bogani Nani Watabone (Gorontalo), TN Kerinci Seblat (Jambi), TN Laiwangi (NTT), TN Manupeu (NTT), TNG Halimun Salak (Jawa Barat), TN BBS (Lampung)
		Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan taman nasional laut				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengelolaan Wisata Bahari	
			Jumlah unit kawasan taman nasional yang siap dikunjungi dengan sarana prasarana yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	15 Unit	17.989,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengelolaan Wisata Bahari	TN Komodo, TN Meru Betiri, TN Teluk Cendrawasih, TN Kepulauan Togean, TN Ujung Kulon, TN Kepulauan Seribu, TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate, TN Karimun Jawa, TN Siberut, TN Bali Barat, TN Alas Purwo, TN Baluran, TN Manusela
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah taman nasional laut dan pesisir yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	20 Taman Nasional	15.000,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	TN Komodo (NTT), TN Meru Betiri (Jawa Timur), TN Cendrawasih (Papua Barat), TN Kepulauan Togean (Sulawesi Tengah), TN Ujung Kulon (Banten), TN Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), TN Wakatobi (Sulawesi Tenggara), TN Bunaken (Sulawesi Utara), TN Takabonerate (Sulawesi Selatan), TN Karimun Jawa (Jawa Tengah), TN Siberut (Sumatera Barat), TN Bali Barat (Bali), TN Alas Purwo (Jawa Timur), TN Baluran (Jawa Timur), TN Manusela (Maluku), TN Tanjung Puting (Kalimantan Tengah), TN Way Kambas (Lampung), TN Wasur (Papua), TN Lorentz (Papua), TN Kutai (Kalimantan Timur)
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di taman nasional pesisir dan laut				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	
			Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing dan keanekaragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir	2%	35.000,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Konservasi pesisir dan laut	TN Meru Betiri (Jawa Timur), TN Teluk Cendrawasih (Papua Barat), TN Taka Bonerate (Sulawesi Selatan), TN Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), TN Bunaken (Sulawesi Utara), TN Karimunjawa (Jawa Tengah), TN Wakatobi (Sulawesi Tenggara)
		Meningkatnya kontribusi Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi				Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pembangunan PLTP	
			Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di Taman Nasional	5 Unit	3.323,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Pembangunan PLTP	Regional Sumatera: TN BBS (Bengkulu), TN Kerinci Seblat (Jambi) Regional Jawa Bali Nusra: TN Ciremai (Jabar), TN Halimun Salak (Jabar), TN Rinjani (NTB)
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar TN				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah desa di daerah penyangga TN yang memiliki usaha ekonomi produktif	51 desa	46.100,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	TN Gunung Leuser-Namo Sialang, TN Gn Gd Pangrango-Cihanjawan, TN Kerinci Seblat-Lubuk Gadang Selatan, TN Lore Lindu-Bunga, TN BBS-Margomulyo, TN Betung Kerihun-Banua Tengah, TN Bromo T Semeru-Ranupane, TN Siberut-Matotonan, TN Bukit Tigapuluh-Rantau Langsat, TN Berbak-Air Hitam Laut, TN Way Kambas-Brja Harjosari, TN Halimun Salak-Cikiray, TN Ujung Kulon-Kertajaya, TN Baluran-Wonorejo, TN Alas Purwo-Kalipait, TN Meru Betiri-Wonoasri, TN Bali Barat-Sumber klampok, TN Gunung Rinjani-Sambik Elen, TN Komodo-Komodo, TN Kelimutu-Pemo, TN Bukit Baka Bukit Raya-Belaban Ella, TN Gunung Palung-Sejahtera, TN Tanjung Putting-Teluk Pulai, TN Kutai-Kandolo, TN Rawa Aopa Watumohai-Wonua Morome, TN Boganinani Wartabone-Tunggulo, TN Manusela-Kanikeh, TN Wasur-Kampung Yanggandur, TN Kayan Mentarang-Pa Umung, TN Batang Gadis-Pagar Gunung, TN Manupeu Tanah Daru-Katikuloku, TN Laiwangi Wanggameti-Nangga, TN Akatejawe Lolobata-Koli, TN Lorentz-Putagaima, TN Sebangau-Mekartani, TN Bukit Duabelas-Pematang Kabau, TN Tesonilo-Air Hitam, TN Gunung Merapi-Ngargomulyo, TN Gunung Merbabu-Dusun Cuntel, TN Gunung Ciremai-Sagara Hiang, TN Bantimurung B-Tompobulu, TN Sembilang-Tabalaya, TN Danau Sentarum-Laut Tawang, TN Teluk Cendrawasih-Desa Cendrawasih, TN Kep. Seribu-Desa Pramuka, TN Karimun Jawa - Desa Karimun Jawa, TN Taka Bonerate-Desa Taka, TN Kep. Wakatobi-Desa Wakatobi, TN Bunaken-Desa Bunaken, TN Kep. Togean-Desa Togean

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Meningkatnya akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan TN				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	
			Luas zona tradisional pada taman nasional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	250.000 ha (47 desa)	33.500,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	TN Gunung Leuser-Batu Rongring, TN Gn Gd Pangrango-Gekbrong, TN Lore Lindu-Tuva, TN Lore Lindu-Wuasa, TN BBS-Tebing Rambutan, TN Betung Kerihun-Tanjung Lasa, TN Bromo, TN Semeru-Duwet Krajan, TN Siberut-Mongan Poula, TN Bukit Tigapuluh-Muara Danau, TN Berbak-Simpang Datuk, TN Berbak-Kelurahan Tanjung, TN Way Kambas-Rantau Jaya Udik II, TN Halimun Salak-Cirompang, TN Ujung Kulon-Cibadak, TN Baluran-Sumberwaru, TN Alas Purwo-Wringin Putih, TN Meru Betiri-Andongrejo, TN Bali Barat-Kelurahan Gilimanuk, TN Bali Barat-Kelurahan Blimbingsari, TN Gunung Rinjani-Lenek Duren, TN Komodo-Pasir Panjang, TN Komodo-Papagarang, TN Kelimutu-Niowula, TN Bukit Baka Bukit Raya-Rantau Malam, TN Gunung Palung-Sedahan jaya, TN Tanjung Putting-Sungai Perlu, TN Kutai-Swargabara, TN Rawa Aopa Watumohai-Lantari, TN Boganinani Wartabone-Pinogaluman, TN Manusela-Piliana, TN Kayan Mentarang-Pa Padi, TN Batang Gadis-Hutabaringin Maga, TN Manupeu Tanah Daru-Umamanu, TN Laiwangi Wanggameti-Praingkareha, TN Sebangau-Habaring Hurung, TN Sebangun-Sebangau Mulya, TN Sebangau- Kereng Bangkirai, TN Bukit Duabelas-Bukit Suban, TN Tesonilo-Lubuk Kambang Bunga, TN Tesonilo-Gunung Melintang, TN Tesonilo-Situgal, TN Gunung Merapi-Wonodoyo, TN Gunung Ciremai-Padabeuhangar, TN Gunung Ciremai-Argalingga, TN B. Bulsarung-Labuaja,

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									TN Sembilang-Karangsari, TN Danau Sentarum-Leboyan
		Tersedianya arahan pengelolaan/ pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi TN (zonasi) sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan pedesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	
			Jumlah penataan zonasi pengelolaan kawasan taman nasional sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	3 TN	3.100,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan pedesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	TN Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), TN Tambora (NTB) dan TN Batang Gadis (Sumatera Utara)
		Menurunnya gangguan pada kawasan taman nasional				Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	
			Persentase gangguan pada kawasan taman nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 142 kejadian	Maksimum 124 kejadian	90.000,0	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	51 Unit TN di Seluruh Indonesia
		Terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya				Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	
			Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	51 unit	5.000	Revolusi Mental	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik	Penegakan Hukum yang Berkualitas	51 Unit TN di Seluruh Indonesia
		Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi							
			Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	1.000 Ha	10.100	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan							

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	10 Dokumen	200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi							
			Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit	250	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable							
			Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data	500	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi							
			Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen RP							
			Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen	300	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi							
			Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	2.000	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik							
			Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	700	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK							
			Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	500	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK							
			Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	750	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terbentuknya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif							
			Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	1.200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional							
			Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77.5 poin	77,5	453.800	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
VII	Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				328.222				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL								
		Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) ditahun 2019							
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point); target tahun 2017 sebesar 75 poin	Nilai SAKIP sebesar 75 poin	208.921	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Nasional (pusat)
2	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan				6.784				
		Terselesaikannya penetapan kawasan hutan				Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	
			Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 % tambahan penetapan kawasan hutan di 2017 (akumulasi s/d 2017 sebesar 85%)	2.522	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	Nasional (pusat), Aceh: Bener Meriah, Aceh Tengah, Sumatera Utara: Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Toba Samosir, Riau: Indragiri, Pelalawan, Rokan Ilir, Kepulauan Riau: Lingga, Bangka Belitung : Bangka Barat, Bangka dan Belitung, Sumatera Selatan: Musi Banyuasin dan Musi Rawas, Lampung, Kalimantan Barat: Sintang, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kayong Utara, Sambas, Kub Raya, Kalimantan Tengah: Kotawaringin Timur, Lamandau, Gunung Mas, Kalimantan Selatan: Kota baru, Tanah Laut, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara: Berau, Kukar, Kutim, Mahakam Ulu, Sulawesi Utara: Minahasa Utara,

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan, Gorontalo : Gorontalo, Sulawesi Tengah: Banggai Laut, Bangkep, Morowali, Morowali Utara, Sigli, Buol, Sulawesi Selatan: Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Wajo, Gowa, Bone, Sinjai, Sulawesi Barat: Mamuju Utara, Majene, Sulawesi Tenggara : Bombana, Maluku: Seram Bagian Barat, Tual, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Maluku Utara: Halmahera Barat, Morotai, Halmahera Timur, Papua, Papua Barat : Peg. Arfak, Manokwari selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fak fak, Kaimana, NTT : Manggarai Barat, Malaka, Ende, Rote Ndao, NTB : Sumbawa Barat, Jawa.
		Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya				Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya	Pencetakan Sawah Baru dan Perluasan Areal Pangan Lain	
			Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 juta ha	500,0	Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya	Pencetakan Sawah Baru dan Perluasan Areal Pangan Lain	34 Provinsi dengan prioritas di: Kalimantan Barat: Kayong Utara, Kapuas Hulu, Ketapang, Kubu Raya Kalimantan Tengah: Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunungmas, Kapuas, Katingan, Kota Palangkaraya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Murungraya, Pulangpisau, Seruyan , Sukamara Maluku: Kepulauan Aru Papua: Mappi, Merauke
		Teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk tanah objek reforma agraria (TORA)				Reforma Agraria	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria	Identifikasi Kawasan Hutan yang Akan Dilepaskan	
			Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk tanah objek reforma agraria (TORA)	4,1 jt ha	924,0	Reforma Agraria	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria	Identifikasi Kawasan Hutan yang Akan Dilepaskan	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, NTB, N T T, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kaltim, Kaltara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Tersedianya dan Tersosialisasinya informasi batas kawasan hutan untuk publik				Reforma Agraria	Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak Atas Tanah Objek Reforma Agraria	Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan	
			Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	Nasional (pusat) dan 5 lokasi/provinsi	1.360,0	Reforma Agraria	Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak Atas Tanah Objek Reforma Agraria	Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan	Pusat (Jakarta), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Sumatera Utara
		Terselesaikannya seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk pada lokasi permukiman transmigrasi				Reforma Agraria	Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak Atas Tanah Objek Reforma Agraria	Legalisasi untuk tanah transmigrasi	
			Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk pada lokasi permukiman transmigrasi	100% bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	1478	Reforma Agraria	Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak Atas Tanah Objek Reforma Agraria	Legalisasi untuk tanah transmigrasi	34 Provinsi
3	Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan			-	4.352,0	4.352			
		Terbarukannya data dan informasi SDH Nasional dan di seluruh KPH				Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	
			Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH untuk perhutanan sosial	34 Provinsi	1.727	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	34 Provinsi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH	852,0	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	Sumbar (KPHL Unit VII), Sumut (KPHL Unit XIII, KPHP Unit V, KPHP Unit VI, KPHL Unit VII, KPHL Unit VIII, KPHL Unit X, KPHP Unit XI, KPHL Unit XXX), Sumsel (KPHL Unit X, KPHL Unit XI, KPHP Unit VIII, KPHL Unit IX), Kalbar (KPHP Unit II, KPHP Unit V, KPHP Unit VI, KPHP Unit VII, KPHP Unit XIV, KPHP Unit XI, KPHP Unit XXI, KPHP Unit XXIX), Kaltim (KPHP Unit XIII, KPHP Unit XIV), Kaltara (KPHP Unit XIII, KPHP Unit XIV), Kalsel (KPHP Unit II, KPHP Unit X), Maluku (KPHL Unit II, KPHP Unit V, KPHL Unit VI, KPHP Unit VII, KPHP Unit VIII), Sulut (KPHP Unit I, KPHP Unit II, KPHP Unit III), Sulbar (KPHL Unit III, KPHL Unit I), Sulsel (KPHL Unit III, KPHL Unit II, KPHL Unit IV), NTB (KPHL Unit VII, KPHL Unit XII, KPHL Unit VI, KPHL Unit XIX), Maluku (KPHP Unit VI, KPHP Unit XI, KPHP Unit XVII, KPHP Unit XXI, KPHL Unit XIII), Papua (KPHP Unit LV, KPHL Unit XXXII, KPHP Unit V, KPHL Unit XXXIII, KPHL Unit XII, KPHP Unit XIV, KPHL Unit XL, KPHL Unit XLI, KPHP Unit XXIV, KPHP Unit XXVII, KPHP XXX, KPHP Unit XVI, KPHL Unit I), Kep. Riau (KPHP Unit VI), Jambi (KPHP Unit III, KPHP Unit IV, KPHP Unit V, KPHP Unit XI), Kep. Bangka Belitung (KPHL Unit VII), NTT (KPHP Unit XIII), Sulteng (KPHL Unit VIII, KPHL Unit X, KPHL Unit XIII, KPHL Unit XVI), Papua Barat (KPHP Unit XVII, KPHP Unit XIV, KPHP Unit IX, KPHP Unit XIX, KPHP Unit XXI), Riau (KPHP Unit XXVI, KPHL Unit XVI, KPHP Unit VIII, KPHP Unit X, KPHP Unit XVII, KPHP Unit XIII), Lampung (KPHP Unit XIV), Kalteng (KPHP Unit VI, KPHP Unit I, KPHP Unit VIII, KPHP Unit XIX, KPHP Unit XV, KPHP Unit XIII, KPHP Unit XX, KPHP Unit XII), Sultra (KPHL Unit XIII, KPHL Unit XVIII, KPHP Unit V, KPHL Unit IV, KPHP Unit XV)
		Terbarukannya data dan informasi SDH Nasional dan di seluruh KPH				Reforma Agraria	Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	Reviu Peraturan Perundangan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Tersedianya informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy)	34 provinsi	1.773	Reforma Agraria	Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	Reviu Peraturan Perundangan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria	34 Provinsi
4	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				6.715,0				
		Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan untuk dapat dikendalikan dalam rangka ketahanan energi				Kedaulatan Energi	Penyediaan Energi Primer	Pengendalian Produksi Batubara	
			Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	1.124	Kedaulatan Energi	Penyediaan Energi Primer	Pengendalian Produksi Batubara	34 Provinsi
		Pembentukan unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi				Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	
			Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	100 KPH	1.874	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	Sumbar (KPHL Unit VII), Sumut (KPHL Unit XIII, KPHP Unit V, KPHP Unit VI, KPHL Unit VII, KPHL Unit VIII, KPHL Unit X, KPHP Unit XI, KPHL Unit XXX), Sumsel (KPHL Unit X, KPHL Unit XI, KPHP Unit VIII, KPHL Unit IX), Kalbar (KPHP Unit II, KPHP Unit V, KPHP Unit VI, KPHP Unit VII, KPHP Unit XIV, KPHP Unit XI, KPHP Unit XXI, KPHP Unit XXIX), Kaltim (KPHP Unit XIII, KPHP Unit XIV), Kaltara (KPHP Unit XIII, KPHP Unit XIV), Kalsel (KPHP Unit II, KPHP Unit X), Malut (KPHL Unit II, KPHP Unit V, KPHL Unit VI, KPHP Unit VII, KPHP Unit VIII), Sulut (KPHP Unit I, KPHP Unit II, KPHP Unit III), Sulbar (KPHL Unit III, KPHL Unit I), Sulse (KPHL Unit III, KPHL Unit II, KPHL Unit IV), NTB (KPHL Unit VII, KPHL Unit XII, KPHL Unit VI, KPHL Unit XIX), Maluku

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									(KPHP Unit VI, KPHP Unit XI, KPHP Unit XVII, KPHP Unit XXI, KPHL Unit XIII), Papua (KPHP Unit LV, KPHL Unit XXXII, KPHP Unit V, KPHL Unit XXXIII, KPHL Unit XII, KPHP Unit XIV, KPHL Unit XL, KPHL Unit XLI, KPHP Unit XXIV, KPHP Unit XXVII, KPHP XXX, KPHP Unit XVI, KPHL Unit I), Kep. Riau (KPHP Unit VI), Jambi (KPHP Unit III, KPHP Unit IV, KPHP Unit V, KPHP Unit XI), Kep. Bangka Belitung (KPHL Unit VII), NTT (KPHP Unit XIII), Sulteng (KPHL Unit VIII, KPHL Unit X, KPHL Unit XIII, KPHL Unit XVI), Papua Barat (KPHP Unit XVII, KPHP Unit XIV, KPHP Unit IX, KPHP Unit XIX, KPHP Unit XXI), Riau (KPHP Unit XXVI, KPHL Unit XVI, KPHP Unit VIII, KPHP Unit X, KPHP Unit XVII, KPHP Unit XIII), Lampung (KPHP Unit XIV), Kalteng (KPHP Unit VI, KPHP Unit I, KPHP Unit VIII, KPHP Unit XIX, KPHP Unit XV, KPHP Unit XIII, KPHP Unit XX, KPHP Unit XII), Sultra (KPHL Unit XIII, KPHL Unit XVIII, KPHP Unit V, KPHL Unit IV, KPHP Unit XV)
			Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	100 KPH	1.000	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	Sumbar (KPHL Unit VII), Sumut (KPHL Unit XIII, KPHP Unit V, KPHP Unit VI, KPHL Unit VII, KPHL Unit VIII, KPHL Unit X, KPHP Unit XI, KPHL Unit XXX), Sumsel (KPHL Unit X, KPHL Unit XI, KPHP Unit VIII, KPHL Unit IX), Kalbar (KPHP Unit II, KPHP Unit V, KPHP Unit VI, KPHP Unit VII, KPHP Unit XIV, KPHP Unit XI, KPHP Unit XXI, KPHP Unit XXIX), Kaltim (KPHP Unit XIII, KPHP Unit XIV), Kaltara (KPHP Unit XIII, KPHP Unit XIV), Kalsel (KPHP Unit II, KPHP Unit X), Maluku (KPHL Unit II, KPHP Unit V, KPHL Unit VI, KPHP Unit VII, KPHP Unit VIII), Sulut (KPHP Unit I, KPHP Unit II, KPHP Unit III), Sulbar (KPHL Unit III, KPHL Unit I), Sulsel (KPHL Unit III, KPHL Unit II, KPHL Unit IV), NTB (KPHL Unit VII, KPHL Unit XII, KPHL Unit VI, KPHL Unit XIX), Maluku (KPHP Unit VI, KPHP Unit XI, KPHP Unit XVII, KPHP Unit XXI, KPHL Unit XIII), Papua (KPHP Unit LV, KPHL Unit XXXII, KPHP Unit V, KPHL Unit XXXIII, KPHL Unit XII, KPHP Unit XIV, KPHL Unit XL, KPHL Unit XLI, KPHP Unit XXIV, KPHP

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Unit XXVII, KPHP XXX, KPHP Unit XVI, KPHL Unit I), Kep. Riau (KPHP Unit VI), Jambi (KPHP Unit III, KPHP Unit IV, KPHP Unit V, KPHP Unit XI), Kep. Bangka Belitung (KPHL Unit VII), NTT (KPHP Unit XIII), Sulteng (KPHL Unit VIII, KPHL Unit X, KPHL Unit XIII, KPHL Unit XVI), Papua Barat (KPHP Unit XVII, KPHP Unit XIV, KPHP Unit IX, KPHP Unit XIX, KPHP Unit XXI), Riau (KPHP Unit XXVI, KPHL Unit XVI, KPHP Unit VIII, KPHP Unit X, KPHP Unit XVII, KPHP Unit XIII), Lampung (KPHP Unit XIV), Kalteng (KPHP Unit VI, KPHP Unit I, KPHP Unit VIII, KPHP Unit XIX, KPHP Unit XV, KPHP Unit XIII, KPHP Unit XX, KPHP Unit XII), Sultra (KPHL Unit XIII, KPHL Unit XVIII, KPHP Unit V, KPHL Unit IV, KPHP Unit XV)
			Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Provinsi	500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
			Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP, RKTk	100 KPH dan 34 Provinsi	875,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan							
			Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen (datin pemanfataa tan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)	1.342,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusat (Jakarta), IKK baru

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
5	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor				3.550,0				
		Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	
			Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir yang tereview kelayakan dan terjamin kualitasnya	800,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel
		Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas							
			Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	10 KLHS	350	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah ; Kabupaten/Kota : Kab. Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Bandung Barat
			Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun	15 KLHS	350	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusat (RTRW Nasional, RTRW Jabodetabekpunjur) ; Provinsi (RPJMD Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTT, Bali, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten)
		Tersusunnya RPPLH Nasional, dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD							
			Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional, 1 Dokumen review 5 Tahunan)	1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional	250	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusat (Jakarta)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Provinsi)	5 RPPLH	250	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Kalimantan (Kalteng, Kalsel, Kaltara, Kalbar) Sumatera (Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau)
			Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	8 RPPLH	250	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Kota Bandar Lampung, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bukittinggi, Kab. Limapuluh Kota, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kab. Pekanbaru, Kota Payakumbuh, Kota Medan, Kota Batam, Kota Pangkal Pinang
			Jumlah Penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada ekoregion	1 indeks DD DT Nasional	450	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Nasional/Pusat (Jakarta)
			Jumlah satuan peta ekoregion	10 satuan peta ekoregion Jawa dan 15 satuan peta ekoregion Bali, Nusra.	300	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jawa (Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Magelang) Bali (Kab. Tabanan), Nusra Tenggara (kab. Sumbawa)
		Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau nasional dan Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional							
			Draft Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Draft NSDA LH dan PDRB Hijau Nasional	550	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Nasional (34 provinsi)
6	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan				3.300				
		Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan							

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	50 Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, 1 Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan secara Online	1.000	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Nasional/Pusat (Jakarta)
			Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro di Kawasan Lindung, 1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial, penilaian audit lingkungan 100%	1.200	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Nasional/Pusat (Jakarta)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	50 Lembaga/ Instansi, 1 Sistem Pengawasan dan Pembinaan Kinerja KPA AMDAL Daerah dan LPJP	1.350				Nasional/Pusat (Jakarta)
7	Pemantapan Kawasan Hutan				94.600,0				
		Penyiapan Prakondisi Pembangunan melalui Pemantapan Kawasan Hutan				Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	
			Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan sepanjang 9.010 km	4.000 km	70.600	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	Aceh: Bener Meriah, Aceh Tengah, Sumatera Utara: Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Toba Samosir, Riau: Indragiri, Pelalawan, Rokan Ilir, Kepulauan Riau: Lingga, Bangka Belitung : Bangka Barat, Bangka dan Belitung, Sumatera Selatan: Musi Banyuasin dan Musi Rawas, Lampung, Kalimantan Barat: Sintang, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kayong Utara, Sambas, Kub Raya, Kalimantan Tengah: Kotawaringin Timur, Lamandau, Gunung Mas, Kalimantan Selatan: Kota baru, Tanah Laut, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara: Berau, Kukar, Kutim, Mahakam Ulu, Sulawesi Utara: Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan, Gorontalo : Gorontalo, Sulawesi Tengah: Banggai Laut, Bangkep, Morowali, Morowali Utara, Sigli, Buol, Sulawesi Selatan: Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Wajo, Gowa, Bone, Sinjai, Sulawesi Barat: Mamuju Utara, Majene, Sulawesi Tenggara : Bombana, Maluku: Seram Bagian Barat, Tual, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Maluku Utara:

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Halmahera Barat, Morotai, Halmahera Timur, Papua, Papua Barat : Peg. Arfak, Manokwari selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fak fak, Kaimana, NTT : Manggarai Barat, Malaka, Ende, Rote Ndao, NTB : Sumbawa Barat, Jawa
			Jumlah klaster yang telah diinventarisasi sumber daya hutannya sebanyak 545 klaster	100	6.000	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan perdesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	Aceh: Aceh Jaya, Pidie, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Sumatera Utara: Asahan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Dairi, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Simalungun, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Toba Samosir, Riau: Dumai, Keantan Sengigi, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Riau: Karimun, Batam, Lingga, Jambi: Bungo, Merangin, Muaro Jambi, TanjabTim, Bangka Belitung, Sumatera Selatan: Muara Enim, OKU dan OKU Selatan , Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat: Melawi, Sintang, Kalimantan Tengah: Seruyan, Gunung Mas, Murung Raya, Kalimantan Selatan: Balangan, Banjar, Hulu Sungai, Tengah, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara: Kukar, Tana Paser, Kubar, Kutim, Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau, Sulawesi Utara: Bolmut, Bolmong, Boltim dan Bolsel , Gorontalo : Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, Sulawesi Tengah: Tojo Una Una, Banggai, Morowali Utara, Sulawesi Selatan; Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Sulawesi Barat : Mamuju, Sulawesi Tenggara : Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Buton, Kendari, Konawe Utara, Maluku: Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Buru, Buru Selatan, Kep. Aru, Maluku Utara: Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Papua , Papua Barat : Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Sorong, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Maybrat, NTT : Manggarai, Manggarai Barat, Sikka, Manggarai Timur, Lembata,

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Flotim, Alor, Kupang, Timor Tengah Utara, NTB ,Jawa
		Penyiapan Prakondisi Pembangunan melalui Pemantapan Kawasan Hutan				Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan kemitraan dengan KPH	
			Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan	40	18.000,0	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan kemitraan dengan KPH	Sumbar (KPHL Unit VII), Sumut (KPHL Unit XIII, Unit V), Sumsel (KPHP Unit XIX, KPHP Unit XX), Kalbar (KPHP Unit VIII, KPHL Unit XIII), Kaltim (KPHL Unit I, KPHL Unit II), Kalsel (KPHP Unit X), Malut (KPHP Unit XVI), Sulbar (KPHL Unit III, KPHL Unit I), Sulsel (KPHL Unit II, KPHL Unit IV), NTB (KPHL Unit VII, KPHL Unit XII), Maluku (KPHP Unit VI, KPHP Unit XI), Papua (KPHL Unit II, KPHP Unit LI), Kep. Riau (KPHP Unit VI), Jambi (KPHP Unit XII, KPHP Unit XIII), NTT (KPHP Unit XIII), Gorontalo (KPHP Unit I), Sulteng (KPHL Unit VIII, KPHL Unit XVI), Papua Barat (KPHP Unit IX, KPHP Unit XIX, KPHP Unit XXI), Aceh (KPHL Unit I), Riau (KPHP Unit XXVI, KPHP Unit VIII, KPHP Unit X), Lampung (KPHP Unit XIV), Kalteng (KPHP Unit XXXI), Sultra (KPHL Unit XIII, KPHP Unit V, KPHL Unit IV)
VIII	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM				309.901,0				
1	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup				14.150,0				
		Meningkatnya kapasitas Kader Lingkungan Hidup				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah kader lingkungan hidup yang dilatih meningkat kapasitasnya	600 orang	800,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	DAS Berantas, DAS Siak, DAS Way Sekampung
		Terwujudnya sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan				Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	
			Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan	500 sekolah/kampus	2.550,0	Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	34 Provinsi (di desa)
		Meningkatnya kapasitas generasi/masyarakat di bidang teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	
			Jumlah generasi/masyarakat di bidang teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilatih	480 orang	900,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	DAS Ciliwung, DAS Bengawan Solo, DAS Serayu, KPH (RPHJP) Lampung, NTB, Yogyakarta
			Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH	1.000 orang	9.900,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
2	Peningkatan Penyuluhan				9.200,0				
		Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat				Antar Kelompok Pendapatan	Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil	Koperasi dan Kemitraan Usaha	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah kelas kelompok tani hutan meningkat dari pemula ke madya melalui penilaian kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha	450 unit Kelompok Tani Hutan	2.691,0	Antar Kelompok Pendapatan	Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil	Koperasi dan Kemitraan Usaha	33 Provinsi
			Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk	10 Unit Koperasi	733,0	Antar Kelompok Pendapatan	Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil	Koperasi dan Kemitraan Usaha	Sulsel, NTB, Lampung, Jabar, DIY, Jatim, Jateng, Bengkulu, Kalsel, Sumbar
		Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS).				Antar Kelompok Pendapatan	Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil	Keterampilan Usaha	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS).	10 unit	643,0	Antar Kelompok Pendapatan	Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil	Keterampilan Usaha	Aceh, Lampung, Bali, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Kalbar
		Meningkatnya pendampingan masyarakat desa dalam pengelolaan SDA dan LH				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan berbasis kemitraan dengan KPH	
		Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	
			Jumlah tenaga pendamping handal dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	300 orang	5.133,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	33 Provinsi
3	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM LHK				128.730,0				
		Peningkatan Kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK				Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat	3.000 orang	22.013,0	Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	Wilayah layanan Pusdiklat dan 7 Balai Diklat LHK (BDLHK Bogor, BDLHK Kadipaten, BDLHK Pekanbaru, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Samarinda, BDLHK Kupang, BDLHK Makassar)
			Terwujudnya lulusan pendidikan karyasiswa S2 dan S3 bagi SDM LHK	85 lulusan (tidak ada rekrutmen baru tahun 2017, pembiayaan untuk rekrutmen tahun sebelumnya)	2.569,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusdiklat SDM LHK
		Meningkatnya kapasitas tenaga bakti rimbawan				Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	
			Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya	100 orang	600,0	Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	Wilayah Pelayanan BDLHK Pekanbaru, BDLHK Bogor dan BDLHK Makassar
		Terwujudnya tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan di desa hutan meningkat							
			Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat	300 orang	103.548,0	Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	
4	Perencanaan dan Pengembangan SDM				41.787,0				
		Penyediaan tenaga bakti rimbawan dalam operasionalisasi KPH				Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	
			Jumlah tenaga bakti rimbawan	700 orang (100 orang rekrutmen baru)	35.032	Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	109 KPHP, 120 KPHL, 100 KPHK
			Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	500 orang	6.775	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	20 Provinsi
5	Pendidikan menengah kejuruan kehutanan				85.200,0				
		Penyediaan tenaga teknis menengah kejuruan				Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Lingkungan satuan pendidikan yang bersih, sehat, ramah dan bebas kekerasan	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	420 orang	85.200,0	Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Lingkungan satuan pendidikan yang bersih, sehat, ramah dan bebas kekerasan	SMKKN Kadipaten, SMKKN Pekanbaru, SMKKN Makassar, SMKKN Samarinda, SMKKN Manokwari
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM								
		Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi							
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A)	82 poin	30.834,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
IX	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan				159.973,0				
1	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial				36.000,0				
		Meningkatnya luas pemanfaatan lahan di bawah tegakan				Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan	
			Luas pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry pada kegiatan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat	10.000 Ha (setara 30 ribu ton padi dan pangan lainnya)	3.000,0	Kedaulatan Pangan	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan	Seluruh provinsi dengan prioritas : Bengkulu (Rejang Lebong), Lampung (Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Pringsewu), Jawa Barat (Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Bogor, Purwakarta, Subang, Majalengka, Kuningan, Sumedang), Jawa Tengah (Wonogiri, Karanganyar), Jawa Timur (Malang, Magetan, Ngawi) DIY (Kulon Progo, Gn. Kidul), NTB (Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara), NTT (Timor Tengah Utara, Sikka), Sulawesi Selatan (Jeneponto, Bulukumba, Sidrap, Bone), Sultra (Konawe Selatan), Sulteng (Poso), Kalimantan Selatan (Tabalong, Hulu Sungai Selatan), Kalimantan Timur (Balikpapan), Maluku (Maluku Tengah)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Pemberian akses masyarakat desa untuk mengelola hutan berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan pedesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	
			Luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKM, HD, HTR dan kemitraan	330.000 ha	33.000,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan pedesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	Seluruh Provinsi kecuali DKI Jakarta
2	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat				33.350,0				
		Meningkatnya kemampuan kelola kawasan perhutanan sosial				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan kemitraan dengan KPH	
			Jumlah kelompok perhutanan sosial (Hkm,HD,HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) yang meningkat kemampuannya dalam kelola kawasan perhutanan sosial	200 kelompok	4.900,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan kemitraan dengan KPH	Seluruh Provinsi kecuali DKI Jakarta
		Pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penyediaan kelembagaan dan pembiayaan pelaksanaan perhutanan sosial	
			Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial (Hkm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) yang mandiri	340 unit usaha	8.500,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penyediaan kelembagaan dan pembiayaan pelaksanaan perhutanan sosial	Seluruh Provinsi kecuali DKI Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Pemberian alat ekonomi produktif kelompok perhutanan sosial				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penyediaan kelembagaan dan pembiayaan pelaksanaan perhutanan sosial	
			Jumlah alat ekonomi produktif perhutanan sosial (Hkm,HD,HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan)	190 unit	18.800,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penyediaan kelembagaan dan pembiayaan pelaksanaan perhutanan sosial	Seluruh Provinsi kecuali DKI Jakarta
		Meningkatnya produksi kokon sutra alam dalam rangka menunjang bahan baku industri kain sutra				Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
			Jumlah produksi kokon sutra alam meningkat dalam rangka menunjang bahan baku industri kain sutra	0,5%	1.350,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara
3	Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat				9.950,0				
		Perilaku peduli lingkungan masyarakat pada kawasan DAS, Danau/Mata Air, Karst, Rawa, Gambut, Pesisir, Laut, & Pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri & pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi meningkat				Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	
			Jumlah komunitas penyelamat SDA & Lingkungan pada kawasan DAS, Danau/Mata Air, Karst, Rawa, Gambut, Pesisir, Laut, & Pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri & pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan	382 Komunitas	5.500,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	Seluruh Provinsi dengan Prioritas : Riau, Sumbar, Sumsel, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, di 15 DAS dan Danau Prioritas

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Meningkatnya dukungan/bantuan teknis sarpras kepada penerima penghargaan kalpataru untuk melakukan kegiatan PPLHK di daerah sekitarnya				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	
			Jumlah penerima penghargaan kalpataru yang melaksanakan kegiatan PPLHK di daerah sekitarnya (replikasi kegiatan) meningkat	10 orang	1.350,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	Seluruh Provinsi
		Meningkatnya jumlah gerakan aksi Kader Konservasi, Kelompok Pencinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat /Kelompok Profesi (KSM/KP), jejaring/mitra, kanal komunikasi lingkungan dan Kepanduan yang berstatus aktif dalam pengelolaan SDA dan lingkungan berkelanjutan				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	
			Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP), jejaring/mitra, kanal komunikasi lingkungan dan kepanduan yang berstatus aktif dalam pengelolaan SDA dan lingkungan berkelanjutan	400 orang	1.000,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna	Seluruh Provinsi
		Pembentukan jejaring dan mitra (ormas, dunia usaha, perguruan tinggi, legislator melalui kaukus LHK dan lembaga lain)							

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah unit jejaring dan mitra (ormas, dunia usaha, perguruan tinggi, legislator melalui kaukus LHK dan lembaga lain) membangun komunitas penyelamatan SDA dan ekosistem serta LHK	20 jejaring dan mitra	1.000,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Pembentukan kanal komunikasi untuk meningkatkan akses informasi dan aspirasi masyarakat							
			Jumlah unit kanal komunikasi untuk meningkatkan akses informasi dan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan	10 kanal komunikasi	700,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
		Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikembangkan melalui kemitraan/kerjasama pemerintah swasta dengan format baru CSR							
			Luas kawasan hutan yang dikembangkan melalui kemitraan/kerjasama pemerintah swasta dengan format baru CSR	200.000 Ha	400,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
4	Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat				11.000,0				
		Penanganan konflik tenurial masyarakat di kawasan hutan				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan pedesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	
			Luas hutan yang bebas konflik tenurial	270000 ha	9.4600,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Penataan ruang kawasan pedesaan, penetapan dan pengelolaan SDA (hutan, pertanian, perikanan)	Seluruh Provinsi kecuali DKI Jakarta dengan prioritas : Jambi, Riau, Sumsel, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur
		Seluruh hutan adat diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat							

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Seluruh hutan adat diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat	25%	1.540,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan								
		Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PSKL	SAKIP Ditjen PSL dengan nilai minimal 78,00 (A) tahun 2019	74 poin	69.473,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
X	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan				241.841,0				
1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan				121.067,9				
		Meningkatnya keamanan terhadap gangguan dan ancaman Lingkungan Hidup dan Kehutanan				Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Budaya Hukum	
			Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	500.000 ha		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Budaya Hukum	KPHP, KPHL, KPHK dan TN
			Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	5 provinsi		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Budaya Hukum	KPHP, KPHL, KPHK dan TN
		Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Polhut dan SPORC				Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum	
			Jumlah polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	1000 orang		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum	KPHP, KPHL, KPHK dan TN di 34 Prop
2	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				8.763,7				
		Optimalisasi upaya penyelesaian sengketa bidang LHK				Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat	
			Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal sebanyak 10 gugatan per tahun	10 gugatan		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat	Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Jawa Barat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Presentase Kasus Sengketa yang diselesaikan diluar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	75%		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Sistem Peradilan Perdana yang Mudah dan Cepat	Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Utara
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				21.076,3				
		Optimalisasi upaya penanganan pengaduan, pengawasan izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU dan ketaatan terhadap sanksi administrasi				Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Budaya Hukum	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	50%		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Budaya Hukum	150 Pos Pengaduan
			Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH	20% izin diterbitkan		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Budaya Hukum	31 Provinsi
			Persentase sanksi administrasi yang ditaat oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat tiap tahun	70% dari 400 perusahaan		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Budaya Hukum	Jawa Barat, JawaTimur, Banten, DIY, DKI, Jambi, NTB, NTT, Riau, Kaltim, Kalbar, Kalut, Kalteng, Kalsel, Sulut, Maluku, Papua, Sumut, SumbarSulsel
		Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana PPLH				Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum	
			Jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	50 pplh	500,0	Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum	Medan, Surabaya, Samarinda, Makassar, Manokwari
			Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum	20 pplh	1.000,0	Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum	Medan, Surabaya, Samarinda, Makassar, Manokwari
4	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan				39.497				
		Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara profesional				Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidanan Pencucian Uang	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Presentase Kasus Pidana LHK yang diselesaikan (P21)	20%		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidanan Pencucian Uang	7 Prop Kebakaran,KPHK, KPHL, TN, Surabaya, Banten, Jawa Barat, Makasar, Samarinda, Jawa Tengah
			Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan	20 kasus		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidanan Pencucian Uang	7 Prop Kebakaran,KPHK, KPHL, TN, Surabaya, Banten, Jawa Barat, Makasar, Samarinda, Jawa Tengah
			Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	100%		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidanan Pencucian Uang	7 Prop Kebakaran,KPHK, KPHL, TN, Surabaya, Banten, Jawa Barat, Makasar, Samarinda, Jawa Tengah
			Fasilitasi Penanganan Kasus	15 kasus		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
			Persentase pelaksanaan eksaminasi kasus tindak pidana LHK	20%		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidanan Pencucian Uang	Surabaya, Medan, DIY
		Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana PPNS				Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Budaya Hukum	
			Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang	300 orang		Kepastian, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Budaya Hukum	Medan, Surabaya, Samarinda, Makasar, Manokwari,
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum								
		Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Penegakan Hukum	SAKIP Ditjen Penegakan Hukum dengan nilai minimal 78,00 (A) tahun 2019	80	51.436,1	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
XI	Program Pengendalian Perubahan Iklim				424.590,0				
1	Adaptasi Perubahan Iklim				3.700,0				
		Terbangunnya Program Adaptasi pada desa/kelurahan rentan perubahan iklim untuk mendukung pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan pedesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim	10 Desa/ Kelurahan yang mengikuti Program Kampung Iklim	1.600,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	Lebak, Bekasi, Kapuas Hulu, Ketapang, Banyuasin, Cianjur, Banyumas, Lampung Barat
		Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 2 wilayah				Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Membangun ketahanan kota (urban resilience)	
			Jumlah kota yang mengembangkan adaptasi perubahan iklim (skenario iklim, downscaling perencanaan, dan adaptasi berbasis ekosistem)	2 Wilayah	1.900,0	Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Membangun ketahanan kota (urban resilience)	Kalimantan Barat, Riau
			Pengembangan dan Operasionalisasi SIDIK yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas	100%	200,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
2	Mitigasi Perubahan Iklim				3.050,0				
		Terpantaunya capaian penurunan emisi GRK dan penambahan stok karbon pada desa dengan potensi emisi GRK yang tinggi di bidang kehutanan dan lahan gambut				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	
			Jumlah desa yang dipantau capaian penurunan emisi GRK dan penambahan stok karbon di bidang kehutanan dan lahan gambut	10 Desa dengan potensi emisi GRK yang tinggi di bidang kehutanan dan lahan gambut	1.000,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	1. Prov. Sumsel (2 desa pada Kab. Musi Banyuasin); 2. Prov. Kalteng (2 desa pada Kab. Pulang Pisau); 3. Prov. NTB (2 desa pada Kab. Bima); 4. Prov. Sulawesi Barat (2 desa pada Kab. Mamuju); dan 5. Prov. Papua Barat (2 desa pada Kab. Sorong)
		Terpantaunya capaian penurunan emisi GRK pada kota dengan potensi penurunan emisi GRK yang tinggi di bidang pengelolaan limbah dan penurunan konsumsi bahan perusak ozon				Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Membangun ketahanan kota (urban resilience)	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah kota yang dipantau pencapaian penurunan emisi GRK di bidang pengelolaan limbah dan penurunan konsumsi bahan perusak ozon	15 Kota dengan potensi penurunan emisi GRK yang tinggi di bidang pengelolaan limbah dan penurunan konsumsi bahan perusak ozon	1.250,0	Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Membangun ketahanan kota (urban resilience)	1. Prov. Sumut (Medan); 2. Prov. Kepri (Batam); 3. DKI Jakarta (DKI Jaya);,; 4. Prov. Banten (Tangerang); 5. Jawa Barat (Depok, Bekasi, Bogor, Bandung); 6. Prov. Jawa Tengah (Semarang); 7. Prov. Jatim (Surabaya, Malang); 8. Prov. Kaltim (Balikpapan); 7. Prov. Sulsel (Makassar); 8. Prov. Sultra (Kendari); 9. Prov. Sulut (Bitung)
		Turunnya konsumsi bahan perusak ozon	Persentase tingkat penurunan konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC	5%	800,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
3	Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi				3.550,0				
		Ketersediaan data/informasi sumber, tingkat dan kecenderungan emisi dan serapan GRK, serta informasi verifikasi aksi mitigasi				Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Membangun ketahanan kota (urban resilience)	
			Tersedianya sistem inventarisasi gas rumah kaca (SIGN SMART) dan termutakhirkan, serta jumlah bidang mitigasi yang ter MRV dan ter Registry	15 Kab/ Kota	1.900,0	Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Membangun ketahanan kota (urban resilience)	Semarang, Makassar, Surabaya, Bandung, Jakarta, Tangerang, Surakarta, Palangkaraya, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Kendari, Palu, Ternate
			Jumlah bidang mitigasi yang ter Measurement, Reporting and Verification (MRV)	5 bidang	1.100,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
			Jumlah bidang aksi mitigasi yang terdaftar dalam Sistem Registry Nasional	5 bidang	550,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
4	Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim				2.700,0				
		Terselenggaranya dukungan pendanaan dan/atau peningkatan kapasitas dan/atau teknologi terkait perubahan iklim				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan pedesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah desa/kelurahan yang rentan perubahan iklim yang menerima dukungan pendanaan dan/atau peningkatan kapasitas dan/atau teknologi terkait perubahan iklim	10 Desa/ Kelurahan	100,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	
		Terselenggaranya dukungan pengembangan rencana aksi adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim				Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Membangun ketahanan kota (urban resilience)	
			Jumlah wilayah yang difasilitasi dalam pengembangan rencana aksi adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi dan terukur	2 Kota	1.700,0	Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Membangun ketahanan kota (urban resilience)	
		Terlaksananya peran National Focal Point (NFP)							
			Jumlah perjanjian dan forum internasional yang dikoordinasikan	7 perjanjian dan forum	900,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
5	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan				350.000,0				
		Menurunnya luas areal terbakar pada hutan/lahan gambut dan non gambut (mineral) di Pulau Sumatera dan Kalimantan				Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	
			Persentase penurunan luas kebakaran pada hutan/ lahan gambut dan non gambut (mineral) tahun 2017 di Pulau Sumatera dan Kalimantan sebesar 10% dari batas toleransi maksimum luas kebakaran lahan gambut dan non gambut (tanah mineral)	10%	253.152,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	Regional Sumatera: Riau 127 Desa, Jambi 102 Desa, Sumsel 61 Desa. Regional Kalimantan: Kalbar 193 Desa, Kalteng 65 Desa, Kaltim 90 Desa, Kalsel 41 Desa, Kaltara 52 Desa. KPH: 69 KPH Daops: 34 Daops UPT PPI: 2 Balai PPI
		Menurunnya luas areal terbakar pada hutan/lahan gambut dan non gambut (mineral) di luar Pulau Sumatera dan Kalimantan				Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Persentase penurunan luas kebakaran pada hutan/ lahan gambut dan non gambut (tanah mineral) tahun 2017 di Luar Pulau Sumatera dan Kalimantan sebesar 10% dari batas toleransi maksimum luas kebakaran lahan gambut dan non gambut (tanah mineral)	10%	5.620,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	Regional Jawa Bali Nusra: Bali 5 Desa, Banten 5 Desa, DIY 2 Desa, NTB 10 Desa, NTT 15 Desa, Jabar 10 Desa, Jateng 10 Desa, Jatim 10 Desa. Regional Sulawesi Maluku: Maluku 10 Desa, Maluku Utara 10 Desa, Sulbar 5 Desa, Sulsel 5 Desa, Sulteng: 5 Desa, Sultra 5 Desa, Sulut 5 Desa, Gorontalo 10 Desa. Regional Papua: Papua 15 Desa, Papua Barat 10 Desa Daops: 3 Daops KPH: 15 KPH UPT PPI: 3 Balai PPI
		Berkurangnya hari status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan				Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	
			Jumlah hari status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan berkurang sebanyak 30% dari tahun sebelumnya	30%	91.228,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	Regional Sumatera: Riau, Jambi, Sulsel Regional Kalimantan: Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel Regional Papua: Papua
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KLHK Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim								
		Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI							
			SAKIP Ditjen PPI dengan nilai minimal 78 (A) di tahun 2019	74	61.590,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	
7	Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan								
		Menurunnya luas areal terbakar pada hutan/lahan gambut dan non gambut (mineral)							
			Persentase penurunan luas kebakaran pada hutan/lahan gambut dan non gambut (tanah mineral) tahun 2017 dari batas toleransi maksimum luas kebakaran lahan gambut dan non gambut (tanah mineral)	10%	104.453,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terselenggaranya koordinasi dan / atau pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta inventarisasi gas rumah kaca							
			Jumlah wilayah yang dikoordinasikan dan / atau pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta inventarisasi gas rumah kaca	5 wilayah	1.500,0	Non Prioritas			
XII	Program Pengelolaan, Sampah, Limbah, dan B3				129.510,0				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				35.520				
		Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PSLB3							
			Nilai SAKIP Ditjen PSLB3 minimal 78	74	35.520				
2	Pengelolaan Sampah				42.190,0				
		Pengurangan timbulan sampah pada sumbernya melalui bank sampah				Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air	
			Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan 100 bank sampah dengan kapasitas 1 ton/hari	9.125 ton (25 Bank Sampah pada 3 DAS Prioritas)	3.750,0	Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air	100 Bank Sampah pada 3 DAS Prioritas (Citarum, Cisadane dan Ciliwung)
		Pengurangan timbulan sampah pada sumbernya melalui bank sampah				Pembangunan Kesehatan	Penguatan promotif dan preventif: "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	
			Jumlah sampah yang berkurang melalui penerapan EPR oleh produsen dan retail di 73 kota sebesar 60 ton	50 ton (23 kota lama + 20 kota baru)	4.000,0	Pembangunan Kesehatan	Penguatan promotif dan preventif: "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	23 kota lama + 50 kota baru
		Pengurangan timbulan sampah pada sumbernya melalui bank sampah				Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	
			Jumlah sampah di destinasi wisata berkurang melalui 5 pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 10 ton/hari	9.125 ton (5 PDU kapasitas 5 ton/hari)	6.000,0	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyiapan Daya Tarik Wisata	10 ton/hari : (di destinasi wisata) Toba, Kep. Seribu, Borobudur, Tj Lesung dan Wakatobi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Terwujudnya kota bersih, teduh dan sehat berkelanjutan				Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana	Green Waste	
			Jumlah sampah yang ditangani di 360 kota melalui pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat berkelanjutan (Adipura)	14.955.644 ton	12.000,0	Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana	Green Waste	360 kota
		Pengurangan jumlah timbulan sampah pada sumbernya				Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana	Penataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang dan Kegiatan Perkotaan yang efisien dan Berkeadilan	
			Jumlah sampah berkurang melalui kegiatan terpadu dengan pertanian perkotaan (urban farming) kapasitas 0,5 ton/hari	1.825 ton (10 kota Metropolitan dan Besar)	7.500,0	Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana	Penataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang dan Kegiatan Perkotaan yang efisien dan Berkeadilan	29 Kota Metropolitan dan Besar
		Pengurangan jumlah sampah melalui peningkatan peran dan partisipasi kelompok masyarakat dan komunitas lingkungan dalam pengelolaan sampah dan kota hijau							
			Jumlah komunitas dan kelompok masyarakat yang ditingkatkan peran, partisipasi, dan inovasinya dalam pengelolaan sampah dan kota hijau	50 komunitas	2.500	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Makassar, Surabaya, Balikpapan, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Palembang
		Pengurangan jumlah sampah melalui penerapan peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah							
			Tersedianya Rancangan Permen LHK tentang Peta Jalan Kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	1 Rapermen LHK	500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta
		Tertanganinya jumlah sampah melalui teknologi pengolahan sampah menjadi sumber daya (waste to resource)							

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Tersusunnya kajian Studi Kelayakan (Feasibility Study/ FS) dan Detailed Engineering Design penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi pada kota metropolitan atau besar	1 paket dokumen FS dan DED	500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Kota Depok
		Pengurangan jumlah sampah pada sumbernya di lokasi Taman Nasional sebagai destinasi wisata nasional							
			Jumlah sampah di Taman Nasional sebagai destinasi wisata berkurang melalui 7 pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 1 ton/hari	2.555 ton	5.440	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	TN Rinjani, Tambora, Bromo Tengger, P. Komodo, Kerinci Seblat, Gn. Salak, dan Bukit Barisan Selatan
3	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun				13.500,0				
		Penghapusan penggunaan merkuri di lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil				Pembangunan Kesehatan	Penguatan promotif dan preventif: "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	
			Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non merkuri di 3 lokasi PESK	Zero merkuri	12.000,0	Pembangunan Kesehatan	Penguatan promotif dan preventif: "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	3 lokasi, Banyumas, Lebak dan Pacitan
		Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3							
			1500 registrasi B3, 20 notifikasi B3, dan 75 rekomendasi pengangkutan B3	Data registrasi B3 sebanyak 1500; notifikasi B3 20 dan rekomendasi pengangkutan 75	200,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	DKI Jakarta
			Peningkatan jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya sebesar 3 juta ton dari 200 jenis B3	1,8 juta ton dari 50 jenis B3 terkelola	400,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kep. Riau
			Tersedianya aplikasi sistem data informasi tata kelola B3 nasional yang aplikatif	1 sistem informasi tata kelola B3	300,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	DKI Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Terlaksananya penyusunan peraturan perundangan dan rencana aksi nasional pengelolaan B3	2 rancangan peraturan pengelolaan B3 dan 2 rancangan rencana aksi nasional	600,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	5 lokasi (DKI Jakarta, Pekanbaru, DIY, Denpasar)
4	Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3				13.300,0				
		Terkelolanya limbah medis di region Sulawesi				Pembangunan Kesehatan	Penguatan promotif dan preventif: "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	
			Jumlah rumah sakit yang memiliki kapasitas untuk mengelola limbah medis di region Sulawesi	1 Rumah Sakit	6.000,0	Pembangunan Kesehatan	Penguatan promotif dan preventif: "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	Provinsi Sulawesi Selatan (Makasar)
		Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 dan limbah Non B3 sebagai sumber energi				Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi	Pengembangan Bioenergi	
			Jumlah limbah B3 dan limbah Non B3 yang dimanfaatkan menjadi bahan bakar	50 ton	1.300,0	Kedaulatan Energi	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi	Pengembangan Bioenergi	Industri di 3 Kota Kab., Indramayu, Kab. Gresik, Kab. Bekasi
		Meningkatnya indeks kinerja pengelolaan limbah B3 industri menjadi baik							
			Jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 80% dari baseline 2014	400 industri di 34 provinsi	6.000,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	400 industri di 34 provinsi
5	Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3				7.000,0				
		Layanan perzinan Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan, Penimbunan Limbah B3 dan Dumping serta rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 untuk meningkatkan daya saing usaha.							

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Persentase penanganan layanan izin Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan, Penimbunan Limbah B3 dan Dumping serta rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.	400 izin dan rekomendasi	4.000				se-Indonesia
		Penyusunan peraturan, pedoman teknis, standar pelayanan (SOP) Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan, Penimbunan Limbah B3 dan Dumping serta sistem pelayanan.							
			Tersedianya peraturan, pedoman teknis, standar pelayanan (SOP) Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan, Penimbunan Limbah B3 dan Dumping	3 dokumen	1.000				skala nasional
		Pengendalian pencemaran pesisir dan laut dengan meningkatnya verifikasi dan pelayanan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3							
			Persentase penanganan kegiatan limbah lintas batas ilegal dan pembuangan limbah B3 ke laut ilegal	5.000	350,0				se-Indonesia
		Meningkatnya penerapan Indonesia National Single Windows (INSW) untuk limbah B3 dan Limbah Non B3				Peningkatan Ekspor Non Migas	Pengembangan Fasilitas Ekspor	Optimalisasi Penerapan Single Window untuk Proses Ekspor-Impor	
			Jumlah Eksport Limbah B3 dan Limbah Non B3 dapat dikendalikan	5 hari layanan dan 1 juta ton	2.000,0	Peningkatan Ekspor Non Migas	Pengembangan Fasilitas Ekspor	Optimalisasi Penerapan Single Window untuk Proses Ekspor-Impor	DKI Jakarta
		Meningkatnya Penerapan Konvensi Internasional	Terlaksananya implementasi kesepakatan Konvensi Basel dan tugas nasional focal point		650,0				
6	Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Berbahaya dan Beracun				18.000,0				

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Meningkatnya lahan terkontaminasi yang terpulihkan							
			Lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan oleh penanggung jawab usaha /kegiatan meningkat setiap tahun	100.000 ton	6.500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	seluruh provinsi di Indonesia (UU 32 tahun 2009 pasal 46, PP 101 tahun 2014)
		Meningkatnya lahan terkontaminasi yang terpulihkan				Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	
			Lahan terkontaminasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun	500 ton	9.000,0	Desa dan Kawasan Perdesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	2 lokasi Cinangka-Bogor, Tegal,
		Inventarisasi dan identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3							
			Tersedianya informasi dalam portal Sistem Informasi dan database lahan terkontaminasi LB3 di Indonesia	2 dokumen	500,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	seluruh provinsi di Indonesia (UU 32 tahun 2009 pasal 46, PP 101 tahun 2014)
			Tersedianya Peta /Mapping sebaran lahan terkontaminasi LB3 di Indonesia	1 fasilitas	1.000,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pulau Kalimantan
		Tersusunnya sistem Tanggap Darurat Limbah B3							
			Tersedianya, Data dan Informasi serta panduan teknis Tanggap Darurat Limbah B3	2500 ton	1.000,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta dan Pekanbaru
XIII	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan				1.310.102,0				
1	Pengendalian Pencemaran Udara				17.500,0				
		Meningkatnya penerapan green transportation				Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Green transportation	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah kota yang menerapkan green transportation meningkat dari tahun ke tahun	2 Kota	1.750,0	Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Green transportation	Makassar dan Manado
		Tersedianya status mutu udara perkotaan				Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan	
			jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien: yang beroperasi kontinyu (AQMS), yang beroperasi mudah, sederhana, dan menjangkau 500 kab/kota (passive sampler)	AQMS: 4 kota, Passive Sampler: 400 kab/kota	13.250,0	Perkotaan	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan	AQMS: Bandar Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Jayapura Passive Sampler: 400 kab/kota
		Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi				Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
			Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri	188 Industri	2.500,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Produktivitas dan Daya Saing Industri	Pengembangan Industri Hijau	350 Kab/Kota: Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Agam, Kab. Asahan, Kab. Badung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Banggai, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Banjar, Kab. Bantul, Kab. Banyuasin, Kab. Banyuwangi, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Batang, Kab. Batanghari, Kab. Batubara, Kab. Bau-Bau, Kab. Bekasi, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Bengkalis, Kab. Bengkayang, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Berau, Kab. Bintan, Kab. Bogor, Kab. Bojonegoro, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bombana, Kab. Bondowoso, Kab. Bone, Kab. Bone Bolango, Kab. Boyolali, Kab. Brebes, Kab. Buleleng, Kab. Bulukamba, Kab. Bulungan, Kab. Bungo, Kab. Buol, Kab. Buru, Kab. Buton Selatan, Kab. Cianjur, Kab. Cilacap, Kab. Cirebon, Kab. Deli Serdang, Kab. Dhamasraya, Kab. Dompu, Kab. Donggala, Kab. Fakfak, Kab. Garut, Kab. Gianyar, Kab. Gorontalo, Kab. Gowa, Kab. Gresik, Kab. Gunung Kidul, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab.

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									<p> Halmahera Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indramayu, Kab. Jember, Kab. Jembrana, Kab. Jeneponto, Kab. Jepara, Kab. Jombang, Kab. Kaimana, Kab. Kampar, Kab. Kapuas, Kab. Karanganyar, Kab. Karangasem, Kab. Karawang, Kab. Karimun, Kab. Karo, Kab. Katingan, Kab. Kaur, Kab. Kayong Utara, Kab. Kediri, Kab. Kendal, Kab. Kepahiang, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Seribu, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Kerinci, Kab. Ketapang, Kab. Klaten, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe Utara, Kab. Kotabaru, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Kubu Raya, Kab. Kudus, Kab. Kulon Progo, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Lahat, Kab. Lamandau, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Landak, Kab. Langkat, Kab. Lebak, Kab. Lebong, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Lumajang, Kab. Luwu, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Masiun, Kab. Magelang, Kab. Magetan, Kab. Majalengka, Kab. Majene, Kab. Malang, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Utara, Kab. Manokwari, Kab. Maros, Kab. Melawi, Kab. Mempawah, Kab. Merangin, Kab. Merauke, Kab. Mesuji, Kab. Metro, Kab. Mimika, Kab. Minahasa dan Kota Tomohon, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Mojokerto, Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara, Kab. Muara Enim, Kab. Muaro Jambi, Kab. Mukomuko, Kab. Muna, Kab. Murung Raya, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi </p>

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Rawas, Kab. Nagan Raya, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Nias, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pali, Kab. Pandeglang, Kab. Pangkep, Kab. Parigi Moutong, Kab. Pasaman Barat, Kab. Paser, Kab. Pasuruan, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Pelalawan, Kab. Pemalang, Kab. Pesawaran, Kab. Pinrang, Kab. Pohuwato, Kab. Ponorogo, Kab. Poso, Kab. Piringsewu, Kab. Probolinggo, Kab. Purbalingga, Kab. Purwakarta, Kab. Rembang, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Sambas, Kab. Sampang, Kab. Sanggau, Kab. Sangihe, Kab. Sarolangun, Kab. Sawahlunto, Kab. Sekadau, Kab. Seluma, Kab. Semarang, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Serang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Seruyan, Kab. Siak, Kab. Sidoarjo, Kab. Sidrap, Kab. Sijunjung, Kab. Simalungun, Kab. Singkawang, Kab. Singkel, Kab. Sintang, Kab. Situbondo, Kab. Sleman, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Sorong, Kab. Sragen, Kab. Subang, Kab. Sukabumi, Kab. Sukamara, Kab. Sukoharjo, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumedeng, Kab. Sumenep, Kab. Surabaya, Kab. Tabalong, Kab. Tabanan, Kab. Takalar, Kab. Tana Toraja, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Toraja, Kab. Tangerang, Kab. Tanggamus, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tanjun, Kab. Tebo, Kab. Tegal, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Tobassa, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Toli-Toli, Kab. Toraja Utara, Kab. Tuban, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Tulungagung, Kab. Wajo, Kab. Wakatobi, Kab. Way Kanan, Kab. Wonogiri, Kab. Minahasa Utara, Kota Ambon, Kota Balikpapan, Kota Banda Aceh, Kota Bandar Lampung, Kota Bandung, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kota Batam, Kota Bau-

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Bau, Kota Bekasi, Kota Belu, Kota Bengkulu, Kota Bima, Kota Binjai, Kota Bitung, Kota Bogor, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kota Cilegon, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Denpasar, Kota Depok, Kota Dumai, Kota Gorontalo, Kota Gresik, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Kajarta Utara, Kota Jambi, Kota Jayapura, Kota Kediri, Kota Kendari, Kota Kotamobagu, Kota Kupang, Kota Lhokseumawe, Kota Madiun, Kota Makassar, Kota Malang, Kota Manado, Kota Mataram, Kota Medan, Kota Metro, Kota Padang, Kota Pagar Alam, Kota Palangkaraya, Kota Palembang, Kota Palopo, Kota Palu, Kota Pangkal Pinang, Kota Pare Pare, Kota Pasuruan, Kota Pekalongan, Kota Pekabnaru, Kota Pematang Siantar, Kota Pontianak, Kota Prabumulih, Kota Sabang, Kota Salatiga, Kota Samarinda, Kota Sawah Lunto, Kota Semarang, Kota Sorong, Kota Sukabumi, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tarakan, Kota Tasikmalaya, Kota Tebing Tinggi, Kota Tegal, Kota Ternate, Kota Tomohon, Kota Tual, Kota Yogyakarta
2	Pengendalian Pencemaran Air				25.581,8				
		Meningkatnya sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal di Sungai Citarum, Cisdane, dan Ciliwung				Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	
			Jumlah sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal di Sungai Ciliwung	1 IPAL Komunal dan sarana sanitasi dasar umum	1.250,0	Pelayanan Kesehatan	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat	Sungai Ciliwung
		Menyediakan informasi data kualitas air sungai secara kontinyu				Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Jumlah sistem yang dibangun untuk memantau kualitas air secara kontinyu pada 3 sungai di 3 DAS Prioritas	6 Titik kontinyu monitoring di 3 sungai (sungai Citarum 2, Kapuas 2, Sekampung 2) sistem entry akses data berbasis web	6.000,0	Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	6 Titik kontinyu monitoring di 3 sungai (sungai Citarum 2 ttk, Kapuas 2 ttk, Sekampung 2 ttk) sistem entry akses data berbasis web
		Menetapkan alokasi beban pencemaran di 15 sungai di 15 DAS				Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	
			Ditetapkannya alokasi beban pencemaran di 3 sungai di 3 DAS Prioritas	2 sungai (siak, sekampung)	1.000,0	Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	2 sungai (siak, way sekampung)
		Meningkatnya kualitas air sungai dengan menurunkan beban pencemaran				Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	
			Terbangunnya 6 IPAL Domestik dan 6 IPAL USK di 6 sungai pada 6 DAS prioritas	Domestik : FS/DED di 3 DAS (sekampung, citarum, kapuas) USK : FS dan DED USK dan Non Poin di 3 sungai (sekampung, citarum, kapuas)	3.000,0	Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	Domestik : way sekampung, citarum, kapuas Usaha Skala Kecil : way sekampung, citarum, kapuas
		Perbaikan kualitas sungai melalui kegiatan Restorasi				Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	
			Kualitas air pada segmen sungai sepanjang 0.05 km yang melintas di permukiman meningkat	anak sungai cisadane (kali sabi) dan FS Serayu	6.331,0	Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)	anak sungai cisadane (kali sabi) dan FS Serayu
		Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah				Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah melalui Program PROPER sebesar 75% dari 2000 industri yang dipantau	600 industri	8.000,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Produktivitas dan Daya Saing Industri	Pengembangan Industri Hijau	350 Kab/Kota: Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Agam, Kab. Asahan, Kab. Badung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Banggai, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Banjar, Kab. Bantul, Kab. Banyuasin, Kab. Banyuwangi, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Batang, Kab. Batanghari, Kab. Batubara, Kab. Bau-Bau, Kab. Bekasi, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Berau, Kab. Bintan, Kab. Bogor, Kab. Bojonegoro, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bombana, Kab. Bondowoso, Kab. Bone, Kab. Bone Bolango, Kab. Boyolali, Kab. Brebes, Kab. Buleleng, Kab. Bulukamba, Kab. Bulungan, Kab. Bungo, Kab. Buol, Kab. Buru, Kab. Buton Selatan, Kab. Cianjur, Kab. Cilacap, Kab. Cirebon, Kab. Deli Serdang, Kab. Dhamasraya, Kab. Dompu, Kab. Donggala, Kab. Fakfak, Kab. Garut, Kab. Gianyar, Kab. Gorontalo, Kab. Gowa, Kab. Gresik, Kab. Gunung Kidul, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indramayu, Kab. Jember, Kab. Jembrana, Kab. Jenepono, Kab. Jepara, Kab. Jombang, Kab. Kaimana, Kab. Kampar, Kab. Kapuas, Kab. Karanganyar, Kab. Karangasem, Kab. Karawang, Kab. Karimun, Kab. Karo, Kab. Katingan, Kab. Kaur, Kab. Kayong Utara, Kab. Kediri, Kab. Kendal, Kab. Kepahiang, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Seribu, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Kerinci, Kab. Ketapang, Kab. Klaten, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe Utara, Kab. Kotabaru,

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Kubu Raya, Kab. Kudus, Kab. Kulon Progo, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Lahat, Kab. Lamandau, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Landak, Kab. Langkat, Kab. Lebak, Kab. Lebong, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Lumajang, Kab. Luwu, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Masiun, Kab. Magelang, Kab. Magetan, Kab. Majalengka, Kab. Majene, Kab. Malang, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Utara, Kab. Manokwari, Kab. Maros, Kab. Melawi, Kab. Mempawah, Kab. Merangin, Kab. Merauke, Kab. Mesuji, Kab. Metro, Kab. Mimika, Kab. Minahasa dan Kota Tomohon, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Mojokerto, Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara, Kab. Muara Enim, Kab. Muaro Jambi, Kab. Mukomuko, Kab. Muna, Kab. Murung Raya, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. Nagan Raya, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Nias, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pali, Kab. Pandeglang, Kab. Pangkep, Kab. Parigi Moutong, Kab. Pasaman Barat, Kab. Paser, Kab. Pasuruan, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Pelalawan, Kab. Pemalang, Kab. Pesawaran, Kab. Pinrang, Kab. Pohuwato, Kab. Ponorogo, Kab. Poso, Kab. Piringsewu, Kab. Probolinggo, Kab. Purbalingga, Kab. Purwakarta, Kab. Rembang, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Sambas, Kab. Sampang, Kab. Sanggau, Kab. Sangihe, Kab. Sarolangun, Kab. Sawahlunto, Kab. Sekadau, Kab.

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									<p>Seluma, Kab. Semarang, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Serang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Seruyan, Kab. Siak, Kab. Sidoarjo, Kab. Sidrap, Kab. Sijunjung, Kab. Simalungun, Kab. Singkawang, Kab. Singkel, Kab. Sintang, Kab. Situbondo, Kab. Sleman, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Sorong, Kab. Sragen, Kab. Subang, Kab. Sukabumi, Kab. Sukamara, Kab. Sukoharjo, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumedang, Kab. Sumenep, Kab. Surabaya, Kab. Tabalong, Kab. Tabanan, Kab. Takalar, Kab. Tana Toraja, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Toraja, Kab. Tangerang, Kab. Tanggamus, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tanjung, Kab. Tebo, Kab. Tegal, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Tobassa, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Toli-Toli, Kab. Toraja Utara, Kab. Tuban, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Tulungagung, Kab. Wajo, Kab. Wakatobi, Kab. Way Kanan, Kab. Wonogiri, Kab. Minahasa Utara, Kota Ambon, Kota Balikpapan, Kota Banda Aceh, Kota Bandar Lampung, Kota Bandung, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kota Batam, Kota Bau-Bau, Kota Bekasi, Kota Belu, Kota Bengkulu, Kota Bima, Kota Binjai, Kota Bitung, Kota Bogor, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kota Cilegon, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Denpasar, Kota Depok, Kota Dumai, Kota Gorontalo, Kota Gresik, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Kajarta Utara, Kota Jambi, Kota Jayapura, Kota Kediri, Kota Kendari, Kota Kotamobagu, Kota Kupang, Kota Lhokseumawe, Kota Madiun, Kota Makassar, Kota Malang, Kota Manado, Kota Mataram, Kota Medan, Kota Metro, Kota Padang, Kota Pagar Alam, Kota Palangkaraya, Kota Palembang, Kota Palopo, Kota Palu, Kota Pangkal Pinang, Kota Pare Pare, Kota Pasuruan, Kota Pekalongan, Kota</p>

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Pekabnaru, Kota Pematang Siantar, Kota Pontianak, Kota Prabumulih, Kota Sabang, Kota Salatiga, Kota Samarinda, Kota Sawah Lunto, Kota Semarang, Kota Sorong, Kota Sukabumi, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tarakan, Kota Tasikmalaya, Kota Tebing Tinggi, Kota Tegal, Kota Ternate, Kota Tomohon, Kota Tual, Kota Yogyakarta
2	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut				11.000,0				
		Meningkatnya kualitas ekosistem pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan pesisir dan laut				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut	
			Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistemnya (pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai)	2 kawasan prioritas	5.000,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut	Wilayah I (1 kawasan) : Kab. Lampung Selatan - Provinsi. Bandar Lampung Wilayah II (1 kawasan) : Kota Palu - Provinsi Sulteng
		Meningkatnya sarana instalasi pengolahan air limbah di perkampungan nelayan wilayah pesisir				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengendalian pencemaran pesisir dan laut	
			Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk	2 unit	3.000,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengendalian pencemaran pesisir dan laut	Wilayah I (1 unit) : : Ds Banyudono Kec Kaliiori, Rembang- (Jateng) Wilayah II (1 unit) : Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
		Clean up di lokasi pesisir dan laut yang tercemar tumpahan minyak				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengendalian pencemaran pesisir dan laut	
			Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dilakukan clean up akibat tumpahan minyak	2 lokasi	2.000,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengendalian pencemaran pesisir dan laut	2 lokasi: Bintan (Prov. Kepri) dan Teluk Jakarta (Prov. DKI Jakarta)
		Penyediaan Peta, Data Pencemaran dan Sumber Pencemar pada Kawasan Pesisir				Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengendalian pencemaran pesisir dan laut	
			Jumlah kawasan pesisir yang dilakukan penentuan baseline pencemar, pemantauan berkala, dan pemetaan sumber pencemar	3 kawasan pesisir	1.000,0	Kemaritiman dan Kelautan	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengendalian pencemaran pesisir dan laut	3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) - Teluk Jakarta, Teluk Benoa Bali, dan Teluk Semarang
3	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka				9.000,0				
		Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	
			Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	8 ha	8.000,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	Prov. Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan
		Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang				Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
			Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	18 Industri	1.000,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Produktivitas dan Daya Saing Industri	Pengembangan Industri Hijau	63 Kab/Kota: Kab. Balangan, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Banjar, Kab. Barito Selatan, Kab. Belitong, Kab. Belitong Timur, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Berau, Kab. Bogor, Kab. Bolaang

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									Mongondow, Kab. Bombana, Kab. Bungo, Kab. Buton Selatan, Kab. Dhamasraya, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Kapuas, Kab. Karimun, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kotabaru, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Lahat, Kab. Lebong, Kab. Luwu Timur, Kab. Mimika, Kab. Minahasa Utara, Kab. Morowali, Kab. Muara Enim, Kab. Murung Raya, Kab. Nunukan, Kab. Pandeglang, Kab. Pangkep, Kab. Pasir, Kab. Sanggau, Kab. Sarolangun, Kab. Sawahlunto, Kab. Sijunjung, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Tabalong, Kab. Tanah Tidung, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapin, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Barito Timur, Kota Balikpapan, Kota Bandarlampung, Kota Jakarta Timur, Kota Pangkal Pinang, Kota Samarinda, Kota Sawah Lunto, Kota Sorong
4	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut				1.209.000,0				
		Terpulihkannya Ekosistem Gambut				Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	
			Luas ekosistem gambut yang terpulihkan	2.100 Ha	7.000,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	Provinsi : Kab. Naganraya, Kab. Kutai Timur, Kab. Tanah Tidung
		Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya				Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri	Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			Proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya melalui Program PROPER sebesar 50% dari 27 industri yang dinilai	40 Industri	2.000,0	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Produktivitas dan Daya Saing Industri	Pengembangan Industri Hijau	Kab. Nagan Raya, Kab. Mandailing Natal, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kep. Meranti, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hilir, Kab. Muaro Jambi, Kab. Sarolangun, Kab. Bangka Selatan, Kab. Banyuasin, Kab. OKI, Kab. Ketapang, Kab. Sambas, Kab. Pontianak, Kab. Kayong Utara, Kab. Sukamara, Kab. Barito Selatan, Kab. Katingan, Kab. Hulu sungai Selatan, Kab. Malinau, Kab. Kutai Kartanegara
	Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Ekosistem Gambut								
		Terpulihkannya ekosistem gambut di 7 Provinsi Prioritas							
			Luas ekosistem gambut yang terpulihkan	400.000 Ha	1.200.000,0	Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	
5	Dukungan Manajemen Ditjen. PPKL								
		Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH							
			Terlayannya layanan perkantoran serta gaji pegawai	12 Bulan	38.021,0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Ditjen PPKL
	JUMLAH TOTAL				7.528.188				

